

jurnal ilmiah pendidikan anak usia dini  
dan pendidikan masyarakat

# andragogia

Edisi Juni 2019

---

**Implementasi Kebijakan Kampung Literasi Terhadap Upaya Layanan  
Literasi Masyarakat**

**(Kajian pada Kampung Literasi di Provinsi Jawa Tengah)**  
Yuniarti, Jamaludin, Andriyanto, Ikhsan Hendra Warsita

---

**Evaluasi Kebermanfaatan Bantuan Sarana Prasarana Lembaga Kursus dan  
Pelatihan di Jawa Tengah  
Tahun 2015—2017**

Melati Indri Hapsari, Agus wahyono, Birowo Dwi Condro, Retno Wihartati

---

**Efektifitas Pemanfaatan Dana Bansos Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)  
di Provinsi Jawa Tengah 2017**

Heru Priambodo, M.Kom., Ana Kristiani, M.Pd Agus Wijatmoko, M.Pd.,  
Tatiek Dyah Wardani, M.Kes

---

**Evaluasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD  
di Jawa Tengah Tahun 2018**

Waluyo Basuki, Zumrotul Khasanah, Farida Widyawati, Aniek Sugiyanti

---

**Model Pembelajaran Matematika Untuk Anak Usia Dini dengan Media Game  
SISOMAT (Literasi Skenario Matematika)**

Endang Tri Haryanti, Suyanto, Sri Haryati

---

**Efektifitas dan Peranan Himpaudi dalam Meningkatkan  
Kompetensi Profesional Pendidik PAUD**

Sutarmin

---

**Menumbuhkan Jiwa Bela Bangsa Anak Usia Dini Berbasis  
Pendidikan Karakter Era Globalisasi**

Eem Kurniasih

---

**Studi Komparasi Hasil Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan  
Metode Pembelajaran VISA dan Pembelajaran Praktik pada Pendidikan  
Kecakapan Kerja Program Aplikasi Perkantoran**

Heru Priambodo, Tatiek Dyah Wardani, Khozin Dwiono



**PP PAUD DIKMAS**

Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah  
Bekerja sama dengan Kaprodi PLS Pasca Sarjana UNNES Semarang



**Pengarah:**

Ir. Djajeng Baskoro, M.Pd

**Penanggungjawab:**

Drs. Suka, M.Pd

**Ketua Penyunting:**

Dra, Riyati Anggoro Peni, M.Pd

**Penyunting Pelaksana:**

Yuniarti, M.Hum

Bibit Solekhah, M.Pd

Ana Kristiani, M.Pd

Jendra

**Penyunting Ahli:**

Prof. Dr. Tri Joko Raharjo

**Pelaksana Administrasi:**

Febri Hartanti P, M.Pd

Arif Wibowo, ST

Dedy Haryanto, S.Kom

Rudiyanto, S.Si

Rahmawati K, S.Pd

Aris

Catur A

Lulu

**Pelaksana Teknis:**

Rakhmat Gunarja, S.Pd

Sri Rahayuningsih, S.Pd

**Diterbitkan oleh:**

PP-PAUDNI Regional II

Semarang

Bekerja sama dengan

Kaprodi PLS Pascasarjana

UNNES Semarang

**Alamat Redaksi:**

Jl. Diponegoro 250 Ungaran

Semarang, Jawa Tengah.

Telp. 024-6921187

Fax. 024-6922884

jurnal ilmiah  
pendidikan anak usia dini  
dan pendidikan masyarakat

# andragogia

Edisi Juni 2019

## Daftar Isi

---

**Implementasi Kebijakan Kampung Literasi Terhadap Upaya Layanan Literasi Masyarakat (Kajian pada Kampung Literasi di Provinsi Jawa Tengah)**  
Yuniarti, Jamaludin, Andriyanto, Ikhsan Hendra Warsita

---

**Evaluasi Kebermanfaatan Bantuan Sarana Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan di Jawa Tengah Tahun 2015—2017**  
Melati Indri Hapsari, Agus wahyono, Birowo Dwi Condro, Retno Wihartati

---

**Efektifitas Pemanfaatan Dana Bansos Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) di Provinsi Jawa Tengah 2017**  
Heru Priambodo, M.Kom., Ana Kristiani, M.Pd Agus Wijatmoko, M.Pd., Tatiek Dyah Wardani, M.Kes

---

**Evaluasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD di Jawa Tengah Tahun 2018**  
Waluyo Basuki, Zumrotul Khasanah, Farida Widyawati, Aniek Sugiyanti

---

**Model Pembelajaran Matematika Untuk Anak Usia Dini dengan Media Game SISOMAT (Literasi Skenario Matematika)**  
Endang Tri Haryanti, Suyanto, Sri Haryati

---

**Efektifitas dan Peranan Himpaudi dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Pendidik PAUD**  
Sutarmin

---

**Menumbuhkan Jiwa Bela Bangsa Anak Usia Dini Berbasis Pendidikan Karakter Era Globalisasi**  
Eem Kurniasih

---

**Studi Komparasi Hasil Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Metode Pembelajaran VISA dan Pembelajaran Praktik pada Pendidikan Kecakapan Kerja Program Aplikasi Perkantoran**  
Heru Priambodo, Tatiek Dyah Wardani, Khozin Dwiono

---



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG LITERASI TERHADAP  
UPAYA LAYANAN LITERASI MASYARAKAT  
(Kajian pada Kampung Literasi di Provinsi Jawa Tengah)**

**Yuniarti, Jamaludin, Andriyanto, Ikhsan Hendra Warsita**  
Pamong Belajar PP PAUD dan Pendidikan Masyarakat  
Jawa Tengah

**Abstrak**

*Kebijakan Kampung Literasi muncul sebagai upaya pemerintah dalam menaikkan indeks pembangunan manusia melalui upaya meningkatkan literasi masyarakat. Kampung Literasi terwujud untuk menjadi wadah bagi pengembangan kegiatan literasi di masyarakat. Program Kampung Literasi yang digulirkan oleh masyarakat perlu dikaji lebih jauh apakah program tersebut terbukti secara empiris dapat meningkatkan literasi masyarakat.*

*Kajian dilakukan terhadap 11 (sebelas) Kampung Literasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menjadikan populasi sebagai sampel dengan teknik total sampling, kemudian data dianalisis menggunakan triangulasi data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen.*

*Hasil pengkajian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kesebelas Kampung Literasi mengimplementasikan program Kampung Literasi sebagaimana tertuang dalam juknis. Kegiatan literasi yang dilakukan mencakup 6 (enam) jenis literasi meliputi: 1) literasi baca tulis, 2) literasi numerasi, 3) literasi sains, 4) literasi TIK, 5) literasi keuangan dan 6) literasi budaya dan kewargaan.*

*Dampak positif keberadaan kampung literasi dapat dilihat pada hasil-hasil sebagai berikut: 1) terdapat peningkatan pola pikir masyarakat akan perlunya pengetahuan dan informasi baru, 2) terdapat perubahan sikap masyarakat dalam memecahkan masalah, 3) terdapat peningkatan keterampilan sebagai hasil kegiatan literasi. Peranan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan kampung literasi di masyarakat. Dukungan masyarakat dalam bentuk pemikiran, tenaga, moral, spiritual dan materiil telah turut serta mendukung keberhasilan kampung literasi. Beberapa kelemahan yang muncul antara lain adalah perlunya peningkatan kapasitas pengelola kampung literasi, perlunya regenerasi dan peningkatan kerjasama antar berbagai unsur yang turut serta menunjang implementasi kampung literasi di masyarakat.*

**Kata kunci:** Kampung Literasi, literasi, implementasi, masyarakat

## **A. BAB I Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas menentukan empat fokus kebijakan pembinaan pendidikan masyarakat tahun 2018 yaitu pertama, memperkuat program pendidikan keaksaraan yang mampu meningkatkan kompetensi keaksaraan dasar dan paska keaksaraan bagi penduduk dewasa secara adil, merata dan bermutu. Kecakapan tersebut harus terintegrasi dengan kecakapan hidup dan kemampuan pencegahan masalah sosial dan lingkungan untuk mendorong perbaikan kesejahteraan, produktivitas penduduk dan ikut serta dalam mendukung perbaikan indeks pembangunan manusia.

Kedua, mendorong terselenggaranya gerakan membaca masyarakat dan memasyarakatkan membaca melalui pengembangan Taman Bacaan Masyarakat di ruang publik seperti di mall, stasiun, rumah sakit dan terminal yang sangat bermanfaat bagi anggota masyarakat, termasuk untuk akasrawan baru, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku.

Ketiga, meningkatkan pelayanan pendidikan pemberdayaan perempuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam

pembangunan, menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan dan mendukung upaya pencegahan perdagangan orang (*trafficking*) serta tindak kekerasan (KDRT) sebagai wujud perlindungan HAM.

Keempat, meningkatkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan melalui peningkatan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam layanan, partisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat yang setara dalam bidang pendidikan.

Mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui kebijakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menindaklanjuti dengan program kampung literasi yang menyangkut: 1) memperkuat program pemberantasan buta aksara, 2) program peningkatan budaya baca, 3) peningkatan pelayanan pendidikan bagi perempuan, dan 4) pengarusutamaan gender.

Kebijakan Kampung Literasi muncul sebagai upaya pemerintah dalam menaikkan indeks pembangunan manusia melalui upaya meningkatkan literasi masyarakat. Kampung Literasi terwujud untuk menjadi wadah bagi pengembangan kegiatan literasi di masyarakat. Program Kampung Literasi yang digulirkan oleh masyarakat perlu dikaji lebih jauh apakah program tersebut terbukti secara empiris dapat meningkatkan literasi masyarakat.

## 2. Tujuan

### a. Tujuan Umum

Pengkajian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Kampung Literasi terhadap peningkatan literasi di masyarakat.

### b. Tujuan Khusus

Secara khusus pengkajian ini bertujuan untuk:

- 1) Mendeskripsikan kegiatan dalam Kampung Literasi yang menunjang peningkatan budaya dan minat baca masyarakat .
- 2) Mendeskripsikan peran sumber daya lokal dalam mendukung program kampung literasi dan sejauh mana peran tersebut dapat membantu meningkatkan literasi masyarakat.
- 3) Mendeskripsikan factor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan kampung literasi.

## 3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada pengkajian ini secara terperinci dapat dituliskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi kebijakan program Kampung Literasi terhadap budaya literasi masyarakat yang ditandai dengan:
- b. Upaya apa sajakah yang telah dilakukan untuk menunjang peningkatan budaya dan minat baca masyarakat dan sejauh mana hasil yang diperoleh?
- c. Bagaimanakah peran sumber daya lokal dalam mendukung program kampung literasi dan sejauh mana peran tersebut dapat membantu meningkatkan literasi masyarakat?
- d. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat kemungkinan pengembangan kampung literasi?

## 4. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari pengkajian ini, antara lain:

- a. Hasil pengkajian dapat dimanfaatkan secara teoritis bagi pengembangan program pendidikan masyarakat dan pemerintahan terutama terkait implementasi kebijakan program kampung literasi yang dikembangkan di masyarakat agar lebih baik.

- b. Secara praktis pengkajian ini memberikan manfaat untuk;
- 1) Bahan kajian kampung literasi yang dapat meningkatkan literasi masyarakat.
  - 2) Bahan rekomendasi penyempurnaan kebijakan program kampung literasi terhadap pemerintah.
  - 3) Bahan studi perbandingan oleh penyelenggara kampung literasi lain yang berkeinginan untuk memajukan dan mengembangkan program kampung literasi yang dikelolanya.

## **B. BAB II Landasan Teori**

### **1. Konsep Literasi**

#### **a. Definisi Literasi Dasar**

Literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis yang berhubungan dengan keberhasilan seseorang dalam lingkungan masyarakat akademis sehingga literasi merupakan piranti yang dimiliki untuk dapat meraih kesuksesan dalam lingkungan sosial.

National Assesment of Educational Progress mengartikan literasi sebagai kemampuan performansi membaca dan menulis yang diperlukan sepanjang hayat (Winterowd, 1989: 5). Seorang ahli hukum memandang bahwa literasi merupakan kompetensi dalam memahami wacana, baik sebagai pembaca maupun sebagai penulis sehingga menampilkan pribadi sebagai profesional berpendidikan yang tidak hanya menerapkan untuk selama kegiatan belajar, tetapi menerapkannya secara baik untuk selamanya (White, 1985: 46).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa literasi adalah (1) kemampuan baca-tulis atau kemelekwacanaan, (2) kemampuan mengintegrasikan antara menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berpikir, (3) kemampuan siap untuk digunakan dalam menguasai gagasan baru atau cara mempelajarinya, (4) piranti kemampuan sebagai penunjang keberhasilannya dalam lingkungan akademik atau sosial, (5) kemampuan performansi membaca dan menulis yang selalu diperlukan.

#### **b. Konsep Literasi secara Luas**

Literasi secara luas adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud/tujuan, literasi itu bersifat dinamis – tidak statis – dan dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus/ wacana. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan cultural. Yang dimaksud dengan teks di atas adalah mencakup teks tulis dan teks lisan.

Terdapat tujuh unsur yang membentuk definisi tersebut, yaitu berkenaan dengan: 1) interpretasi, 2) kolaborasi, 3) konvensi, 4) pengetahuan kultural, 5) pemecahan masalah, 6) refleksi, dan 7) penggunaan bahasa. Ketujuh hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dari literasi.

#### **c. Tingkatan Literasi**

Literasi tidaklah seragam karena literasi memiliki tingkatan-tingkatan yang menanjak. Jika seseorang sudah menguasai satu tahapan literasi maka ia memiliki pijakan untuk naik ke tingkatan literasi berikutnya.

d. Membangun Budaya Literasi

Pembelajaran berbasis budaya literasi akan mengkondisikan warga belajar untuk menjadi seorang literat. Peningkatan kemampuan literasi dalam belajar sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu berkembangnya potensi warga belajar agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas, 2003).

Pemerolehan tujuan ini dapat dilakukan warga belajar jika mereka telah menjadi sosok literat. Warga belajar memiliki bekal literasi dalam dirinya sehingga mampu melengkapi diri dengan kemampuan yang diharapkan. Proses pemahaman warga belajar terhadap fenomena sosial dengan pengenalan secara langsung akan lebih memudahkan bagi pembelajar dalam mengembangkan kompetensinya. Warga belajar harus terbiasa dengan membaca berbagai informasi dan mengakses informasi dari media elektronik maupun media tertulis. Selain itu, warga belajar perlu mengikuti perkembangan peradaban yang sedang terjadi secara faktual. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kompetensi keaksaraan perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas dalam membangun insan literat, yaitu (1) mengarahkan aktivitas warga belajar; (2) memilih dan menyiapkan bahan pembelajaran; (3) memeriksa hasil kerja warga belajar; (4) mengarahkan sistem berkomunikasi keilmuan; (5) berkoordinasi dalam menyiapkan program untuk kegiatan literasi.

e. Prinsip pendidikan literasi

Terdapat tujuh prinsip pendidikan literasi yang diambil dari definisi Kern (2000) di atas, yaitu:

- 1) Literasi melibatkan interpretasi
- 2) Literasi melibatkan kolaborasi
- 3) Literasi melibatkan konvensi
- 4) Literasi melibatkan pengetahuan kultural.
- 5) Literasi melibatkan pemecahan masalah.
- 6) Literasi melibatkan refleksi dan refleksi diri.
- 7) Literasi melibatkan penggunaan bahasa.

f. Literasi Teknologi

Era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan persaingan yang sangat ketat menuntut manusia untuk mampu terus-menerus belajar menguasai berbagai ilmu dan teknologi secara cepat.

g. Literasi Informasi

Literasi informasi sering disebut juga dengan keberaksaraan informasi atau kemelekakan informasi. Dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, literasi informasi sering dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan memanfaatkan secara benar informasi yang tersedia.

h. Literasi Finansial

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan (Lusardi & Mitchell 2007). Hal ini dapat dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk menyongsong, dan lebih spesifiknya yaitu globalisasi dalam bidang keuangan.

## 2. Konsep Kampung

Beberapa definisi yang dapat menggambarkan tentang kampung adalah sebagai berikut;

- a. Desa; awal terbentuknya sebuah desa di masa lalu tidak terlepas dari potensi yang ada pada saat itu dan teknologi yang mereka miliki, dari yang bersifat nomaden kemudian menetap di suatu tempat dengan mengelompok yang disebut pradesa, kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan potensi yang ada pada desa. Pola tata ruang desa pada umumnya sangat sederhana, letak rumah di kelilingi pekarangan cukup luas, jarak antara rumah satu dengan lain cukup longgar, setiap rumah mempunyai halaman, sawah dan ladang di luar perkampungan.
- b. Desa kota; Pada desa yang sudah berkembang pola tata guna lahan lebih teratur, yaitu adanya perusahaan yang biasa mengolah sumberdaya desa, terdapat pasar tradisional, tempat ibadah rapi, sarana dan prasarana pendidikan serta balai kesehatan. Semakin maju daerah pedesaan, bentuk penataan ruang semakin teratur dan tertata dengan baik.
- c. Proto urban condition; proto adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya awal. Pemahaman tentang proto urban condition adalah lingkungan atau daerah yang belum menjadi kota dan berproses untuk menjadi kota. Lingkungan yang dikenal sebagai proto urban tidak sepenuhnya kegiatan utamanya adalah pertanian (desa) tetapi banyak juga kegiatan yang bukan pertanian, batas antara sebutan untuk sebuah kota dan desa bukan kota dan juga bukan desa itulah yang dimaksud dengan proto urban.
- d. Kampung; suatu wilayah dimana masyarakatnya masih mempertahankan tradisi, dimensi kebudayaan dan adat istiadat yang diwariskan turun temurun dan umumnya berlokasi di sekitar pusat kota.
- e. Karakteristik kampung; 1) Fasilitas umum memadai tetapi kondisinya kurang kondusif, 2) Kondisi hunian yang homogen maksudnya rumahnya bentuk, besarnya, bahan bakunya, bahkan sampai warna catnya sama, 3) karena daerah kampung luas mereka tinggal satu sama lain cukup berjauhan, 4) Perkampungan hidup dengan norma, kepercayaan, adat istiadat yang diwariskan, 5) turun temurun sehingga modernisasi tidak dianggap perlu 6) Lingkungan bersih sehingga keadaan masyarakat selalu sehat.

## C. BAB III Metode

Kajian dilakukan terhadap 11 (sebelas) Kampung Literasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menjadikan populasi sebagai sampel dengan teknik total sampling, kemudian data dianalisis menggunakan triangulasi data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen.

## D. BAB IV Hasil Kajian

### 1. Implementasi Program Kampung Literasi

Sebagaimana petunjuk teknis pelaksanaan Kampung Literasi maka kegiatan literasi dikelompokkan ke dalam 5 literasi pokok sebagai berikut: 1) Literasi Baca Tulis Hitung, 2) Literasi Sains, 3) Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, 4) Literasi Keuangan, 5) Literasi Budaya dan Kewarganegaraan.

Program basic literasi (literasi baca tulis dan hitung) dilaksanakan dalam bentuk: 1) layanan peminjaman bahan bacaan, 2) pelatihan menulis, 3) project hasil karya, 4) bedah buku, 5) perlombaan literasi kebahasaan.

Kegiatan perluasan kampung literasi ini berhasil di beberapa tempat (sebagian kampung literasi) namun beberapa belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kegiatan peminjaman buku misalnya, adalah salah satu kegiatan literasi baca tulis yang terbatas peminatnya. Sebagian besar kampung literasi yang dijadikan subjek penelitian menunjukkan bawa peminat terbesar peminjam bahan bacaan adalah usia anak-anak (usia TK, SD, SMP). Disusul berikutnya oleh kaum ibu. Sangat sedikit di kalangan pria dewasa.

Kegiatan literasi baca tulis menjadi lebih berwarna dengan adanya penerbitan buku yang dimulai dari proses pelatihan penulisan buku. Di beberapa kampung literasi terbit buku atau kumpulan cerpen atau novel sebagai hasil dari proses pelatihan menulis. Sebagian besar pengguna (baca masyarakat) tertarik untuk mengikuti proses penulisan cerpen atau novel.

Kegiatan pengembangan literasi berikutnya yang berhasil menarik masyarakat adalah kegiatan literasi keuangan melalui kegiatan kewirausahaan seperti; pembuatan souvenir, kerajinan, makanan, peternakan dan kegiatan produktif lainnya. Hal ini sangat wajar mengingat masyarakat tertarik untuk melakukan kegiatan yang dianggap mampu meningkatkan kehidupan perekonomian.

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka ketertarikan generasi milenial adalah pada literasi TIK. Ketertarikan pada TIK tumbuh seiring dengan menjamurnya *gadget* (gawai) yang mendukung. Munculnya *blogger* dan *youtuber* menjadi salah satu yang menarik minat masyarakat terutama generasi muda. Sehingga di beberapa kampung literasi, kegiatan literasi yang berkaitan dengan TIK menjadi daya dukung yang berhasil.

Kampung Literasi yang dilengkapi dengan internet menjadi salah satu alasan pengunjung yang sebagian besar generasi muda mendatangi kampung literasi. Tujuan utamanya tentu saja berselancar di dunia maya melalui internet gratis yang tersedia.

Literasi seni dan budaya bagi sebagian kampung literasi juga menjadi cara yang tepat untuk mengembangkan dan mengenalkan masyarakat pada pengetahuan. Munculnya kelompok kesenian yang didukung oleh kampung literasi menjadi salah satu program yang berhasil mendongkrak keberadaan kampung literasi.

## 2. Peranan Sumber Daya Lokal (SINERGITAS)

Sumber daya lokal meliputi;

- a. Tokoh penggerak; tokoh masyarakat, kaum ibu, pemuda.
- b. Relawan atau pegiat; pemuda dan mahasiswa, kaum perempuan,
- c. Mitra; organisasi profit non profit, perorangan
- d. CSR; pendanaan dan sarpras dari perusahaan
- e. Perguruan Tinggi; dukungan relawan mahasiswa, nara sumber teknis
- f. Masyarakat; dukungan pelaksana kegiatan, dukungan pendanaan,

Sumber daya lokal ini memiliki peran sebagai tokoh penggerak dan motivator sekaligus mentor bagi relawan dan masyarakat dalam menggerakkan kampung literasi. Tanpa tokoh ini kampung literasi seringkali tidak berkembang bahkan memiliki kecenderungan untuk berhenti.

Peranan lainnya dalah sebagai sumber pendanaan yang menunjang kegiatan. Sumber pendanaan dapat berupa dana pribadi atau dana perusahaan dalam bentuk CSR.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pelatihan/workshop/seminar
- b. Melakukan studi banding

### **3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat**

#### **a. Faktor Pendukung**

Beberapa factor pendukung yang terdapat pada kampung literasi berdasarkan hasil pengkajian antara lain:

- 1) Keberadaan sumber daya alam; kemungkinan berkembang desa wisata, produk lokal (UMKM)
- 2) Keberadaan budaya dan tradisi lokal (kesenian daerah, dolanan anak, tradisi upacara keagamaan)
- 3) Keberadaayaan sumber daya manusia; tokoh penggerak, relawan

#### **b. Penghambat**

- 1) Pendanaan; keberlanjutan program apabila tidak ada dukungan dana dari pemerintah
- 2) Menjadi kampung literasi yang produktif; bagaimana menghasilkan sumber pendanaan sendiri

## **E. BAB V Kesimpulan**

### **1. Kesimpulan**

#### **a. Implementasi**

Implementasi pelaksanaan kampung literasi memberikan dampak positif antara lain:

- 1) Meningkatnya frekuensi kunjungan masyarakat pada kampung literasi dengan tujuan mencari informasi dan memecahkan masalah.
- 2) Terjadi perubahan sikap; semula acuh terhadap kondisi wilayah menjadi masyarakat yang memiliki keinginan berubah lebih baik. Terjadi peningkatan aktivitas kemasyarakatan.
- 3) Meningkatkan keterampilan; memiliki tambahan keterampilan sebagai hasil kegiatan di kampung literasi.

#### **b. Peranan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dan peranannya meliputi;

- 1) Tokoh penggerak; tokoh masyarakat, kaum ibu, pemuda.
- 2) Relawan atau pegiat; pemuda dan mahasiswa, kaum perempuan,
- 3) Mitra; organisasi profit non profit, perorangan
- 4) CSR; pendanaan dan sarpras dari perusahaan
- 5) Perguruan Tinggi; dukungan relawan mahasiswa, nara sumber teknis
- 6) Masyarakat; dukungan pelaksana kegiatan, dukungan pendanaan,

#### **c. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung kegiatan kampung litreasi adalah tersedianya sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya yang menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan kampung literasi sedangkan factor penghambat adalah factor pendanaan yang memungkinkan keberlangsungan kegiatan kampung literasi apabila dana pemerintah tidak lagi digulirkan.

## 2. Rekomendasi

Sebagai salah satu upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan literasi masyarakat maka beberapa rekomendasi dapat diberikan antara lain:

- a. Rekomendasi untuk penyelenggara kampung literasi
  - 1) Memperluas akses kegiatan literasi. Kegiatan yang selama ini hanya terbatas pada kegiatan literasi baca tulis dapat dikembangkan dengan literasi lain yang disesuaikan dengan potensi lokal yang ada.
  - 2) Meningkatkan peranan lokal genius (SDM lokal) untuk mengembangkan kampung literasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
  - 3) Menjalani kemitraan untuk mendukung keberhasilan kampung literasi (sinergi dengan pihak lain)
  - 4) Mengoptimalkan sumber daya dan potensi lokal sebagai basis pengembangan kampung literasi.
- b. Rekomendasi bagi pemerintah daerah
  - 1) Menindaklanjuti program kampung literasi yang menjadi kebijakan pusat melalui dukungan penganggaran pihak daerah.
  - 2) Membuka kampung literasi sejenis di wilayah-wilayah lain (perluasan akses).
  - 3) Bersinergi dengan pemerintah pusat
- c. Rekomendasi bagi pemerintah pusat
  - 1) Dana APBN yang diberikan merupakan modal awal pendirian Kampung Literasi sedangkan keberlangsungan kegiatan kampung literasi selanjutnya dapat dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan kampung literasi melalui dana yang bersumber dari daerah (APBD).
  - 2) Memberi kesempatan penyelenggara kampung literasi untuk mengikuti peningkatan kapasitas melalui workshop, seminar, pelatihan.
  - 3) Menjadikan kegiatan kampung literasi sebagai program layanan edukasi (mendukung program pendidikan masyarakat).
  - 4) Memberikan **prasyarat** bagi lembaga yang akan menyelenggarakan Kampung Literasi dengan menyertakan **MoU** (naskah kerjasama) dengan mitra kerja yang berupa kesepakatan perjanjian kegiatan dan pendanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, Chaedar. (2001). *Membangun Kota Berbudaya Literat*. Jakarta: Media Indonesia.
- Arikunto, S. (1983). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara.
- Baynhem, Mike. (1995). *Literacy Practice*. London: Prentice Hall.
- Beals, R. (1962). *Acculturation. Anthropology Today: Selection*, SolTax.Chicago: The University of Chicago.
- Bogdan, R.C dan Biklen, S.K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn dan Bacon, Inc.
- Bogdan, R.C dan Taylor, S. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Borg, W.R and Gall, M.D. (1983). *Educational Research: An Introduction (4<sup>th</sup> Edition)*, New York: Longman.
- Brannen, J., ed. (1993). *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*, Brookfield-USA: Avebury.

- Chandler, RC dan J.C Plano. 1988. *The Public Administration Dictionary*, Santa Barbara
- Childe, V.G. (1956). *Man Makes Himself*. New York: New American Library.
- Coser, L.A. (1973). *Social Conflict and the Theory of Social Change*. New York: Basic Books.
- David Eston (dalam Solikhin Abdul Wahab, 2001) *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Davis, Phil. (1996). *Information Literacy, from theory and Research to Developing and Instructional*. <http://www.mannlib.cornell.edu/pmd8/literacy.html>.
- Edward, G.C III (dalam Subarsono, 2005) *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Evans, D.R. (1979) *The Planning of Nonformal Education*. Amherst. Mass: Center for International Education. The University of Massachusetts.
- Evan, Linds. (1994). *Information Literacy*. Ocofillo Report.
- Fortes, N. (1976). *Ethnicity: Theory and Experience*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Grindle, Marrile S. 1980, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princeton University Press
- Hadi, Sutrisno. (1983). *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM.
- Islamy, M. Irfan, 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- James E. Anderson (dalam Subarsono, 2005) *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- James E. Anderson (dalam Wahab, 2001) *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Penerapan Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Koentjaraningrat. (1958). *Beberapa Metode Anthropologi dalam Penyelidikan-penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: Harper Collins
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn (dalam Subarsono, 2005). *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Narbuko, Cholid. (2003). 5ed. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Neisser, U. (1968). *Cultural and Cognitive Discontinuity, Theory in Anthropology*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Poerwanto, Hari. (2000). *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berkowitz, B & Eisenber, M 2006, What is the big6? Di unduh dari <http://www.big6.com/>
- Bhandary, KM 2006, Information literacy and librarian's role. Diunduh dari <http://www.tucl.org.np/infliteracy.htm> tanggal 27 Juli 2008.
- <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/05/01/literasi-ekonomi/.htm> 27 Juli 2018
- <http://3-sueprizal.blogspot.com/2008/11/definisi-kampung.html>) tanggal 27 Juli 2018
- <http://wikipedia/kampung.html> tanggal 27 Juli 2018
- <http://shvoong.com/social-sciences/education/2238827-pengertian-kampung-desa/#ixzz1wJvkBceH> diunduh tanggal 27 Juli 2018
- <http://www.artikata.com/arti-332746-kampung.html> diunduh tanggal 27 Juli 2018



**EVALUASI KEBERMANFAATAN BANTUAN SARANA PRASARANA LEMBAGA KURSUS  
DAN PELATIHAN DI JAWA TENGAH  
TAHUN 2015 – 2017**

**Melati Indri Hapsari, Agus wahyono, Birowo Dwi Condro, Retno Wihartati**  
Pamong Belajar PP PAUD dan Pendidikan Masyarakat  
Jawa Tengah

**Abstrak**

*Program bantuan sarana prasarana diharapkan dapat lebih memperkuat keberadaan lembaga kursus dan pelatihan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam rangka meningkatkan mutu dan perluasan akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Program yang sudah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat sejak tahun 2011 tersebut memang dilakukan monitoring tetapi belum dilaksanakan secara intensif untuk melihat kondisi pelaksanaan program bantuan sarana prasarana di lapangan. Penelitian dan pengkajian ini berfungsi sebagai evaluasi terhadap hasil dan dampak pelaksanaan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan. Penelitian dan pengkajian dilakukan terhadap berbagai komponen pendukung pelaksanaan program dan dampaknya bagi peningkatan peran lembaga kursus dan pelatihan dalam melayani masyarakat.*

*Tujuan penelitian bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan pengelolaan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan di Jawa Tengah tahun 2015-2017, 2) Mendeskripsikan kebermanfaatan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan di Jawa Tengah tahun 2015-2017, 3) Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh LKP dalam mengelola program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan di Jawa Tengah tahun 2015-2017, 4) Menganalisis dampak program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan di Jawa Tengah tahun 2015-2017 terhadap perkembangan LKP.*

*Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian evaluasi, dengan pertimbangan rancangan ini sesuai dengan karakteristik analisis penelitian yang bersifat deskriptif dan evaluatif. Penelitian ini dilaksanakan di LKP yang menerima bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan, khususnya LKP yang berdomisili di Jawa Tengah tahun 2015 - 2017. Jumlah LKP yang menerima bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan tahun 2015 – 2017 untuk Jawa Tengah sebanyak 42 LKP. Sampel penelitian ini sebanyak 26 lembaga yang ditentukan dengan teknik random sampling. Subyek penelitian adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan serta pihak yang memanfaatkan sarana prasarana tersebut, yang antara lain Pimpinan LKP, Tenaga Kependidikan LKP, Pendidik, Peserta didik dan atau masyarakat pengguna sarana prasarana. Penelitian ini dilaksanakan mulai Bulan Juli 2018. Data penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi didukung oleh wawancara mendalam, kuesioner dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif.*

*Pelaksanaan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan mulai dari perencanaan sampai dengan pendampingan teknis dan pemantauan berjalan dengan baik. Apabila ada hambatan dapat diselesaikan dengan segera. Faktor penghambat antara lain kurang perawatan, pengawasan pemakaian, perbaikan setelah aus. Faktor pendukung antara lain pelaksanaan kursus yang terus menerus dan aktif, kerja sama dengan pihak lain, kreativitas instruktur dalam penggunaan sarana. Tingkat kebermanfaatan dilihat dari intensitas penggunaan sarana adalah enam kali seminggu, lima kali seminggu, satu kali seminggu. Intensitas tersebut tergantung jadwal pembelajaran masing-masing LKP (sesuai dengan jumlah peserta didik dan sarana prasarana serta kesepakatan dengan peserta didik). Untuk keberfungsian sarana sudah sangat tepat karena sarana yang ada membantu kesuksesan proses pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Dampak program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan sudah dapat dilihat dengan terjadinya peningkatan jumlah peserta didik yang dilayani dengan adanya penambahan sarana dari program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan. Demikian juga dengan jumlah kerja sama semakin meningkat.*

**Kata Kunci:** Kebermanfaatan, Sarana Prasarana, LKP

## A. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat memiliki berbagai kebijakan diantaranya adalah revitalisasi satuan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, melalui pemberian bantuan terhadap lembaga kursus dan pelatihan dalam bentuk bantuan sarana prasarana kursus. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta didik kursus. Optimalisasi keberadaan dan pemanfaatan sarana prasarana lembaga kursus dan pelatihan yang berasal dari program bantuan sarana prasarana perlu dilakukan agar tujuan pemberian bantuan tersebut dapat tercapai.

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sudah seyogyanya menjadi satuan pendidikan yang berkualitas dan sejajar dengan satuan pendidikan lainnya. Pentingnya kualitas setiap satuan pendidikan telah dijelaskan dalam 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.

Pengembangan sarana prasarana LKP sangat penting karena menurut para ahli pendidikan ada lima faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pendidikan yaitu pendidik, peserta didik, tujuan, alat dan lingkungan. Ketidakadaan salah satu faktor saja dari faktor tersebut, maka tidak mungkin terjadi proses belajar mengajar. Dengan 5 faktor tersebut, proses belajar mengajar dapat dilaksanakan walaupun kadang-kadang dengan hasil yang minimal pula. Hasil tersebut dapat ditingkatkan apabila ada sarana penunjang, yaitu faktor fasilitas/sarana dan prasarana pendidikan (Sabri, 1999: 7). Sehingga indikator kualitas lembaga kursus dan pelatihan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai, atau selarasnya antara peralatan belajar yang digunakan di LKP dengan peralatan kerja yang digunakan di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Tidak selarasnya peralatan tersebut akan menjadikan LKP sebagai lembaga yang hanya menghasilkan *supply*, bukan memenuhi *demand*.

Menurut standar sarana dan prasarana yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, garis besarnya antara lain (Mulyasa, 2006: 45) (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; (3) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium, ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia; (4) Standar jumlah peralatan di atas, dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.

Program bantuan sarana prasarana ini diharapkan dapat lebih memperkuat keberadaan lembaga kursus dan pelatihan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam rangka meningkatkan mutu dan perluasan akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Program yang sudah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat sejak tahun 2011 tersebut memang dilakukan monitoring tetapi belum dilaksanakan secara intensif untuk melihat kondisi pelaksanaan program bantuan sarana prasarana di lapangan.

Penelitian dan pengkajian ini berfungsi sebagai evaluasi terhadap hasil dan dampak pelaksanaan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan. Penelitian dan pengkajian dilakukan terhadap berbagai komponen pendukung pelaksanaan program dan dampaknya bagi peningkatan peran lembaga kursus dan pelatihan dalam melayani masyarakat.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana pengelolaan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan di Jawa Tengah tahun 2015-2017 oleh LKP?
2. Bagaimana pemanfaatan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan di Jawa Tengah tahun 2015-2017 oleh LKP?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh LKP dalam mengelola program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan di Jawa Tengah tahun 2015-2017?
4. Bagaimana dampak program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan tahun 2015-2017 terhadap perkembangan LKP?

Tujuan penelitian bertujuan untuk.

1. Mendeskripsikan pengelolaan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan di Jawa Tengah tahun 2015-2017.
2. Mendeskripsikan kebermanfaatan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan di Jawa Tengah tahun 2015-2017.
3. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh LKP dalam mengelola program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan di Jawa Tengah tahun 2015-2017.
4. Menganalisis dampak program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan di Jawa Tengah tahun 2015-2017 terhadap perkembangan LKP.

Manfaat penelitian ini adalah.

1. Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan  
Bahan masukan untuk meningkatkan pemanfaatan sarana prasarana yang diperoleh dari program bantuan sarana prasarana agar bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan pendidikan masyarakat.
2. Bagi PP PAUD dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah  
Memperoleh informasi tentang kebermanfaatan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan sehingga memperoleh bahan rekomendasi bagi kebijakan program dalam rangka peningkatan mutu layanan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
3. Bagi Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat  
Bahan masukan terkait kebijakan pelaksanaan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan dalam rangka perbaikan program itu sendiri.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian evaluasi, dengan pertimbangan rancangan ini sesuai dengan karakteristik analisis penelitian yang bersifat deskriptif dan evaluatif. Jenis penelitian ini dipilih karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kebermanfaatan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan, dampak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan sehingga dapat diperoleh bahan rekomendasi bagi pelaksanaan program pengembangan sarana prasarana di masa mendatang.

Penelitian ini dilaksanakan di LKP yang menerima bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan, khususnya LKP yang berdomisili di Jawa Tengah tahun 2015 - 2017. Jumlah LKP yang menerima bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan tahun 2015 – 2017 untuk Jawa Tengah sebanyak 42 LKP. Sampel penelitian ini sebanyak 26 lembaga yang ditentukan dengan teknik *random sampling*.

Subyek penelitian adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan serta pihak yang memanfaatkan sarana prasarana tersebut, yang antara lain Pimpinan LKP, Tenaga Kependidikan LKP, Pendidik, Peserta didik dan atau masyarakat pengguna sarana prasarana. Penelitian ini dilaksanakan mulai Bulan Juli 2018.

Data penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif yang berasal dari variabel program bantuan sarana prasarana, tingkat kebermanfaatan dan faktor-faktor penghambat maupun pendukung pemanfaatan sarana prasarana serta dampak program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka peneliti mengklasifikasikan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 3 (tiga), yaitu.

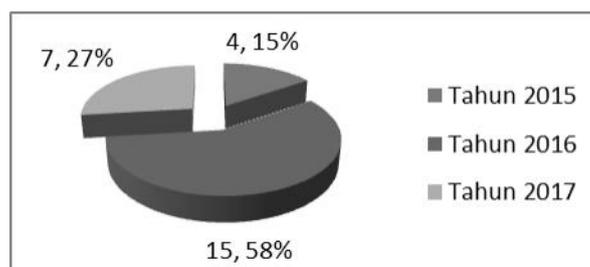
1. *Person*, yaitu pengelola LKP, tenaga kependidikan, pendidik, peserta didik dan atau masyarakat pengguna sarana prasarana.
2. *Paper*, yaitu dokumen-dokumen yang terkait program bantuan sarana prasarana lembaga kursus dan pelatihan.
3. *Place*, yaitu LKP yang menerima bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan.

Teknik pengumpulan data merupakan alat-alat pengukuran yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang akan dikumpulkan dapat berupa angka-angka keterangan tertulis, informasi lisan dan berbagai ragam fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Berkaitan dengan pengertian teknik pengumpulan data dan wujud data yang dikumpulkan, maka ada teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi didukung oleh wawancara mendalam, kuesioner dan studi dokumentasi.

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Kriteria utama untuk menjamin keterpercayaan/kebenaran hasil penelitian Lincoln dan Guba (dalam Riyanto, 2007) yaitu kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, transferabilitas.

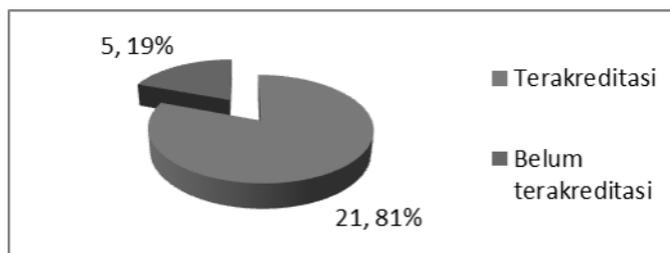
### C. PEMBAHASAN

Sampel penelitian pengkajian ini sebanyak 26 lembaga. Lembaga-lembaga yang mendapatkan bantuan sarana prasarana yang menjadi sampel penelitian adalah lembaga yang mendapatkan bantuan sarana prasarana tahun 2015 sebanyak 4 lembaga (15%), tahun 2016 sebanyak 15 lembaga (58%), tahun 2017 sebanyak 7 lembaga (27%).



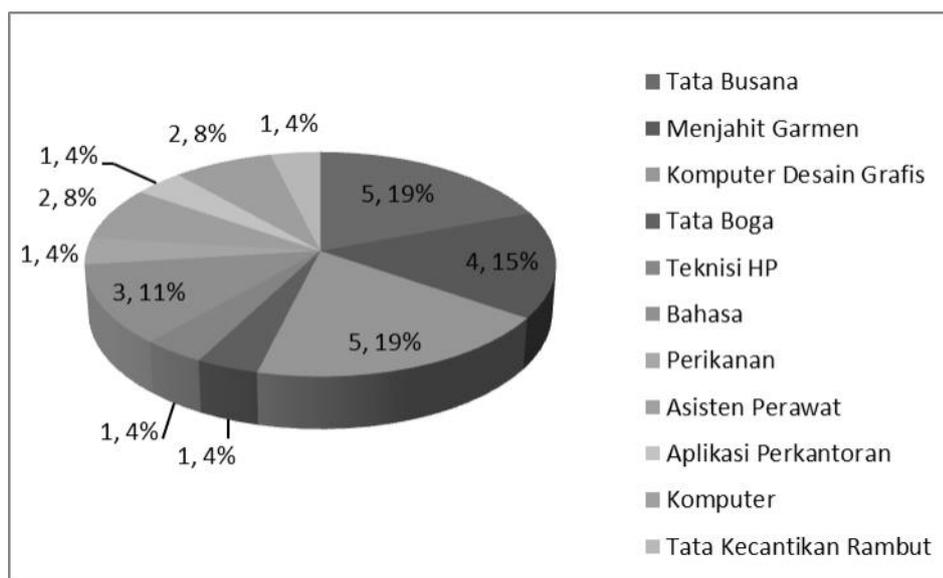
Gambar 1. Diagram Tahun Perolehan Bantuan Sarana Prasarana

Untuk status akreditasi diketahui sebanyak 26 lembaga yang menjadi sampel diketahui bahwa sebanyak 21 lembaga (81%) telah terakreditasi dan sebanyak 5 lembaga (19%) belum terakreditasi. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 2. Diagram Status Akreditasi Lembaga Sampel Penelitian**

Selanjutnya di bawah ini informasi terkait jenis kursus yang telah menerima bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan dapat dilihat pada gambar 3. Diketahui bahwa program tata busana sebanyak 5 lembaga (19%), menjahit garmen sebanyak 4 lembaga (15%), komputer desain grafis sebanyak 5 lembaga (19%), tata boga sebanyak 1 lembaga (4%), teknisi HP sebanyak 1 lembaga (4%), bahasa sebanyak 3 lembaga (11%), perikanan sebanyak 1 lembaga (4%), asisten perawat sebanyak 2 lembaga (8%), aplikasi perkantoran sebanyak 1 lembaga (4%), komputer sebanyak 2 lembaga (8%) dan tata kecantikan rambut sebanyak 1 lembaga (4%).



**Gambar 3. Diagram Jenis Kursus Sampel Penelitian**

## 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan faktor penting dalam suatu kegiatan. Perencanaan pada program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan ini terdiri dari indikator sosialisasi program (waktu, petunjuk teknis, lokasi), penyusunan proposal (verifikasi dan rekomendasi, pengiriman), proses penetapan penerima (verifikasi lapangan, penandatanganan akad kerja sama, pembekalan teknis).

Sosialisasi program dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai cara antara lain melalui rapat koordinasi, *website*. Informasi program bantuan sarana prasarana bagi pengembangan LKP diperoleh lembaga sasaran beraneka ragam waktunya. Hal tersebut tergantung dari mana dan dengan cara apa lembaga sasaran terse-

but mendapatkan informasi. Rata-rata lembaga sasaran terutama yang telah mendapatkan bantuan mendapatkan informasi pada pertengahan tahun antara Bulan Juni – Agustus. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh dari beberapa responden. Pernyataan pimpinan LPP Unistama Salatiga mendukung informasi tersebut.

*“Saya mendapatkan informasi terkait dengan bantuan untuk sarana prasarana ini dari website sekitar bulan Juni 2016,” (Ahmadi, Pimpinan LPP Unistama Salatiga).*

Penyaluran bantuan program pasti didukung dengan adanya NSPK. Demikian juga dengan program bantuan sarana prasarana bagi Pengembangan LKP juga didukung dengan NSPK dalam bentuk Petunjuk Teknis. Petunjuk teknis dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Petunjuk teknis ini berguna sebagai pedoman bagi penyalur bantuan dan penerima bantuan. Petunjuk teknis ini berisi persyaratan dan prosedur pelaksanaan bantuan sarana prasarana bagi pengembangan LKP. Petunjuk teknis yang ada sudah sangat dipahami oleh lembaga sasaran penerima bantuan. Hal tersebut sesuai dengan beberapa pernyataan di bawah ini.

*“Juknis sangat mudah dipahami sudah ada blangko yang jelas, langkah-langkahnya juga jelas,” (Eko Fajar Supriyanto, S.Kom, Pimpinan LKP Dipcom Kudus).*

Lokasi sosialisasi tergantung siapa yang melakukan sosialisasi. Sebagian besar sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupateb/kota, sehingga pelaksanaan sosialisasi dilakukan di kantor dinas pendidikan kabupaten/kota.

Langkah selanjutnya untuk perencanaan adalah penyusunan proposal. Penyusunan proposal perlu mendapat verifikasi dan rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Menurut lembaga yang mengajukan, verifikasi dan rekomendasi sangat mudah didapat dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Hal tersebut seperti pernyataan di bawah ini.

*“Kami di Salatiga sangat mudah mendapatkan rekomendasi untuk mengajukan bantuan apalagi kalau itu memang dibutuhkan oleh lembaga,” (Nevi Wiandini, Pendidik LKP Arvian Salatiga).*

Pengiriman proposal dilakukan menggunakan jasa pos dan dilakukan tepat waktu sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

Tahapan perencanaan selanjutnya adalah proses penetapan penerima. Proses penetapan penerima diawali dengan verifikasi lapangan. Untuk verifikasi lapangan berdasarkan proposal yang diajukan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Informasi tersebut didapat dari buku tamu dan responden.

Untuk penandatanganan akad kerja sama bagi penerima bantuan sarana prasarana bagi pengembangan LKP dilakukan sekaligus dengan pembekalan teknis. Penandatanganan akad kerja sama dilakukan bersama-sama dengan semua penerima bantuan sarana prasarana bagi pengembangan LKP.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pada program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan ini terdiri dari indikator penyediaan dan penataan ruang untuk penempatan barang/peralatan bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan (kesiapan ruang untuk sarana prasarana kursus dan pelatihan, luas ruangan, daya tampung ruangan), barang/peralatan yang diterima (jenis barang, kuantitas barang, kualitas barang, kesesuaian), pemanfaatan barang/peralatan bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan (jadwal, jumlah peserta didik, pemanfaatan

lainnya, pengadaan bahan pendukung), perawatan barang/peralatan bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan (pelaksana, jadwal dan biaya).

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyediaan dan penataan ruang untuk penempatan barang/peralatan revitalisasi. Untuk kesiapan ruang untuk sarana revitalisasi, semua lembaga yang mendapatkan program revitalisasi sarana bagi pengembangan LKP telah menyiapkan ruangan yang layak bagi penempatan sarana yang akan diperolehnya. Kondisi tersebut sesuai dengan pernyataan dari pendidik pada LKP Pincom Rembang di bawah ini. *"Lembaga sudah menyiapkan ruang untuk penempatan alat," (Tata Ragraita, Pendidik LKP Pincom Rembang).*

Rata-rata LKP menyediakan ruangan yang memiliki daya tampung yang sesuai dengan jumlah sarana, pendidik dan peserta didik. Sehingga ruangan memadai sehingga nyaman untuk proses pembelajaran. Kondisi tersebut didukung oleh pernyataan pendidik dari LKP Pincom Kabupaten Rembang.

*"Ruangan memadai tidak sempit sehingga sesuai, tenang dan nyaman," (Tata Ragraita, Pendidik LKP Pincom Rembang).*

Namun ada LKP yang belum menyediakan ruangan layak untuk proses pembelajaran dan tempat sarana prasarana. Informasi tersebut diperoleh dari pendidik LKP Bina Insani Kabupaten Magelang.

*"Luas kelas dan lab bahasa kurang memadai untuk banyak orang karena sempit dan tidak nyaman," (Rio Kusuma Nanda, Pendidik LKP Bina Insani Kabupaten Magelang).*

Selanjutnya adalah penerimaan barang/peralatan. Untuk semua LKP yang mendapatkan bantuan, spesifikasi dan kuantitas barang yang diterima sama dengan spesifikasi dan kuantitas barang yang ada di akad kerja sama. Namun ada satu LKP yang melakukan pengadaan sendiri yang memperoleh jumlah dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan akad kerja sama. Hal tersebut dikarena jenis barang dari merk dan serinya sudah tidak dijual di toko, sedangkan jumlahnya tidak sesuai karena harganya sudah berbeda. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari pimpinan lembaga LPP Vidya Persada Grobogan.

*"Barang yang datang tidak sesuai dengan akad kerja sama karena sudah tidak tersedia di toko dan jumlahnya pun berkurang karena ada kenaikan harga," (Melias Seloaji, Pimpinan LPP Vidya Persada Grobogan).*

Sedangkan kualitas barang dalam kondisi baik semua. Ada satu LKP yang mendapatkan bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan tahun 2015 yang langsung didrop dari Jakarta ada kerusakan barang ketika diterima (dinamo rusak) yaitu di LKP Kartika Gama Kabupaten Purbalingga. Sesuai dengan pernyataan pimpinannya Bapak Harsono.

*"Bantuan langsung didrop dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada saat diterima ada satu dinamo mesin jahit yang rusak sehingga harus diservis," (Harsono, Pimpinan LKP Kartika Gama Purbalingga).*

Semua barang yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan LKP masing-masing sesuai dengan jenis program yang dimiliki LKP. Beberapa LKP menambah sendiri sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melengkapi bantuan sarana yang telah diterima, misalnya pembelian komputer, printer, proyektor, dan almari untuk menyimpan sarana yang telah diterima. Hal tersebut sesuai pernyataan di bawah ini.

*"Ada yaitu lemari kaca aluminium untuk menempatkan alat kesehatan tersebut, " (Ahmadi, Pimpinan LPP Unistama Salatiga).*

Setelah barang diterima maka dilihat bagaimana pemanfaatannya. Sarana yang telah diterima sebgaiian besar dimanfaatkan secara maksimal karena memang sangat dibutuhkan untuk kegiatan praktek. Ada lembaga yang menggunakan selama 8 jam dan ada lembaga yang menggunakan hanya 2 jam sesuai dengan masing-masing jadwal praktek lembaga. Seperti pernyataan-pernyataan di bawah ini.

*“Sarana bantuan dalam 1 hari dimanfaatkan semua kecuali hari libur,” (Ahmadi, Pimpinan LPP Unistama Salatiga).*

Banyak LKP yang memanfaatkan sarana prasarana bantuan tidak hanya untuk pembelajaran saja tetapi dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya antara lain uji kompetensi, kegiatan sosial (karang taruna, remaja masjid dan pengobatan gratis), kegiatan ekonomi (menerima jasa pemotretan dan cetak foto, pembuatan undangan, menerima jahitan), pameran, magang. Pemanfaatan tambahan tersebut dapat diketahui dari hasil observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian.

Personil pelaksana yang memanfaatkan sarana prasarana dalam penelitian ini terdiri dari indikator ketercukupan sarana prasarana, kemudahan menggunakan, kondisi sarana prasarana setelah dimanfaatkan, petugas perawatan sarana prasarana, kemampuan pendidik menggunakan sarana prasarana, mekanisme pemanfaatan sarana prasarana, pengguna sarana prasarana dilatih dahulu sebelum memanfaatkannya. Berdasarkan hasil rata-rata jawaban responden terhadap personil pelaksana yang memanfaatkan sarana prasarana adalah 32,29. Kriteria/kategori yang dibuat peneliti untuk menentukan personil pelaksana yang memanfaatkan sarana prasarana adalah sebagai berikut.

<i>Kurang</i>	: 11 – 18,25
<i>Cukup</i>	: 18,26 – 26
<i>Baik</i>	: 26,01 – 33,26
<i>Sangat baik</i>	: 33,27 – 44

Sehingga nilai rata-rata pendapat responden terhadap sebesar 32,29 tersebut termasuk ke dalam kriteria/kategori baik. Hal tersebut didukung pernyataan dari salah satu responden di bawah ini.

*“Sangat efektif dengan sarana prasarana tersebut pihak lembaga tidak melakukan peminjaman atau sewa di tempat lain,” (Ahmadi, Pimpinan LPP Unistama Salatiga).*

Untuk perawatan barang/peralatan bantuan setiap LKP mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dan sesuai dengan jenis barang/peralatan yang diperoleh. Untuk petugas yang melakukan perawatan setiap LKP juga berbeda-beda antara lain tenaga kependidikan, pendidik, teknisi, peserta didik, bahkan ada LKP yang semua pihak yang memanfaatkan sarana dan peralatan harus melakukan perawatan. Jadwal perawatan dilakukan sesuai dengan jenis sarana dan peralatan, setelah dipakai dirawat, satu bulan sekali, bahkan ada yang tidak terjadwal karena perawatan dilakukan apabila ada kerusakan.

Untuk biaya perawatan dari LKP dari biaya kursus yang diperoleh LKP. Biaya tergantung jenis perawatan dan kerusakan yang dialami LKP. Biaya berkisar antara Rp. 50.000,00 – Rp. 500.000,00. Kondisi tersebut sesuai dengan pernyataan di bawah ini.

*“Rp. 300.000,00 dari penyisihan biaya pendidikan yang dibayarkan oleh peserta didik,” (Eko Fajar Supriyanto, S.Kom, Pimpinan LKP Dipcom Kabupaten Kudus).*

*“Biaya tergantung sesuai sarana perawatan yang digunakan dalam jangka waktu 1 bulan, biaya didapat dari bulanan siswa,” (Ahmadi, Pimpinan LPP Unistama Salatiga).*

### 3. Pendampingan Teknis dan Pemantauan

Pendampingan teknis dan pemantauan terdiri dari indikator pendampingan teknis (pelaksana, waktu dan strategi), pengawasan dan pengendalian (pelaksana, waktu dan strategi). Pendampingan teknis, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pihak terkait antara lain pimpinan lembaga dan petugas dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Pendampingan dan pemantauan dilakukan pihak Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan rata-rata 3 bulan setelah barang tiba di LKP.

### 4. Tingkat Kebermanfaatan Dan Faktor-Faktor Pendukung Serta Penghambat Pemanfaatan Sarana Prasarana

Prasarana adalah segala macam peralatan, kelengkapan dan benda-benda yang digunakan pendidik dan peserta didik untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perihal standar minimal prasarana pendidikan mencakup kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap lembaga penyelenggara pendidikan.

Sarana adalah segala macam peralatan yang digunakan pendidik untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perihal standar minimal sarana pendidikan mencakup kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta kelengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap lembaga penyelenggara pendidikan.

Variabel tingkat kebermanfaatan dan faktor-faktor pendukung serta penghambat pemanfaatan sarana dan prasarana program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan terdiri dari indikator efektifitas bahan/alat bantuan dan faktor pendukung dan penghambat. Efektifitas bahan/alat bantuan dilihat dari intensitas penggunaan dan keberfungsian. Intensitas penggunaan tergantung masing-masing lembaga, antara lain enam kali seminggu, lima kali seminggu, satu kali seminggu.

Pendukung dan penghambat pemanfaatan sarana prasarana dalam penelitian ini terdiri dari indikator faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan hasil rata-rata jawaban responden terhadap pendukung dan penghambat pemanfaatan sarana prasarana adalah 25,36. Kriteria/kategori yang dibuat peneliti untuk pendukung dan penghambat pemanfaatan sarana prasarana adalah sebagai berikut.

Kurang	: 8 – 13
Cukup	: 14 – 19
Baik	: 20 – 25
Sangat baik	: 26 – 32

Sehingga nilai rata-rata pendapat responden terhadap sebesar 25,36 tersebut termasuk ke dalam kriteria/kategori baik. Setiap program pasti ada penghambat dan pendukung karena kedua faktor tersebut bagai satu keping mata uang yang akan selalu ada. Demikian juga dengan pemanfaatan sarana program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan mempunyai faktor pendukung dan penghambat.

Faktor penghambatnya antara lain kurang perawatan, pengawasan pemakaian, perbaikan setelah aus. Selain faktor penghambat sudah barang tentu ada faktor pendukung

antara lain pelaksanaan kursus yang terus menerus dan aktif, kerja sama dengan pihak lain, kreativitas instruktur dalam penggunaan sarana. Kedua faktor tersebut hendaknya dapat menjadikan sumber kekuatan penyelenggaraan program sehingga strategi yang dikembangkan disesuaikan dengan kedua faktor yang dimiliki.

**5. Dampak Program Bantuan Sarana Prasarana Kursus Dan Pelatihan**

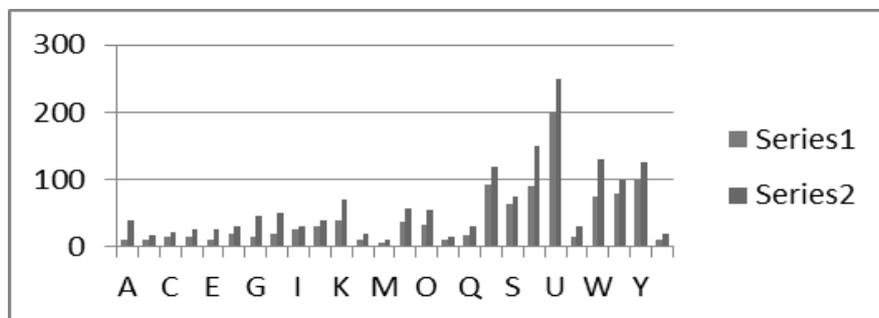
Dampak program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan dilihat dari peningkatan jumlah peserta yang dilayani sebelum dan setelah mendapat bantuan sarana, peningkatan jaringan kerja sama sebelum dan setelah mendapat bantuan sarana, peningkatan kenyamanan peserta didik.

Dampak program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan terdiri dari indikator perkembangan sarana prasarana, dampak keberadaan sarana prasarana. Berdasarkan hasil rata-rata jawaban responden terhadap dampak pemanfaatan sarana prasarana adalah 31,14. Kriteria/kategori yang dibuat peneliti untuk dampak pemanfaatan sarana prasarana adalah sebagai berikut.

- Kurang : 9 – 15,75
- Cukup : 15,76 – 22
- Baik : 22 – 28,75
- Sangat baik : 28,76 – 36

Sehingga nilai rata-rata pendapat responden terhadap sebesar 31,14 tersebut termasuk ke dalam kriteria/kategori sangat baik.

Peningkatan jumlah peserta yang dilayani dapat dilihat diagram di bawah ini. Huruf A – Z merupakan kode nama LKP. Rata-rata terjadi peningkatan jumlah peserta didik yang layani karena ada peningkatan jumlah sarana yang dimiliki.



**Gambar 4. Diagram Peningkatan Jumlah Peserta Didik Sebelum dan Setelah Mendapatkan Program Bantuan Sarana Prasarana Kursus dan Pelatihan**

Keterangan.

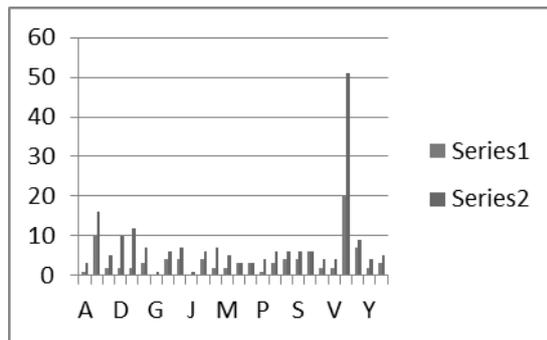
Sumbu X: LKP

Sumbu Y: Jumlah Peserta Didik

Series 1: Jumlah peserta didik sebelum mendapatkan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan

Series 2: Jumlah peserta didik setelah mendapatkan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan

Peningkatan kerja sama terdapat pada diagram di bawah ini. Semua LKP mempunyai tambahan mitra kerja sama. Kerja sama yang dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain penempatan kerja, pemagangan, pelatihan, praktek kerja industri, PKL, permintaan tenaga kerja.



**Gambar 5. Diagram Peningkatan Jumlah Kerja Sama Sebelum dan Setelah Mendapatkan Program Bantuan Sarana Prasarana Kursus dan Pelatihan**

Keterangan.

Sumbu X: LKP

Sumbu Y: Jumlah Kerja Sama

Series 1: Jumlah kerja sama sebelum mendapatkan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan

Series 2: Jumlah kerja sama setelah mendapatkan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan

#### D. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan mulai dari perencanaan sampai dengan pendampingan teknis dan pemantauan berjalan dengan baik. Apabila ada hambatan dapat diselesaikan dengan segera.
- b. Faktor penghambat antara lain kurang perawatan, pengawasan pemakaian, perbaikan setelah aus. Faktor pendukung antara lain pelaksanaan kursus yang terus menerus dan aktif, kerja sama dengan pihak lain, kreativitas instruktur dalam penggunaan sarana.
- c. Tingkat kebermanfaatan dilihat dari intensitas penggunaan sarana adalah enam kali seminggu, lima kali seminggu, satu kali seminggu. Intensitas tersebut tergantung jadwal pembelajaran masing-masing LKP (sesuai dengan jumlah peserta didik dan sarana prasarana serta kesepakatan dengan peserta didik). Untuk keberfungsian sarana sudah sangat tepat karena sarana yang ada membantu kesuksesan proses pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan lembaga.
- d. Dampak program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan sudah dapat dilihat dengan terjadi peningkatan jumlah peserta didik yang dilayani dengan adanya penambahan sarana dari program bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan. Demikian juga dengan jumlah kerja sama semakin meningkat.

##### 2. Rekomendasi

- a. Bagi Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat
  - 1) Perlu peningkatan jumlah sasaran penerima bantuan sarana prasarana kursus dan pelatihan terutama untuk LKP yang mempunyai peserta didik banyak tetapi kekurangan sarana pembelajaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

- 2) Perlu pemberian bantuan sarana prasarana bagi LKP yang mempunyai diversifikasi program kursus dalam rangka peningkatan kapasitas sarana prasarana yang dimiliki.
  - 3) Pemberian bantuan sarana prasarana hendaknya juga didampingi dengan pembiayaan untuk perawatan sarana prasarana.
  - 4) Hal-hal yang perlu direview di Petunjuk Teknis Program Bantuan Sarana Prasarana bagi LKP: Persyaratan seleksi diprioritaskan LKP yang terdaftar di DAPODIK PAUD dan Dikmas dan terakreditasi dalam rangka penjaminan mutu, besarnya bantuan diberikan kepada LKP yang mempunyai jumlah peserta didik yang banyak, persyaratan penentuan besarnya anggaran bantuan sarana prasarana yang akan didapat LKP dijelaskan secara jelas di petunjuk teknis.
- b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- Pendampingan bagi LKP dalam bentuk supervisi dan bantuan pendukung sarana yang belum ada dalam bentuk bantuan yang berasal dari APBD masing-masing.
- c. Bagi LKP
- 1) Pengadaan program bantuan sarana prasarana disesuaikan dengan sarana prasarana yang digunakan oleh pengguna lulusan.
  - 2) Penyediaan anggaran untuk biaya perawatan dan perbaikan sarana agar sarana yang diperoleh dapat digunakan secara maksimal dan dalam jangka waktu yang lama.
  - 3) Pemanfaatan secara maksimal bantuan sarana prasarana yang diperoleh tidak hanya untuk proses pembelajaran tapi juga untuk kegiatan ekonomi dan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1984. *Qualitativ Data Analisis*. Berverly Hill: Sage Publication Inc
- Mulyasa. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyasa. 2006. *Kurikulum yang Disempurnakan*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

## EFEKTIFITAS PEMANFAATAN DANA BANSOS PENDIDIKAN KECAKAPAN WIRAUUSAHA (PKW) DI PROVINSI JAWA TENGAH 2017

**Heru Priambodo, M.Kom., Ana Kristiani, M.Pd Agus Wijatmoko, M.Pd.,  
Tatiek Dyah Wardani, M.Kes**  
Pamong Belajar PP PAUD dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah

### **Abstrak**

*Dana bansos sudah disalurkan kepada masyarakat selama beberapa tahun untuk membantu mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Pemanfaatan dana bansos perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan program dan menyusun rekomendasi kebijakan di masa yang akan datang.*

*Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas pemanfaatan dana bansos PKW yang disalurkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penyaluran dana PKW dilihat dari komponen proses dan dampak kegiatan secara keseluruhan.*

*Sumber data penelitian ini terdiri dari satuan pendidikan LKP dan PKBM yang menerima dana bansos PKW tahun 2017 di provinsi Jawa Tengah. Responden pengkajian ini adalah pengelola dan alumni program PKW baik yang sudah dan yang belum merintis usaha. Populasi penelitian ini adalah 148 satuan pendidikan. Karena populasi tersebut terlalu besar, pengkaji mengambil sampel dengan menggunakan teknik purposive random sampling.*

*Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengumpulkan informasi melalui kuisisioner, wawancara, dokumentasi dan observasi satuan pendidikan penerima dana bansos PKW. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan rancangan gabungan. Data kuantitatif yang diperoleh nantinya diolah secara statistik untuk menjustifikasi efektivitas sebuah program. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh beberapa informasi tambahan terkait komponen yang akan diteliti secara lebih mendalam sebagai bahan masukan kepada direktorat terkait.*

*Hasil pengkajian ini adalah Kebermanfaatan program PKW sangat efektif dimana 90 % mampu menyelesaikan pelatihan. Program PKW dapat memberikan bekal pengetahuan kewirausahaan, ketrampilan untuk membuka usaha dan menanamkan mindset dan sikap berwirausaha. Dampak PKW terhadap masyarakat cukup efektif dimana 75 % peserta didik dapat merintis usaha, namun berprestasi lebih dari UMR setelah setahun merintis usaha kurang efektif.*

*Merujuk hasil penelitian di atas, dapat disarankan sebagai berikut : 1) diperlukan perbaikan juknis PKW terutama terkait proses perekrutan, metode pembelajaran kewirausahaan, anggaran dan waktu pelatihan 3) diperlukan pengembangan model pembelajaran kewirausahaan yang implementatif 4) Peningkatan kompetensi pengelola satuan pendidikan penerima dana bansos; 5) Perbaikan model rekrutmen peserta didik 6) Peningkatan efektivitas evaluasi dan monitoring oleh dinas dan direktorat terkait dan arah ketrampilan yang diselenggarakan untuk program PKW sebaiknya mengarah pada industri kreatif 4.0.*

**Kata kunci :** Efektifitas, Pendidikan Kecakapan Wirausaha

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah penting yang harus ditangani dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Meskipun, dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan.

Data yang diperoleh dari sakernas, BPS RI Tahun 2017 secara nasional jumlah pengangur masih berjumlah 7 juta jiwa. Jumlah tersebut sejumlah 2,62 % berasal dari lulusan SD, 5,54% lulusan SMP, 8,29 % lulusan SMA, 11,41 lulusan SMK, 6,88 lulusan Diploma dan 5,18 % lulusan SMK.

Sementara itu jumlah penduduk miskin periode September 2016–Maret 2017 mencapai 27,77 juta. Jumlah tersebut penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017). Sementara, di daerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang (dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017).

Keadaan tersebut akan memberikan beban tersendiri bagi pemerintah. Tingginya angka putus sekolah (drop out) atau lulus tidak melanjutkan dapat berdampak pada bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, yang selanjutnya akan dapat memicu munculnya permasalahan sosial seperti kejahatan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, per-dagangan orang (trafficking), dan maraknya demo yang anarkis, di masyarakat. Dampak lain dari kemiskinan dan banyaknya pengangguran adalah lemahnya daya saing bangsa dalam perekonomian dunia.

Dalam rangka mengatasi permasalahan di atas dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana bantuan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) bagi masyarakat.

Jumlah dana yang disalurkan tidak sedikit. Tahun 2016 dana PKW disalurkan kepada 1098 satuan pendidikan dengan rata-rata satu lembaga memperoleh dana sekitar 20 orang peserta didik @Rp. 2.700.000,-. Sedangkan pada tahun 2017 dana PKW disalurkan kepada 538 satuan pendidikan dengan rata-rata satuan pendidikan memperoleh data sekitar 25 peserta didik @Rp. 2.700.000,-. Dana PKW yang akan disalurkan tahun 2018 kepada masyarakat yang membutuhkan adalah 47.000 orang tahun 2018 dengan jumlah dana per orangnya berjumlah rata-rata 2,7 juta rupiah.

Pemanfaatan dana bansos tersebut di atas perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan program yang sudah diselenggarakan dan menyusun rekomendasi terkait kebijakan program yang akan diselenggarakan di masa yang akan datang. Hal ini sangat penting agar dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat secara optimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan menghindari penyalahgunaan anggaran dalam rangka menciptakan *good government*.

Sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Direktorat pembinaan kursus dan pelatihan, tujuan penyelenggaraan Program (PKW) adalah (1) Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan pola pikir berwirausaha melalui kursus dan pelatihan kepada peserta didik; (2) Memotivasi dan menciptakan rintisan usaha baru serta pendampingan untuk dapat berkembang dan mampu bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri serta instansi terkait.

Sedangkan Indikator keberhasilan Program PKW berdasarkan juknis penyelenggaraan program PKW adalah (1) minimal 90% dari jumlah peserta didik dapat menyelesaikan Program PKW dengan tuntas; (2) minimal 75% dari peserta didik yang lulus program PKW dapat merintis usaha; dan (3) minimal 30% dari peserta didik yang merintis usaha memiliki penghasilan minimal sebesar upah minimum provinsi/ kabupaten/ kota setempat yang dicapai dalam waktu 6 (enam) bulan.

Efektifitas penyelenggaraan program dievaluasi berdasarkan tujuan dan indikator keberhasilan. Ketercapaian tujuan dan indikator keberhasilan program PKW menjadi indikator apakah program tersebut efektif untuk dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan ataukah justru dihentikan.

### Perumusan Masalah

Rumusan masalah pengkajian efektifitas ini adalah :

1. Bagaimanakah efektifitas proses pelaksanaan program PKW yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan penerima dana ?
2. Bagaimanakah dampak program PKW terhadap keberhasilan peserta didik dalam merintis usaha ?

### Tujuan

Tujuan dari pengkajian adalah

1. Mendeskripsikan tingkat efektifitas pemanfaatan dana bansos PKW yang disalurkan kepada LKP dan PKBM oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017.
2. Mendeskripsikan dampak program PKW kepada peserta didik dalam merintis usaha.

### Manfaat

1. Bagi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan  
Direktorat kursus dan pelatihan dapat memperoleh gambaran efektifitas pelaksanaan program PKW yang sudah dilaksanakan sehingga dapat menyusun perencanaan program kegiatan di masa yang akan datang.
2. Bagi PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah  
PP PAUD dan Dikmas memperoleh informasi dan data terkait pelaksanaan program PKW sehingga dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga serta penyusunan rekomendasi kebijakan kepada direktorat terkait.
3. Bagi LKP  
LKP memperoleh informasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dana bansos yang sudah diselenggarakan di LKP sehingga bisa menjadi evaluasi perbaikan pembelajaran secara mandiri di masa yang akan datang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Efektivitas

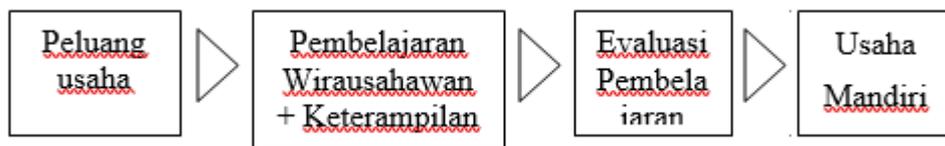
Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagaan, 2001: 24). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

### Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)

Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah program layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap berwirausaha sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pendidikan kewirausahaan masyarakat menerapkan pendekatan 4 in 1, sebagai berikut.

Gambar1  
Diagram Alur 4 In One



**Kelompok Usaha**

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Pertiwi, Suatu kelompok usaha dianggap ada dengan syarat (Depsos RI, 2005).

1. Terdiri dari 5-10 anggota kelompok.
2. Ikatan pemersatu. Yang dimaksudkan dengan ikatan pemersatu disini ialah kedekatan tempat tinggal para anggota, serta latar belakang kehidupan budaya anggota, para anggota memiliki motivasi yang sama, dan keberadaan anggota kelompok tersebut telah tumbuh berkembang lama.
3. Terdapat struktur dan kepengurusan kelompok usaha yang telah ditetapkan. Struktur yang terdapat dalam kelompok usaha terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

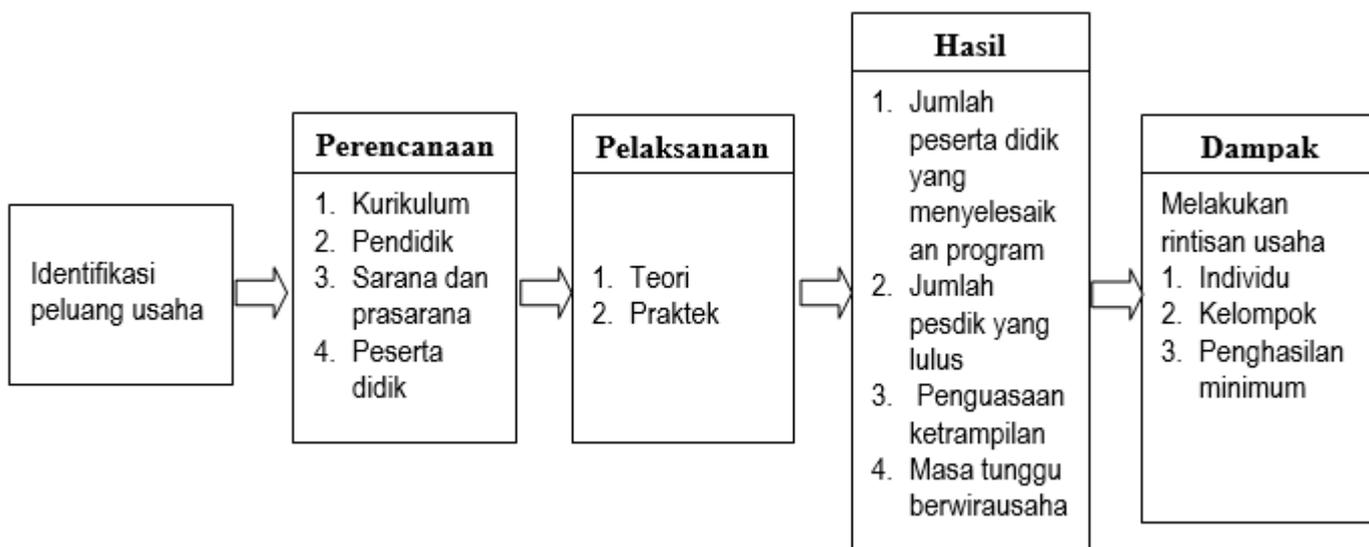
**Pendampingan**

Pendampingan dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terus menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat hingga terjadinya proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan terdidik.

**Kerangka Pengkajian**

Dari berbagai permasalahan dan kerangka teori yang telah dibangun dapat dirumuskan kerangka pengkajian efektifitas pemanfaatan dana bansos PKW sebagai berikut ini.

Gambar2  
Diagram Kerangka Pengkajian



### 3. METODE PENELITIAN

#### Desain Penelitian

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian *evaluatif* dengan pendekatan mix, yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif yang diperoleh nantinya diolah secara statistik untuk menjustifikasi efektivitas sebuah program. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh beberapa informasi tambahan terkait komponen yang akan diteliti secara lebih mendalam sebagai bahan masukan kepada direktorat terkait.

#### Populasi dan Sampel Penelitian

##### 1. Populasi

Jumlah populasi penelitian ini adalah 148 satuan pendidikan yang menerima dana PKW dari Direktorat pembinaan kursus dan pelatihan tahun 2017.

##### 2. Sampel

Sampel 25 satuan pendidikan, teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* yaitu satuan pendidikan penerima dana bansos dikelompokkan sesuai dengan kabupaten dan kota. Pengambilan jumlah sampel masing-masing kelompok satuan pendidikan dilakukan secara proporsional. Kemudian untuk mengambil sampel masing-masing kualifikasi satuan pendidikan dilakukan berdasarkan sasaran kabupaten/kota dan jenis program.

#### Variabel Penelitian dan Pengukurannya

##### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini meliputi proses kegiatan perencanaan kegiatan, pelaksanaan, hasil dan pendampingan beserta dampak kegiatan bagi peserta didik dalam merintis usaha

##### 2. Skala Pengukuran

Skala pengukuran menggunakan skala likert 5 gradasi Sangat setuju (Skor 5), Setuju (Skor 4), Ragu-ragu (Skor 3), Tidak setuju (Skor 2) Sangat tidak setuju (Skor 1)

#### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner tertutup dan terbuka terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hasil, pendampingan dan dampak program.

#### Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Untuk menilai masing-masing komponen, maka analisis yang digunakan yaitu berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing kriteria.

**TABEL 1**  
**KRITERIA PENILAIAN PROSES KEGIATAN**

No	Interval	Interpretasi
1	273 – 325	Sangat efektif
2	221 – 272	efektif
3	169 – 220	Cukup Efektif
4	117 – 168	tidak efektif
5	65 – 116	Sangat tidak efektif

**TABEL 2**  
**KRITERIA PENILAIAN DAMPAK PROGRAM**

No	Interval	Interpretasi
1	Di atas 85 %	Sangat Efektif
2	75 % - 84	Efektif
3	65 % - 74 %	Cukup Efektif
4	55 % - 64 %	Kurang efektif
5	Di bawah 24 %	Tidak Efektif

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

1. Proses Pelaksanaan Program

Deskripsi statistik efektifitas pemanfaatan dana bansos PKW tahun 2017 di propinsi jawa tengah adalah sebagai berikut :

**TABEL 3**  
**Statistic**

	Hasil Evaluasi PKW	Pemanfaatan dana PKW
N Valid	30	30
Missing	0	0
Mean	276,9667	1,50
Median	292,5000	1,00
Mode	266,00a	1
Std. Deviation	37,75920	,682
Variance	1425,757	,466
Range	134,00	2
Minimum	186,00	1
Maximum	320,00	3
Sum	8309,00	45

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Berdasarkan tabel di atas nilai terendah yang diperoleh melalui kuisisioner adalah 186 dan nilai tertinggi adalah 320 sedangkan mean yang diperoleh adalah 276,96. Distribusi frekuensi skor penilaian terhadap pemanfaatan dana bansos PKW dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

**TABEL 4**  
**PEMANFAATAN DANA PKW**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 273-325	18	60,0	60,0	60,0
221-272	9	30,0	30,0	90,0
169-220	3	10,0	10,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Dari 30 lembaga penerima dana bansos PKW tahun 2017 diperoleh informasi bahwa pemanfaatan dana bansos sangat efektif (rata-rata 276,96 antara range 274 – 325). Secara rinci, variasi kriteria penilaian peserta yang disajikan dalam tabel di atas dimana terlihat tidak ada peserta (0%) yang menyatakan tidak efektif, tidak ada peserta yang menyatakan kurang efektif (0%), 3 peserta menyatakan cukup efektif (10%), 9 peserta (30%) menyatakan efektif dan sisanya 18 menyatakan **sangat efektif**.

## 2. Dampak Program

### a. Kemampuan merintis usaha

Indikator keberhasilan program adalah 75 % peserta didik dapat merintis usaha cukup efektif. Prosentase alumni yang mampu merintis usaha sebesar 68 %.

### b. Penghasilan Peserta didik

Indikator dalam juknis PKW adalah 30 % Peserta didik dapat merintis usaha dan berpenghasilan minimal UMR kabupaten/kota setempat.

Hasil dari kuesioner terbuka yang digunakan sebagai panduan wawancara diperoleh hasil sebagai berikut :

**TABEL 5  
STATISTICS**

	Penghasilan	Penghasilan
N Valid	35	35
Missing	0	0
Mean	898571,4286	2,0857
Median	850000,0000	2,0000
Mode	1000000,00	2,00
Std. Deviation	575285,82593	,98134
Variance	330953781512,60	,963
Range	2000000,00	3,00
Minimum	,00	1,00
Maximum	2000000,00	4,00
Sum	31450000,00	73,00

Hasil yang diperoleh dari 35 alumni program PKW diperoleh bahwa rata-rata penghasilan per orang adalah Rp. 898.571,43,- . Sedangkan rata-rata UMR di Jawa Tengah tahun 2017 adalah RP 1.456.057,- Penghasilan rata-rata peserta didik masih **62 %** dari UMR Jawa Tengah. Dengan demikian dampak penghasilan program dalam kategori kurang efektif. Sehingga perlu perbaikan perbaikan di masa yang akan datang.

**TABEL 6  
PENGHASILAN**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
di bawah 500000	11	31,4	31,4	31,4
500000-1000000	14	40,0	40,0	71,4
Valid 1000000-1500000	6	17,1	17,1	88,6
di atas 1500000	4	11,4	11,4	100,0
Total	35	100,0	100,0	

## Pembahasan

Tujuan program PKW adalah 1) memberikan bekal pengetahuan kewirausahaan kepada peserta didik; 2) Memberikan bekal keterampilan di bidang produksi barang/jasa kepada peserta didik 3) Menanamkan pola pikir (mindset) dan sikap berwirausaha kepada peserta didik. Ketiga tujuan pendidikan wirausaha sudah tercapai. Namun demikian dalam proses merintis usaha peserta didik di kehidupan nyata peserta didik masih menemui banyak kendala.

Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan program PKW di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sudah Sangat Efektif. Secara lebih terperinci kegiatan perencanaan dalam kategori sangat efektif, kegiatan pelaksanaan termasuk dalam kategori sangat efektif, hasil yang diperoleh termasuk dalam kategori efektif dan pendampingan dalam kategori efektif. Namun demikian evaluasi dampak masih kurang efektif. Kemampuan merintis usaha peserta didik masih di bawah indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh direktorat pembinaan kursus dan pelatihan yaitu sebesar 75% dan penghasilan rata-rata 30 % peserta didik setelah satu tahun menjalankan rintisan usaha minimal setara dengan UMR daerah.

Sebagaimana terdapat dalam juknis PKW tahun 2017, Pendidikan Kecakapan Wirausaha diselenggarakan menggunakan pendekatan "4 in 1".

1. Identifikasi Peluang Usaha
  - a. Mengidentifikasi peluang usaha baik pada skala lokal, nasional, dan internasional.
  - b. Mengidentifikasi potensi sumberdaya lokal (produk barang atau jasa) yang dapat dikembangkan menjadi usaha baru sesuai peluang pasar pada skala lokal, nasional, atau internasional.

2. Pembelajaran kewirausahaan berbasis pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan berwirausaha.

Pembelajaran program PKW memerlukan kurikulum dan bahan ajar yang mencakup: a) perubahan pola pikir; b) membangun karakter pengusaha; c) memulai usaha; d) merencanakan usaha; e) memasarkan dan mengembangkan usaha; dan f) kompetensi keterampilan yang sesuai dengan identifikasi peluang usaha.

3. Evaluasi Hasil Pembelajaran

Untuk mengukur pencapaian hasil belajar bahwa peserta didik telah menguasai keterampilan dan memiliki kemampuan berwirausaha, maka setiap lembaga harus melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran kepada setiap peserta didik.

4. Pendampingan dan Perintisan Usaha

Peserta didik yang sudah mengikuti evaluasi pembelajaran program PKW wajib diberikan bimbingan untuk merintis usaha sesuai dengan keterampilan yang dikuasai.

Pendampingan yang dilakukan lembaga adalah memfasilitasi dalam mengakses dana kepada lembaga keuangan, menjalin kemitraan dengan mitra usaha, pemasaran hasil produksi, pemagangan usaha dan lain sebagainya.

Dalam alur pendidikan kewirausahaan dimulai dari identifikasi peluang usaha. Rangkaian proses tersebut saling berkaitan dan berpengaruh pada proses selanjutnya. Namun demikian pengkajian ini tidak difokuskan untuk meneliti seberapa besar pengaruh antar komponen program. Dilihat dari pendekatan four in one yang diadopsi oleh direktorat kursus dan pelatihan, tahap-tahap tersebut dapat saling mempengaruhi. Keberhasilan menentukan peluang usaha menjadi awal rangkaian kegiatan atau alur selanjutnya. Identifikasi peluang usaha menjadi sangat penting dalam menentukan jenis ketrampilan yang akan diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Hasil pengisian instrumen memang sudah sangat efektif namun demikian dari pengkajian hasil wawancara, observasi dan dokumen diperoleh data bahwa identifikasi peluang usaha yang dilakukan oleh satuan pendidikan baik itu LKP, PKBM dan SKB belum tepat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pengelola satuan pendidikan dalam mengidentifikasi peluang usaha di dalam suatu daerah masih rendah. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi pada proses pendidikan kewirausahaan selanjutnya. 93 % lembaga menyelenggarakan ketrampilan berdasarkan program PKW berdasarkan jenis kursus reguler yang diselenggarakan dan bukan berdasarkan peluang usaha yang ada dalam satu daerah. Alasan memilih ketrampilan sesuai dengan program reguler karena akan lebih mudah dalam proses pengadaan alat dan instruktur program PKW.

Pada proses rekrutmen peserta didik, satuan pendidikan juga tidak melakukan seleksi peserta didik. Seleksi hanya sebatas ketentuan dari juknis yaitu menganggur, miskin, putus sekolah dan usia. Motivasi untuk berwirausaha kurang menjadi fokus lembaga dalam melakukan rekrutmen.

Dari sisi pelaksanaan kegiatan dari 30 (100%) responden sudah terakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF sehingga relatif dalam pembelajaran ketrampilan tidak ada masalah. Ketrampilan sudah dapat dikuasai oleh peserta PKW dengan baik. Permasalahan muncul dalam bidang pembelajaran kewirausahaan. Permasalahan yang muncul adalah 1) Pembelajaran masih sebatas teori saja belum dilaksanakan dalam praktek pembelajaran kewirausahaan. 2) Pembelajaran kewirausahaan belum mampu merubah mindset wirausaha siswa. Siswa masih mempunyai pemikiran untuk bekerja. 3) satuan pendidikan kesulitan dalam memberikan pemahaman tentang kewirausahaan kepada peserta program PKW. 4) Satuan pendidikan kesulitan dalam menentukan metode pembelajaran kewirausahaan karena latar belakang pendidikan yang tidak sama sehingga perlu pendekatan dan media yang berbeda-beda. 5) Satuan pendidikan kesulitan memberikan motivasi dengan untuk berwirausaha kepada peserta didik.

Proses pembelajaran kewirausahaan masih belum maksimal disebabkan kekurangtersediaan media pembelajaran kewirausahaan, praktek pembelajaran kewirausahaan yang hanya sebatas membuat action plan kurang dipahami oleh peserta didik dan kemampuan pengelola dalam mengelola pembelajaran kewirausahaan yang masih rendah. Dampaknya adalah penanaman mindset untuk berwirausaha kepada peserta didik tidak dapat berhasil dengan baik.

Pada hasil sudah cukup baik. Pembelajaran ketrampilan sudah bisa dikuasai oleh peserta didik. Namun pada pembelajaran kewirausahaan yang masih kurang.

Sedangkan pada proses pendampingan kelemahan yang muncul proses pendampingan antar lembaga yang tidak sama. Dalam juknis hanya menyebutkan pendampingan dilakukan selama 3 bulan. Apa dan bagaimana proses pendampingan yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan masih kurang jelas proses. Sementara itu proses pendampingan dari pemangku kepentingan seperti dinas, PP PAUD dan Dikmas serta direktorat sendiri dalam melalui monitoring dan evaluasi masih sangat lemah bahkan hampir tidak dilakukan karena tidak dianggarkan.

Pada hasil penelitian dampak program PKW masih kurang baik. Hal ini merupakan akumulasi dari kekurangan pada proses pelaksanaan dan hasil sebelumnya. Dampaknya terasa dari 35 responden hanya 68 % yang sanggup untuk merintis usaha dan penghasilan rata-rata peserta didik masih 58% dari UMR Jawa Tengah. Kendala yang dihadapi oleh alumni program PKW menyatakan adalah modal, pemasaran, motivasi berwirausaha dan peralatan, kurang terampil, kekompakan dalam kelompok usaha.

Sebagai data sekunder dari penelitian ini, peneliti membandingkannya dengan 5 hasil temuan Inspektorat Jenderal Kemendikbud yang disampaikan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan tanggal 7 s.d 9 Oktober 2018 di Hotel Permata Bogor.

1. Besaran bantuan setiap peserta didik Program PKK dan PKW Tahun 2018 terlalu rendah Rp1.7 juta/orang untuk Program PKK dan Rp2.76 juta/orang untuk Program PKW. Belum dilakukan evaluasi dan penyesuaian besaran bantuan setiap peserta didik Program PKK dan PKW untuk 5 thn terakhir. Sudah tidak relevan besaran bantuan peserta didik untuk jenis keterampilan saat ini.
2. Pencapaian program penguatan pendidikan kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha belum optimal.  
Belum ditemukan data atau evaluasi hasil penilaian terhadap keberhasilan peserta didik untuk dapat bekerja dan berusaha dengan keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk dapat bersaing dipasar global.
3. Pencapaian peningkatan hasil Uji Kompetensi belum mencapai target yang ditetapkan.  
Peserta didik yang telah berhasil dan lulus mengikuti uji kompetensi tidak mencapai target dibandingkan data peserta didik yang mengikuti pelatihan program PKK 3 (tiga) tahun terakhir. Persentase per-thn hanya mencapai 70%
4. Kelemahan penyaluran dana bapem belum sesuai dengan Petunjuk Teknis.  
Kelemahan tim penilai/seleksi proposal dan PPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Penerima dana bantuan belum melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan petunjuk Teknis.  
Fakta yang ditemukan: instruktur tidak memiliki sertifikat kompetensi, tidak memiliki sarpras yang memadai, tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, tidak memiliki *success story* dan menolak untuk dimonev.

Apa yang diperoleh peneliti tampaknya sudah sinkron dengan hasil pemaparan oleh inspektorat kementerian pendidikan dan kebudayaan, sehingga dalam hal ini peneliti bisa memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan program PKW di masa yang akan datang. Perbaikan terutama pada juknis PKW sendiri, peningkatan kompetensi pengelola satuan pendidikan, pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dan proses pendampingan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

1. Tingkat efektifitas pemanfaatan dana bansos PKW tahun 2017 di Provinsi Jawa Tengah adalah sangat efektif. Nilai yang diperoleh dari kuisioner adalah 276,96, berada antara interval 274 – 325 dengan kategori sangat efektif. Tingkat kelulusan peserta didik program PKW juga menunjukkan demikian. Data yang diperoleh menunjukkan satuan pendidikan penerima dana bansos dapat menyelesaikan pelatihan dengan 90 % peserta didik dapat lulus pelatihan. Tingkat capaian 90 % tercapai karena sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan pendidikan cukup tersedia, sudah memiliki tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi, jadwal pelatihan dan kurikulum bisa diimplementasikan dengan baik. Namun demikian semua satuan pendidikan menentukan kelulusan peserta didik hanya berdasarkan ujian lokal lembaga dan tidak berdasarkan uji kompetensi dari LSK.

2. Dampak program PKW dalam merintis usaha yaitu :
  1. 75 % peserta didik dapat merintis usaha kurang efektif tercapai. Persentase alumni yang mampu merintis usaha sebesar 68 %. Ketidaktercapaian indikator tersebut disebabkan oleh :
    - 1) Pembelajaran kewirausahaan belum mampu merubah mindset wirausaha peserta didik PKW. Hal ini disebabkan karena pengelola kesulitan untuk membentuk karakter kewirausahaan peserta didik PKW. Kesulitan pengelola merubah mindset disebabkan oleh 1) kurangnya kompetensi pengelola satuan pendidikan, 2) tidak adanya model pendidikan kewirausahaan untuk peserta didik yang dapat membentuk mental kewirausahaan peserta didik secara dalam tempo 3 bulan, 3) kewirausahaan diajarkan dalam bentuk teori tidak diajarkan dalam bentuk praktek pembelajaran dan 4) penentuan dan pemilihan instruktur kewirausahaan kurang tepat.
    - 2) Penentuan jenis ketrampilan tidak berdasarkan potensi lingkungan baik lokal, nasional dan internasional. Penyebabnya karena pengelola satuan pendidikan penerima dana bansos kurang mengetahui dan berkemampuan tentang cara mengidentifikasi potensi lingkungan. Penentuan jenis ketrampilan hanya berdasarkan jenis program reguler yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
    - 3) Teknik rekrutmen peserta didik yang kurang tepat, 90 persen secara pasif merekrut calon peserta hanya berdasarkan kriteria bansos yaitu miskin, menganggur dan usia produktif. Teknik yang digunakan dengan sosialisasi dengan RT, RW, kelurahan, kantor pos dan medsos. Sosialisasi dengan jemput bola ke kantong-kantong kemiskinan. Seleksi peserta didik juga tidak dilakukan yang berdasarkan passion dan talent berwirausaha.
    - 4) Evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu dinas pendidikan, PP dan BP PAUD dan Dikmas, Direktorat Kursus masih lemah karena kurangnya anggaran untuk monitoring dan evaluasi.
  2. 30 persen berpenghasilan lebih dari UMR setelah setahun menjalankan rintisan usaha termasuk dalam kategori kurang efektif. Rata-rata penghasilan peserta didik sebesar Rp. 898.000,- masih jauh dari UMR Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.456.057,- (62%). Hal ini disebabkan karena usaha yang dilakukan hanya digunakan sebagai usaha sampingan bukan mata pencaharian utama. Selama proses pendampingan juga muncul permasalahan-permasalahan antara lain 1) perubahan mental berwirausaha belum terbangun 2) peserta didik lebih memilih untuk bekerja daripada berwirausaha, 3) alumni PKW tidak mau mengambil resiko untuk terjun ke dalam dunia wirausaha dan 4) kurangnya permodalan disebabkan dana modal usaha tidak cukup untuk memulai usaha secara individu. Dana pelatihan sudah cukup untuk pembiayaan pelatihan tetapi belum cukup untuk modal berwirausaha.

### Saran

Berdasarkan simpulan hasil pengkajian dapat direkomendasikan bahwa program PKW yang diselenggarakan pada kurun waktu tahun 2017 sudah cukup efektif namun perlu perbaikan antara lain :

1. Bagi Direktorat Kursus dan Pelatihan
  - a. Penyempurnaan juknis

Penyempurnaan juknis PKW untuk menyempurnakan berbagai unsur yang masih menjadi kelemahan dalam penyelenggaraan program PKW meliputi unsur biaya, waktu pelaksanaan, rekrutmen peserta didik, monitoring dan evaluasi. Jika dimungkinkan setiap jenis ketrampilan memiliki jumlah standar biaya dan waktu yang berbeda dalam juknis, misalnya untuk menjahit Rp 2.750.000,-, desain grafis Rp 2.500.000,- dan seterusnya. Besaran biaya juga perlu distandarkan dengan tingkat inflasi yang terjadi setiap tahunnya.

b. Seleksi proposal yang lebih ketat

Seleksi penentuan lembaga yang akan memperoleh dana bantuan sosial PKW tidak hanya berdasarkan penilaian proposal namun perlu visitasi lembaga untuk menentukan lembaga yang benar-benar kredibel untuk menyelenggarakan dana bansos PKK.

c. Perbaiki model pembelajaran kewirausahaan

Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan rintisan usaha alumni PKW sebaiknya dikembangkan model pembelajaran kewirausahaan yang dapat merubah membangun mental kewirausahaan secara cepat dan tepat. Ada berbagai alternatif model pembelajaran kewirausahaan masyarakat yang dapat diadopsi misalnya *training exhibition, experimental learning dan mentoring*.

d. Perbaiki model rekrutmen peserta didik

Diperlukan model atau panduan rekrutmen peserta didik yang mampu menjaring masyarakat yang benar-benar siap untuk berwirausaha.

e. Perbaiki pendampingan

Pendampingan setelah usaha sangat penting dilakukan, narasumber teknik, waktu, dan biaya pendampingan perlu dipertegas dalam juknis program PKW.

f. Peningkatan kompetensi pengelola satuan pendidikan terutama dalam mengidentifikasi potensi lokal, nasional dan internasional baik dengan cara diklat, magang atau bentuk lainnya.

g. Evaluasi dan monitoring terutama saat proses pendidikan kewirausahaan dan pendampingan rintisan usaha.

h. Perlu diarahkan untuk memberi bansos terkait program yang mengarah pada industri kreatif 4.0.

2. Bagi PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah

PP PAUD dan Dikmas dapat berkontribusi terhadap program PKW melalui pengembangan model terutama pada model kewirausahaan kepada masyarakat yang implementatif, model rekrutmen peserta didik, model pendampingan, model peningkatan kompetensi pengelola satuan pendidikan dalam memetakan potensi lokal, nasional dan internasional dan model evaluasi dan monitoring program.

3. Bagi Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan baik LKP, SKB dan PKBM sebaiknya terus memperbaiki pelaksanaan program PKW di masa yang akan datang dan memberikan masukan secara aktif kepada dinas, PP PAUD Dikmas Jawa Tengah dan dan direktorat terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Dirbinsuslat, (2017). *Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha*. Kemendikbud, Jakarta
- Dwi Anggraini, Susan (2014) *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*.

- Hapmi.org/2013/01/11/peranan-**pendamping**-masyarakat/, 25 Januari 2016, pk 12.17  
<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>. 17 Mei 2018
- Oemar Hamalik, Perencanaan (2009) Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Kemenakertrans, (2013). *Program Pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana*,. Kementerian Tenaga kerja Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Priyatno, Duwi. (2010). *Paham Analisa Data Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.
- Purwanto, Erwan Agus. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Rifa'i, Acmad dan Catharina Tri Anni. (2009). *Psikologi Pendidikan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Meilia Nur Indah. (2010). *Statistika Deskriptif dan Induktif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.]]
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.



## EVALUASI PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BOP PAUD DI JAWA TENGAH TAHUN 2018

**Waluyo Basuki, Zumrotul Khasanah, Farida Widyawati, Aniek Sugiyanti**  
Pamong Belajar PP PAUD dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah

### Abstrak

*Upaya meningkatkan layanan PAUD yang inklusif, adil dan bermutu serta berkelanjutan bagi semua anak usia dini, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2016 berupaya membantu penyediaan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) melalui dana alokasi khusus Nonfisik (DAK Nonfisik). DAK Nonfisik BOP PAUD ini dimaksudkan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini, guna memberikan layanan PAUD yang lebih bermutu. Masalah yang dirumuskan adalah bagaimana pemanfaatan DAK Nonfisik BOP PAUD dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi pelaksanaan program DAK Non Fisik BOP PAUD di Jawa Tengah Tahun 2018 ditinjau dari CIPP dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD. Subyek dalam pengkajian ini adalah lembaga PAUD yang menerima dana alokasi khusus (DAK) non fisik BOP PAUD tahun 2018 di dua puluh lima kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara terhadap lembaga PAUD dan selanjutnya kedua data tersebut digabungkan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan atau proses yang terjadi bersamaan yakni: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.*

*Penelitian ini membahas 4 komponen dengan indikator masing-masing, diantaranya; 1. Komponen Context dengan indikator tujuan pengajuan program DAK, indikator manfaat, indikator sasaran dan indikator kepemilikan juknis,. 2. Komponen Input dengan indikator aspek kelembagaan/pengelola, indikator aspek kondisi sumber daya manusia, indikator rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPS) dan indikator sarana dan prasarana. 3. Komponen Process dengan indikator sosialisasi dari dinas, proses pengajuan, pencairan, penggunaan dana, laporan, pengawasan / audit, serta pembimbingan dan pendampingan. 4. Komponen Produk terlihat dari indikator dukungan dana BOP terhadap ketercapaian STPPA, dukungan dana BOP terhadap peningkatan sarpras dan dukungan dana BOP Terhadap Peningkatan Sumberdaya Manusia.*

*Berdasarkan hasil pengkajian tentang Evaluasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD di Jawa Tengah Tahun 2018 maka rekomendasi akan diberikan kepada Kemdikbud Dirjen PAUD dan DIKMAS, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan lembaga PAUD khususnya penerima dana alokasi khusus non fisik BOP PAUD.*

**Kata Kunci:** Dana Alokasi Khusus, Non Fisik, Bantuan Operasional, Pendidikan Anak Usia Dini

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini (PAUD) berkualitas menjadi investasi berharga karena ketika otak manusia sedang dibangun menjadi kesempatan emas untuk mempertajam keterampilan akademik, sosial dan kognitif anak yang bermanfaat bagi kehidupan nanti baik secara sosial maupun ekonomi.

"Dua penelitian tentang perkembangan otak manusia dan investasi untuk PAUD menunjukkan bukti yang signifikan tentang pentingnya PAUD berkualitas," Prof James Heckman -- penerima nobel bidang ekonomi -- bahwa investasi satu dolar AS dalam PAUD Berkualitas akan memperoleh imbalan 13 dolar AS (13 kali lipat)."Prof Heckman juga

menyatakan PAUD yang berkualitas meningkatkan kelulusan siswa SLTA perempuan dari 13 persen menjadi 25 persen. PAUD berkualitas juga meningkatkan penghasilan laki-laki dewasa antara 19 ribu dolar AS sampai 24 ribu dolar AS,"

Penyelenggaraan PAUD di Indonesia, dewasa ini sangat pesat. Saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sudah mencapai 72,35 persen dan masih terdapat 28,86 persen desa yang belum memiliki PAUD. Renstra Kemendikbud menetapkan pentahapan wajib PAUD satu tahun Pra SD. Tahun 2016 sudah dimulai di lima kabupaten atau kota. Data Kemendikbud menyebutkan tahun 2010 terdapat 32,5 juta anak usia 0-6 tahun yang pada tahun 2045 usia mereka mencapai 35-41 tahun. Sementara itu, anak usia 0-6 tahun pada tahun 2016 yang berjumlah 33,5 juta orang pada tahun 2045 usia mereka telah mencapai 29-35 tahun. Anak-anak tersebut yang diharapkan pada tahun 2045 akan menjadi penerus bangsa yang berkualitas, sehingga harus dipersiapkan sejak dini melalui penyelenggaraan PAUD yang berkualitas pula.

Peningkatan kualitas PAUD kini telah menjadi komitmen dunia. Agenda perkembangan anak usia dini telah masuk dalam agenda PBB melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SGD). Pada tahun 2030, dunia berkomitmen memastikan semua anak perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan dan pendidikan anak usia dini bermutu sehingga mereka siap untuk memasuki pendidikan dasar.

Pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti melalui peraturan Presiden RI no 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun dalam hal akses, masih ada kendala dalam penanganan PAUD, diantaranya di daerah terdepan, terluar dan terpencil (3T). Penyelenggaraan PAUD di beberapa lembaga PAUD di Indonesia khususnya di daerah 3T, selama ini berjalan dengan tidak ada penarikan biaya, dikarenakan biaya operasional biasanya merupakan sumbangan dari berbagai pihak di masyarakat, namun ternyata mengalami beberapa kendala. Misalnya sumbangan yang didapat hanya dapat memenuhi bahan belajar murid, namun hal lain seperti honor para pendidik tidak dapat terpenuhi. Padahal, para pengajar PAUD seringkali memerlukan uang transport untuk menjangkau PAUD yang dibina. Selain itu, para orangtua murid juga meminta adanya rekreasi bersama atau pemakaian baju seragam. Dan untuk kebutuhan seperti ini, PAUD seringkali tidak memiliki dana. Kemudian, beberapa PAUD akhirnya menarik iuran sekolah. Tentunya iuran ini tidak bisa besar jumlahnya, karena para murid PAUD berasal dari keluarga miskin. Rata-rata mereka mengeluarkan sekitar 1000 perhari (dengan jam belajar hanya 2-3 kali seminggu) atau 10.000 per bulan. Pemerintah melalui Direktorat PAUD, sebetulnya sudah menyediakan dana untuk operasional PAUD. Namun dana yang ada ternyata tidak mencukupi kebutuhan operasional seluruh PAUD. Akhirnya dilakukan secara bergilir, pengalihan dana tersebut, dengan cara mengajukan proposal.

Pendidikan pra-sekolah atau yang populer sebagai pendidikan anak usia dini (PAUD) yang lebih komprehensif, inklusif dan bermutu merupakan hal yang positif bagi kepentingan pengembangan potensi dan karakter yang dimiliki anak sejak dini serta mempersiapkan anak untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Banyak di berbagai hasil penelitian dan evaluasi yang menunjukkan bahwa perkembangan anak usia dini merupakan tahap perkembangan yang paling penting dalam masa hidup manusia. Program-program perlindungan, pengasuhan anak dan pendidikan usia dini yang berkualitas menghasilkan

manfaat dan efek jangka panjang yang lebih tinggi daripada program belajar semata. Penyiapan manusia berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”, Nawa Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Nawa Cita ke-6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”.

Dari hasil pemantauan masih banyak anak-anak yang kurang beruntung untuk memperoleh manfaat yang paling mendasar dari program PAUD, mereka memiliki keterbatasan untuk memperoleh layanan yang layak melalui program PAUD: anak perempuan, anak-anak migran, dan anakanak korban konflik, bencana, dan kekerasan; anak-anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrim dan di pedesaan serta daerah terpencil; anak yang kesehatannya buruk, kurang gizi, dan menyandang cacat serta -12- keterlambatan perkembangan; serta anak-anak dari minoritas bahasa/etnis. Pencapaian selama 17 tahun sejak program PAUD dicanangkan oleh Pemerintah sudah menunjukkan hal yang positif dalam keikutsertaan peserta didik khususnya usia 3-6 tahun dalam program-program PAUD.

Cita-cita memberikan kado ulang tahun emas Kemerdekaan Indonesia yang ke 100 akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berintegritas dan berdaya saing global. Berdasarkan proyeksi data BPS jumlah anak usia 3-6 tahun tahun 2016 yang berjumlah 19,23 juta anak, pada tahun 2045 usia mereka akan mencapai 32-35 tahun (Proyeksi Berdasarkan Hasil SP 2010). Usia ini merupakan usia angkatan kerja yang produktif. Angkatan kerja ini jika dipersiapkan dengan baik sejak dini akan menjadi modal pembangunan, tetapi sebaliknya jika tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan atau bencana demografi. Maju dan berkembangnya pembangunan suatu bangsa atau negara sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan generasi penerusnya. Penyiapan generasi unggul untuk menjawab kemajuan peradaban harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.

Maju dan berkembangnya program PAUD yang berkualitas tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat saja tetapi harus melibatkan Pemerintah Daerah termasuk semua unsur keluarga, lembaga pendidikan dan unsur masyarakat untuk saling bersinergi secara aktif untuk pencapaian tujuan bersama yaitu mempersiapkan anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Dari hasil sinergitas dan partisipasi semua komponen termasuk peran aktif Bunda PAUD di semua jenjang sangat berdampak positif dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan angka partisipasi kasar (APK) PAUD untuk anak usia 3-6 tahun pada tahun 2017 mencapai 72,35%. Sedangkan jumlah lembaga penyelenggara pendidikan anak usia -13- dini yang telah mencapai 197.652 satuan pendidikan yang tersebar di 72 ribu lebih desa/kelurahan. Dari jumlah lembaga yang ada tersebut, hampir 98% diantaranya diselenggarakan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan layanan PAUD yang inklusif, adil dan bermutu serta berkelanjutan bagi semua anak usia dini, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2016 berupaya membantu penyediaan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) melalui dana alokasi khusus Nonfisik (DAK Nonfisik). Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 46 ayat (1) UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan ayat (2) berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan.

DAK Nonfisik BOP PAUD ini dimaksudkan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini, guna memberikan layanan PAUD yang lebih bermutu. Untuk mewujudkan perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta akuntabilitas penggunaan dana BOP PAUD, agar tepat sasaran dan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD. Petunjuk Teknis ini menjadi acuan semua pihak dalam pemanfaatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD.

## 2. Tujuan

Pengkajian ini secara umum bertujuan untuk melakukan pengkajian pelaksanaan Program DAK Non Fisik BOP PAUD dan Secara rinci tujuan dari Pengkajian Program DAK Non Fisik BOP PAUD di Jawa Tengah adalah:

- a. Memperoleh gambaran lengkap tentang DAK Non Fisik BOP PAUD.
- b. Untuk Mengetahui sejauh mana Bantuan penyediaan biaya operasional non personalia bagi anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program PAUD
- c. Sejauh mana dampak yang bisa meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal.

## 3. Masalah

Bagaimana pemanfaatan DAK Nonfisik BOP PAUD dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan

## 4. Manfaat

Secara teoritis, pengkajian program ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa gagasan, ide, konsep tentang DAK non fisik BOP PAUD yang diselenggarakan Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program PAUD dan secara Praktis hasil pengkajian program PAUDNI tentang "DAK non fisik BOP PAUD" ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak:

- a. Direktorat PAUD DAN DIKMAS, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian DAK Non Fisik BOP PAUD.
- b. PP-PAUD Dikmas sebagai bahan pengkajian DAK Non Fisik BOP PAUD
- c. Lembaga PAUD, sebagai bahan acuan penyelenggaraan DAK non fisik BOP PAUD.

- d. Sebagai contoh atau model bagi penyelenggara program DAK Non Fisik BOP PAUD.

## B. URAIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil pengkajian difokuskan pada aspek-aspek program Dana DAK Nonfisik BOP PAUD dalam komponen konteks, input, proses dan produk yang sebagian besar sudah dan tidak terpenuhi oleh lembaga. Hal tersebut perlu mendapat perhatian agar menjadi perbaikan bagi lembaga maupun bagi kebijakan program dana DAK Nonfisik BOP PAUD dari hasil pengkajian mengenai gambaran pelaksanaan Program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dilakukan pada 25 lembaga PAUD disajikan hasil berikut ini.

### 1. Aspek Context

Berdasarkan hasil pengkajian kami, dapat diuraikan bahwa penelitian mengenai pelaksanaan Program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dilakukan pada 25 lembaga PAUD untuk Aspek Context, secara umum sudah menunjukkan hal yang baik, dimana sebagian besar lembaga telah melaksanakan Program DAK Non Fisik BOP PAUD dari aspek context secara tepat. Hal ini terlihat dari indikator tujuan, manfaat, sasaran, kepemilikan Juknis, dan indikator kebutuhan yang belum terpenuhi, akan tetapi tidak boleh menggunakan dana DAK.

#### a. Dari Indikator Tujuan Pengajuan

Program DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima:

- 1) untuk biaya operasional non personalia (semua (100%) lembaga merasa terbantu)
- 2) digunakan hanya untuk biaya operasional (15 lembaga (60,0%))
- 3) Sebagian besar lembaga tidak menggunakan untuk biaya personalia, 18 lembaga (72,0%).
- 4) digunakan untuk membeli sarana pembelajaran, dimana sebagian besar lembaga menggunakan sebagian dana untuk membeli sarana pembelajaran, sejumlah 15 lembaga (60,0%)

#### b. dari Manfaat

Dengan adanya Program DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima:

- 1) beban orang tua peserta didik merasa diringankan, dimana sebagian besar lembaga menyatakan program tersebut sangat meringankan beban orangtua peserta didik, yaitu sejumlah 14 lembaga (56,0%).
- 2) Sebagian besar lembaga menyatakan orangtua ternyata hanya kadang-kadang masih membayar biaya operasional, yaitu sejumlah 10 lembaga (40,0%).
- 3) bermanfaat bagi lembaga PAUD, dimana sebagian besar lembaga menyatakan sangat bermanfaat, yaitu sejumlah 22 lembaga (88,0%)
- 4) bermanfaat bagi orang tua siswa PAUD, dimana sebagian besar lembaga menyatakan sangat bermanfaat bagi orangtua siswa, yaitu sejumlah 16 lembaga (64,0%)
- 5) bermanfaat bagi siswa PAUD, dimana sebagian besar lembaga sangat bermanfaat bagi siswa PAUD, yaitu sejumlah 22 lembaga (88,0%)
- 6) bermanfaat bagi masyarakat sekitar lembaga PAUD, dimana sebagian besar lembaga menyatakan sangat bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar lembaga PAUD, yaitu masing-masing sejumlah 11 lembaga (44,0%).

#### c. Sasaran

Lembaga penerima Program DAK Non Fisik BOP PAUD:

- 1) memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN), hasil penelitian didapatkan semua (100%) lembaga memiliki NPSN.
- 2) memiliki peserta didik berjumlah minimal 12 yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Ditjen PAUD dan Dikmas, dimana hasil penelitian didapatkan semua (10%) lembaga memiliki peserta didik lebih dari 12 peserta didik yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Ditjen PAUD dan Dikmas.
- 3) memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal, dimana hasil penelitian didapatkan semua (100%) lembaga memiliki rekening dan masih berlaku atas nama PAUD.
- 4) memiliki nomor pokok wajib pajak, dimana hasil penelitian didapatkan semua (100%) lembaga memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan dokumen lengkap.

#### **d. Kepemilikan Juknis**

Lembaga penerima Program DAK Non Fisik BOP PAUD:

- 1) Memiliki Juknis Program DAK Non Fisik BOP PAUD, dimana hasil penelitian didapatkan sebagian besar lembaga Penerima Program DAK Non Fisik BOP PAUD menyatakan memiliki Juknis Program DAK Non Fisik BOP PAUD secara lengkap, yaitu sejumlah 20 lembaga (80,0%).
- 2) Pengelolanya memahami Juknis Program DAK Non Fisik BOP PAUD, dimana hasil penelitian didapatkan sebagian besar lembaga Penerima Program DAK Non Fisik BOP PAUD menyatakan pengelolanya memahami Juknis Program DAK Non Fisik BOP PAUD, sejumlah 16 lembaga (64,0%), dan 7 lembaga (28,0%) menyatakan pengelolanya sangat memahami Juknis.
- 3) Pendidiknya memahami Juknis Program DAK Non Fisik BOP PAUD, dimana hasil penelitian didapatkan sebagian besar lembaga Penerima Program DAK Non Fisik BOP PAUD menyatakan pendidiknya memahami Juknis Program DAK Non Fisik BOP PAUD, sejumlah 16 lembaga (64,0%), dan 7 lembaga (28,0%) menyatakan pendidiknya sangat memahami Juknis.

## **2. Aspek Input**

Berdasarkan hasil pengkajian kami, dapat diuraikan bahwa pada aspek Input, penelitian mengenai pelaksanaan Program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dilakukan pada 25 lembaga PAUD, secara umum sudah menunjukkan hal yang baik, dimana sebagian besar lembaga telah melaksanakan Program DAK Non Fisik BOP PAUD dari aspek input secara tepat. Hal ini terlihat dari indikator:

### **a. Aspek Kelembagaan/Pengelola**

- 1) Semua lembaga memiliki visi misi PAUD yang sesuai dengan program kerja, dimana dari hasil penelitian ditemukan bahwa semua (100%) lembaga Penerima Program DAK Non Fisik BOP PAUD menyatakan telah memiliki visi dan misi dan semua (100%) lembaga Penerima Program DAK Non Fisik BOP PAUD menyatakan telah memiliki visi dan misi yang sesuai dengan pelaksanaan program PAUD
- 2) Memiliki pengalaman membuka layanan PAUD selama 4 tahun lebih, sebagian besar menyatakan telah memiliki pengalaman membuka layanan PAUD selama 4 tahun lebih, yaitu sejumlah 23 lembaga (92,0%).
- 3) Memiliki struktur organisasi yang meliputi ketua, sekretaris, bendahara, seksi pembelajaran dan lainnya, semuanya (100%) menyatakan telah memiliki struktur organ-

isasi yang meliputi ketua, sekretaris, bendahara, seksi pembelajaran dan lainnya. Kemudian, sebagian besar lembaga menyatakan telah memiliki struktur organisasi yang lengkap, yaitu sejumlah 17 lembaga (68,0%), dan 6 lembaga (24,0%) menyatakan sangat lengkap. Namun, masih terdapat 2 lembaga (8,0%) menyatakan kurang lengkap

- 4) Sebagian besar lembaga juga menyatakan memiliki rincian tugas seksi-seksi, yaitu sejumlah 20 lembaga (80,0%).

**b. Aspek Kondisi Sumber Daya Manusia**

- 1) Pendidiknya memiliki Kualifikasi pendidikan minimal S1, dimana dari hasil penelitian didapatkan, sebagian besar lembaga menyatakan 75-100% pendidiknya sudah memiliki pendidikan S1, yaitu sejumlah 11 lembaga (44,0%).
- 2) Pendidik memiliki pengalaman pelatihan PAUD, dimana dari hasil penelitian didapatkan, sebagian besar lembaga menyatakan 75-100% pendidiknya memiliki pengalaman pelatihan pendidik PAUD, yaitu sejumlah 12 lembaga (48,0%)

**c. Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS)**

- 1) Memiliki sumber anggaran, dimana dari hasil penelitian didapatkan, sebagian besar lembaga menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah berasal dari orangtua/wali dan CSR, masing-masing sejumlah 11 lembaga (44,0%).
- 2) Rincian pembiayaan/RAB sesuai dengan kebutuhan, dimana dari hasil penelitian didapatkan, semua (100%) lembaga menyatakan Rincian Pembiayaan/RAB telah sesuai dengan kebutuhan, dimana 18 lembaga (72,0%) menyatakan sesuai dan 7 lembaga (28,0%) menyatakan sangat sesuai.
- 3) RAB yang diajukan untuk DAK BOP sesuai dengan RAPBS, dimana dari hasil penelitian didapatkan, sebagian besar lembaga menyatakan RAB yang diajukan untuk DAK BOP telah sesuai dengan RAPBS, dengan rincian 11 lembaga (44,0%) menyatakan sesuai dan 6 lembaga menyatakan sangat sesuai.
- 4) Asa Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RAPBS, dimana dari hasil penelitian didapatkan, sebagian besar lembaga menyatakan melakukan sosialisasi RAPBS, yaitu sejumlah 23 lembaga (92,0%).
- 5) Melakukan sosialisasi RAPBS, dimana dari hasil penelitian didapatkan, sebagian besar lembaga menyatakan melakukan sosialisasi RAPBS kepada orangtua/komite, yaitu sejumlah 17 lembaga (68,0%).

**d. Sarana Dan Prasarana**

- 1) Sarana belajar yang dimiliki, dimana dari hasil penelitian didapatkan, sebagian besar lembaga menyatakan memiliki sarana belajar berupa tape recorder, yaitu sejumlah 21 lembaga (84,0%).
- 2) Kondisi sarana belajar, dimana dari hasil penelitian didapatkan, semua (100%) lembaga menyatakan memiliki sarana belajar dalam kondisi yang baik, dengan rincian 21 lembaga (84,0%) menyatakan baik dan 4 lembaga (16,0%) menyatakan sangat baik.
- 3) Kondisi ruang belajar, dimana dari hasil penelitian didapatkan, sebagian besar lembaga menyatakan memiliki ruang belajar dalam kondisi yang baik, dengan rincian 19 lembaga (76,0%) menyatakan baik dan 5 lembaga (20,0%) menyatakan sangat baik.
- 4) Kebersihan lingkungan, dimana dari hasil penelitian didapatkan, semua (100%) lembaga menyatakan memiliki kondisi lingkungan yang baik, dengan rincian 19 lembaga (76,0%) menyatakan baik dan 6 lembaga (24,0%) menyatakan sangat baik.

- 5) Luas lahan, dimana dari hasil penelitian didapatkan, sebagian besar lembaga menyatakan memiliki luas lahan > 500 m<sup>2</sup> dan 300-500 m<sup>2</sup>, yaitu masing-masing sejumlah 11 lembaga (44,0%).

### 3. Aspek Proses

Berdasarkan hasil pengkajian kami, dapat diuraikan bahwa pelaksanaan Program DAK Non Fisik BOP PAUD, dilihat dari aspek proses, secara umum juga sudah menunjukkan pelaksanaan yang baik, dimana sebagian besar lembaga telah melaksanakan Program DAK Non Fisik BOP PAUD dari aspek proses secara tepat. Hal ini terlihat dari indikator:

#### a. Sosialisasi Dari Dinas

- 1) Lembaga Mengikuti Sosialisasi dari Dinas tentang Juknis Pengajuan DAK BOP PAUD, dimana dari hasil penelitian didapatkan bahwa semua (100%) lembaga menyatakan mengikuti sosialisasi dari Dinas tentang Juknis Pengajuan DAK BOP PAUD.
- 2) Pihak yang mewakili keikutsertaan dalam sosialisasi, dimana dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar lembaga menyatakan yang mewakili mengikuti sosialisasi dari Dinas tentang Juknis Pengajuan DAK BOP PAUD adalah ketua, yaitu sejumlah 12 lembaga (48,0%). Sedangkan yang diwakili oleh sekretaris sejumlah 20 lembaga (40,0%), dan yang diwakili oleh bendahara 2 lembaga (8,0%), serta diwakili pendidik 1 lembaga (4,0%).

#### b. Proses Pengajuan

- 1) Tenggang waktu antara sosialisasi dan proses pengajuan, dimana dari hasil penelitian didapatkan bahwa semua (100%) lembaga menyatakan waktu sosialisasi tentang Juknis Pengajuan DAK BOP PAUD yang diadakan oleh dinas sudah sesuai.
- 2) Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Proses Pengajuan, dimana dari hasil penelitian didapatkan bahwa semua (100%) lembaga menyatakan Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Proses Pengajuan sudah sesuai.

#### c. Pencairan

- 1) Proses Pencairan dengan waktu yang ditentukan telah sesuai, dimana dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan Proses Pencairan dengan waktu yang ditentukan, sudah sesuai, dengan rincian 11 lembaga (44,0%) menyatakan sesuai dan 5 lembaga (20,0%) menyatakan sangat sesuai.
- 2) Pengumuman pencairan dana BOP, dimana dari hasil penelitian didapatkan bahwa lembaga yang menyatakan pengumuman pencairan dana BOP kepada pendidik sejumlah 6 lembaga (24,0%). Kepada pengelola sekolah sejumlah 7 lembaga (28,0%), kepada komite sekolah sejumlah 8 lembaga (2,0%), dan kepada pihak lainnya sejumlah 4 lembaga (16,0%).

#### d. Penggunaan Dana

- 1) Dana yang diajukan lembaga dengan kebutuhan lembaga sudah sesuai, dimana dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan dana yang diajukan lembaga dengan kebutuhan lembaga sudah sesuai, dengan rincian 16 lembaga (64,0%) menyatakan sesuai dan 8 lembaga (32,0%) menyatakan sangat sesuai.
- 2) Sebagian besar penggunaan dana DAK disampaikan kepada komite sekolah dan pengelola sekolah, masing-masing sejumlah 12 lembaga (48,0%) dan 10 lembaga (40,0%).

- 3) Dana BOP yang diajukan dengan pemanfaatan dana sudah sesuai, dimana dari hasil penelitian disimpulkan bahwa semua (100%) lembaga menyatakan dana BOP yang diajukan lembaga telah sesuai dengan pemanfaatan dana.
- 4) Pemanfaatan dana BOP ditetapkan berdasarkan musyawarah, dimana dari hasil penelitian disimpulkan bahwa semua (100%) lembaga menyatakan pemanfaatan dana BOP ditetapkan berdasarkan musyawarah.
- 5) Pihak yang dilibatkan dalam musyawarah, dimana dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan yang dilibatkan dalam musyawarah pemanfaatan dana BOP adalah komite sekolah, sejumlah 14 lembaga (56,0%).

**e. Laporan Pertanggungjawaban**

- 1) Laporan Pertanggungjawaban dana BOP, dimana dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan laporan pertanggungjawaban dana BOP diberikan kepada komite sekolah, sejumlah 12 lembaga (48,0%).
- 2) Laporan Pertanggungjawaban dengan dana yang diajukan oleh lembaga, sudah sesuai, dimana dari hasil penelitian disimpulkan bahwa semua (100%) lembaga menyatakan laporan pertanggungjawaban dengan dana yang diajukan oleh lembaga telah sesuai.
- 3) Tenggang Waktu yang diberikan untuk membuat laporan penggunaan dana BOP sudah sesuai, dimana dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan Tenggang Waktu yang diberikan untuk membuat laporan penggunaan dana BOP sudah sesuai, dengan rincian 15 lembaga (60,0%) menyatakan sesuai dan 3 lembaga (12,0%) menyatakan sangat sesuai.
- 4) Lembaga menyerahkan laporan penggunaan dana tepat waktu, dimana dari hasil penelitian disimpulkan bahwa semua (100%) lembaga menyatakan menyerahkan laporan penggunaan dana secara tepat waktu.
- 5) Laporan pertanggungjawaban dana BOP, dimana dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan menyerahkan laporan penggunaan dana BOP dilaporkan kepada UPT terkait dan Dinas Pendidikan, masing-masing sejumlah 8 lembaga (36,0%) dan 8 lembaga (32,0%).

**f. Pengawasan / Audit**

- 1) Perlunya Pengawasan atau audit dana BOP, dimana dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan penggunaan dana BOP perlu dilakukan pengawasan dan audit, yaitu sejumlah 21 lembaga (84,0%).
- 2) pengawasan atau audit dana BOP sudah dilakukan, dimana dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan penggunaan dana BOP sudah dilakukan pengawasan dan audit, yaitu sejumlah 11 lembaga (56,0%).
- 3) Pengawasan atau audit dana BOP, dimana dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan yang melakukan pengawasan dan audit penggunaan dana BOP adalah Inspektorat Jenderal Kemendikbud, yaitu sejumlah 18 lembaga (72,0%).
- 4) Temuan yang ditemukan dalam audit adalah penggunaan dana tidak sesuai dengan proposal, sebagaimana dari hasil penelitian disimpulkan bahwa semua (100%) lembaga menyatakan bahwa temuan yang didapat dalam audit adalah penggunaan dana tidak sesuai yang tertera pada proposal.

- 5) Audit bermanfaat dalam perbaikan penyusunan laporan dan penggunaan dana BOP, dimana dari hasil penelitian diperoleh bahwa semua lembaga (100%) lembaga menyatakan audit bermanfaat dalam perbaikan penyusunan laporan dan penggunaan dana BOP.

**g. Pembimbingan Dan Pendampingan**

- 1) Pembimbingan dalam pelaksanaan program BOP sangat diperlukan, dimana dari hasil penelitian diperoleh bahwa semua (100%) lembaga menyatakan perlu ada pembimbingan dalam pelaksanaan program BOP, dengan rincian 16 lembaga (64,0%) menyatakan sangat perlu dan 9 lembaga (36,0%) menyatakan perlu.
- 2) Pembimbingan/pendampingan yang diharapkan dalam pelaksanaan program BOP, dimana dari hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar lembaga menyatakan pembimbingan dalam pelaksanaan program BOP, yang diharapkan adalah pada masalah yang berkaitan dengan pencairan, sejumlah 15 lembaga (60,0%), dan pada masalah penggunaan, sejumlah 10 lembaga (40,0%).

**4. Aspek Produk**

Berdasarkan hasil pengkajian kami, dapat diuraikan bahwa pelaksanaan Program DAK Non Fisik BOP PAUD, dilihat dari aspek produk, secara umum juga sudah menunjukkan pelaksanaan yang baik, dimana sebagian besar lembaga telah melaksanakan Program DAK Non Fisik BOP PAUD dari aspek produk secara tepat. Hal ini terlihat dari indikator:

**a. Dukungan Dana BOP Terhadap Ketercapaian STPPA**

- 1) Dana BOP yang digunakan untuk pembelian bahan bermain dan bahan belajar PAUD, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan dana BOP yang digunakan untuk pembelian bahan bermain dan belajar sebesar 50-75%, yaitu sejumlah 16 lembaga (64,0%).
- 2) Dana BOP yang digunakan untuk pembelian peralatan pembelajaran seperti krayon, spidol, kertas, pensil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan dana BOP yang digunakan untuk pembelian peralatan pembelajaran seperti krayon, spidol, kertas, pensil sebesar 20-40%, yaitu sejumlah 13 lembaga (52,0%).
- 3) Dukungan dana BOP dalam penyediaan buku administrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan Dukungan dana BOP dalam penyediaan buku administrasi sebesar 20-35%, yaitu sejumlah 10 lembaga (40,0%).
- 4) Dukungan dana BOP dalam pembelian alat-alat DDTK, obat-obatan dan P3K, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar lembaga menyatakan Dukungan dana BOP dalam pembelian alat-alat DDTK, obat-obatan dan P3 di bawah 5%, yaitu sejumlah 9 lembaga (36,0%).
- 5) Dukungan dana BOP dalam kegiatan pertemuan pendidik, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan Dukungan dana BOP dalam kegiatan pertemuan pendidik sebesar 5-10%, sejumlah 10 lembaga (40,0%).
- 6) Dukungan dana BOP dalam peningkatan kapasitas pendidik, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan Dukungan dana BOP dalam kegiatan peningkatan kapasitas pendidik adalah di bawah 5%, sejumlah 10 lembaga (40,0%).

- 7) Dukungan dana BOP dalam penyediaan makanan sehat, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar lembaga menyatakan dukungan dana BOP dalam penyediaan makanan sehat adalah 10-20%, yaitu sejumlah 9 lembaga (36,0%).

**b. Dukungan Dana BOP Terhadap Peningkatan SARPRAS**

- 1) Perawatan sarana dan prasarana di lembaga, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan dana BOP yang digunakan untuk perawatan sarana dan prasarana di lembaga sebesar 10-15%, yaitu sejumlah 22 lembaga (88,0%).
- 2) Prosentase keseluruhan dana untuk perawatan sarana dan prasarana dari dana BOP, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan perawatan sarana dan prasarana di lembaga yang berasal dari dana BOP sebesar 10-15%, yaitu sejumlah 23 lembaga (92,0%).
- 3) Prosentase sumber dana lain selain dana BOP untuk perawatan sarana dan prasarana, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan perawatan sarana dan prasarana di Lembaga yang berasal dari sumber dana lain selain dana BOP sebesar 10-15%, yaitu sejumlah 40 lembaga (40,0%).
- 4) Alokasi dana untuk perawatan sarana dan prasarana lembaga yang ada di Petunjuk Teknis DAK Non Fisik BOP PAUD pada komponen Kegiatan Lainnya (Maksimal 15%) sudah sesuai dengan kebutuhan lembaga, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan setuju jika alokasi dana untuk perawatan sarana dan prasarana lembaga yang ada di Petunjuk Teknis DAK Non Fisik BOP PAUD Maksimal 15%, yaitu sejumlah 12 lembaga (48,0%)
- 5) Pada kenyataannya alokasi dana untuk perawatan sarana dan prasarana Lembaga membutuhkan dana yang lebih dari 15% dana BOP yang diterima, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan kurang setuju dan tidak setuju jika alokasi dana untuk perawatan sarana dan prasarana lebih besar 15% dana BOP, masing-masing sejumlah 11 lembaga (44,0%) dan 8 lembaga (32,0%).
- 6) Dana BOP sangat membantu meningkatkan sarana dan prasarana Lembaga, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa dana BOP sangat membantu meningkatkan sarana dan prasarana, masing-masing sejumlah 19 lembaga (76,0%) dan 5 lembaga (20,0%).

**c. Dukungan Dana BOP Terhadap Peningkatan Sumberdaya Manusia**

- 1) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Lembaga menggunakan dana BOP, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan setuju dan sangat setuju, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Lembaga menggunakan dana BOP, masing-masing sejumlah 14 lembaga (56,0%) dan 7 lembaga (28,0%).
- 2) Tidak ada sumber dana lain untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Lembaga selain dana BOP, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan tidak setuju, tidak ada Sumber Dana lain, Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Lembaga, selain menggunakan dana BOP, yaitu sejumlah 16 lembaga (64,0%).

- 3) Dana BOP sangat membantu meningkatkan sumber daya manusia di lembaga, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa dana BOP sangat membantu meningkatkan sumber daya manusia di lembaga, masing-masing sejumlah 15 lembaga (60,0%) dan 6 lembaga (24,0%)
- 4) Alokasi dana BOP yang tertera dalam Petunjuk Teknis DAK Non Fisik BOP PAUD pada komponen Kegiatan Pendukung (Maksimal 35%) sudah sesuai untuk peningkatan sumber daya manusia di lembaga, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga menyatakan setuju bahwa Alokasi dana BOP yang tertera dalam Petunjuk Teknis DAK Non Fisik BOP PAUD pada komponen Kegiatan Pendukung (Maksimal 35%) sudah sesuai untuk peningkatan sumber daya manusia di lembaga, yaitu sejumlah 16 lembaga (64,0%).
- 5) Lembaga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk peningkatan sumber daya manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua lembaga menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa Lembaga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk peningkatan sumber daya manusia, masing-masing sejumlah 15 lembaga (60,0%) dan 10 lembaga (40,0%).

## C. PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan secara umum pelaksanaan program DAK Non Fisik BOP PAUD di aspek konteks dan input sudah baik, tetapi aspek proses dan produk masih banyak masukan perbaikan. Secara detail, simpulan per komponen adalah sebagai berikut :

#### a. **Komponen Konteks**

Pengkajian mengenai pelaksanaan Program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dilakukan pada 25 lembaga PAUD untuk Aspek Context, secara umum sudah menunjukkan hal yang baik, dimana pelaksanaan Program DAK Non Fisik BOP PAUD dari aspek context sudah tepat. Hal ini terlihat dari indikator tujuan, manfaat, sasaran, kepemilikan Juknis, dan indikator kebutuhan yang belum terpenuhi, akan tetapi tidak boleh menggunakan dana DAK.

#### b. **Tujuan Pengajuan**

Program DAK Non Fisik BOP PAUD membantu lembaga PAUD dalam pemenuhan biaya operasional non personalia. Penggunaan dana tersebut 60% lembaga menyatakan digunakan untuk hanya biaya operasional. Terdapat 40% lembaga yang menggunakan dana tersebut untuk biaya non operasional. Hal ini dikarenakan kondisi lembaga dan adanya kebutuhan mendesak non operasional yang harus dipenuhi.

#### c. **Manfaat**

Dengan adanya Program DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima beban orang tua peserta didik merasa diringankan. Ada beberapa hal yang mendasari Lembaga masih membebankan biaya operasional kepada orangtua peserta didik diantaranya kebutuhan biaya operasional yang memang tidak semua bisa terpenuhi dengan DAK Nonfisik BOP PAUD, adanya lembaga yang tidak memasukkan dana BOP ke dalam RAB Lembaga dan karena proses turunnya dana BOP yang tidak menentu kadang awal tahun tetapi kadang cair akhir tahun di mana kegiatan pembelajaran sudah hampir berakhir.

d. **Sasaran**

Semua lembaga penerima BOP adalah lembaga yang memenuhi persyaratan seperti tertuang dalam permendikbud No. 2 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD halaman 16.

e. **Kepemilikan Juknis**

Masih terdapat 20% lembaga yang tidak memiliki Juknis. Hal ini bertentangan dengan keharusan setiap lembaga untuk benar-benar memahami juknis pada proses penggunaan samapai dengan pertanggungjawaban karena semua rambu-rambu terdapat pada juknis.

## 2. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan hasil pengkajian evaluasi pelaksanaan Program DAK Non Fisik BOP PAUD, maka rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut :

### A. Kemdikbud Dirjend PAUDDIKMAS

1. Dirjend PAUDDIKMAS menindaklanjuti hasil pengkajian ini dengan memberikan bimbingan teknis dan monitoring kepada dinas kabupaten/kota terkait proses sosialisasi, pengajuan, pencairan, penggunaan, pendampingan, audit dan pertanggungjawaban.
2. Memberikan perhatian khusus kepada dinas kabupaten/kota yang tidak segera melakukan proses pencairan dana.
3. Meninjau kembali aturan tentang persentase penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan lembaga PAUD yang sangat beragam.

### B. Dinas Pendidikan

1. Dinas pendidikan memperhatikan jadwal proses sosialisasi, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban sehingga pemanfaatannya di tingkat satuan PAUD lebih maksimal.
2. Dinas hendaknya mengawal penggunaan dana dengan melakukan pendampingan dan monitoring.

### C. Lembaga PAUD

1. Lembaga PAUD mengimplementasikan pedoman/petunjuk Teknis dengan baik mulai dari pengajuan, penyusunan RAB dan Pelaporan.
2. Proaktif mencari informasi terkait jadwal pelaksanaan program DAK Nonfisik BOP PAUD sehingga tidak menghambat lembaga PAUD yang lain dalam proses pencairan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven, J. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Terjemahan Arief Rurchan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Moleong Lexy, J. (1995) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja RosdakaryaOffset.
- Kruse, Kevin. (2000). *Technology-based Training: The Art and Science of Design, Development and Delivery*. Jossey-Bass Publish.
- McDavid & Hawthorn. (2006). *Program Evaluation & Performance Measurement An Introduction to Practice*. SAGE Publications.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kemdiknas.
- Rudiyanto. 2010. Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. *Manajerial*, 9(7), 55-62.
- Tedjawati, J. M. 2013. Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini Funding For Early Childhood Education. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud.
- Ferdi, W. P. 2013. Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Financing of Education - A Theoretical Study. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud.
- Munthe, A. P. 2015. Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan, dan Manfaat. Jakarta: Indeks.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2017. Jakarta: Kemdikbud
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018. Jakarta: Kemdikbud

## MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK ANAK USIA DINI DENGAN MEDIA GAME SISOMAT (LITERASI SKENARIO MATEMATIKA)

**Endang Tri Haryanti, Suyanto, Sri Haryati**

Pamong Belajar PP PAUD dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah

### **Abstrak**

*Latar belakang muncul model Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Dini dengan Media Game "SISOMAT" (Stimulasi Skenario Matematika) adalah pentingnya matematika untuk dikenalkan kepada anak sedini mungkin agar mampu mengenali dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, serta menambah media pembelajaran matematika yang menarik bagi anak.*

*Rumusan masalah pengembangan model ini adalah bagaimana implementasi model, bagaimana kelayakan model dan apakah model ini efektif untuk diterapkan?*

*Tujuan dari penelitian dan pengembangan model ini adalah untuk mendiskripsikan gambaran implementasi model Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Dini dengan Media Game "SISOMAT" (Stimulasi Skenario Matematika), serta meningkatkan pengetahuan literasi matematika anak usia dini.*

*Penelitian ini menggunakan metode Research & Development (Borg & Gall, 1983). Borg & Gall menyatakan bahwa Research & Development adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan.*

*Dari seluruh rangkaian pengembangan model, diperoleh hasil bahwa media game sisomat sangat menarik, layak untuk diimplementasikan dan efektif untuk diterapkan untuk menstimulasi kemampuan kognitif matematika.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dapat disimpulkan bahwa Meskipun game sisomat hanya memuat empat konsep (pola, perbandingan, seriasi, dan geometri), akan tetapi beberapa konsep matematika yang lain seperti bilangan, pengelompokan dan mencocokkan juga dapat distimulasi dan ditingkatkan secara serta merta. Walaupun tujuan media game sisomat adalah untuk mestimulasi kecerdasan kognitif matematika, akan tetapi media game sisomat ini juga dapat dimanfaatkan untuk menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak (Nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni).*

**Kata kunci :** *Sisomat, Model pembelajaran matematika, Media pembelajaran*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemberian rangsangan pendidikan meliputi aspek moral agama, fisik, bahasa, kognitif, sosial emosional dan seni.

Pengembangan aspek kognitif pada anak usia dini meliputi belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis serta berpikir simbolik, yang didalamnya merupakan perkembangan kemampuan matematika. Aspek kognitif tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain : 1) membandingkan; 2) mengenal sebab akibat; 3) mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk dan ukuran; 4) mengelompokkan; 5) mengenal pola; 6) mengurutkan benda; 7) pengenalan bilangan; dan 8) mencocokkan.

Matematika memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak permasalahan dan kegiatan dalam hidup harus diselesaikan dengan menggunakan ilmu matematika. Tuntutan kemampuan peserta didik dalam matematika tidak sekedar memiliki kemampuan berhitung saja, akan tetapi kemampuan bernalar yang logis dan kritis, mampu menggunakan fakta dan alat matematika dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini

tidak semata-mata masalah yang berupa soal rutin akan tetapi lebih kepada permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Kemampuan matematika yang demikian dikenal sebagai kemampuan literasi matematika.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2013, kemampuan literasi peserta didik Indonesia masih rendah. Indonesia berada di bawah rata-rata internasional dan mayoritas peserta didik hanya dapat menyelesaikan masalah di level 2. Melihat fakta tersebut, kemampuan literasi matematika peserta didik Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan

Di era globalisasi saat ini, dibutuhkan orang-orang yang memiliki keterampilan menemukan konsep-konsep baru, membuka jaringan dan memiliki kompetensi untuk memenuhi standart pekerjaan yang tinggi (Hayat, Yusuf : 2010). Masyarakat yang dibutuhkan saat ini bukan sekedar mereka yang mampu memahami ilmu pengetahuan tertentu saja akan tetapi lebih dalam dari itu. Saat ini, masyarakat dituntut untuk memanfaatkan pengetahuannya secara optimal agar lebih cerdas dan kritis dalam menerima dan mengolah informasi. Hal ini sangat penting untuk menunjang pemecahan masalah yang semakin kompleks.

Pengenalan matematika sejak dini akan berhasil apabila memenuhi prinsip-prinsip belajar anak usia dini. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan adalah bahwa belajar matematika harus menjadi kebutuhan anak serta menjadi kegiatan yang menyenangkan. Belajar matematika harus dilakukan melalui bermain.

Howard Gardner dalam buku *Multiple Intelligence*, menyatakan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan matematika. Potensi tersebut hanya akan berkembang jika mendapatkan stimulasi yang tepat sesuai karakteristik anak.

Kenyataan di lapangan berdasar hasil studi pendahuluan, diperoleh informasi: 1) Pendidik kurang memahami makna dan tujuan belajar matematika. Mereka mengajarkan matematika berdasar yang ada diperangkat pembelajaran, 2) Masih menggunakan metode pembelajaran konvensional (menghafal angka, menjiplak dan menulis), 3) Kegiatan dan media yang digunakan dalam pembelajaran matematika belum bervariasi, 4) Anak diajari secara akademik, sedikit yang bersifat aplikatif sesuai dengan pengalaman di kehidupan sehari-hari, anak sudah mengetahui angka, penambahan, pengurangan dan sebagainya, tetapi anak kesulitan apabila soal/pertanyaan dalam bentuk cerita/ diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, 5) Belum semua guru paham tentang keberhasilan pembelajaran. Apabila anak senang, pembelajaran dianggap berhasil, 6) Orangtua menuntut bahwa anak lulus dari PAUD harus sudah pintar membaca, berhitung dan menulis, sehingga lembaga PAUD menerapkan berbagai cara sehingga pada saat keluar nanti siswanya sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung tanpa memperhatikan tingkat pencapaian perkembangan anak, prinsip-prinsip pembelajaran anak dan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, 7) Dalam pembelajaran matematika, sarana pembelajaran yang digunakan telah bervariasi, akan tetapi pada umumnya belum menyentuh aspek kecerdasan anak secara khusus dan masih banyak kelemahan karena belum ada inovasi.

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya model pembelajaran matematika dengan menggunakan media yang selanjutnya disebut game "SISOMAT" (Literasi Skenario Matematika) yang dapat membantu mengenalkan matematika khususnya literasi matematika pada anak usia dini. Melalui media game "SISOMAT" ini, diharapkan dapat menjadi salah satu

alternatif solusi dalam mengenalkan matematika khususnya literasi matematika pada anak sesuai karakteristik anak usia dini.

## 2. Tujuan Pengembangan Model

Pengembangan model ini secara umum bertujuan untuk menemukan gambaran tentang implementasi, kelayakan dan keefektifan model Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Dini dengan Media Game "SISOMAT" (Stimulasi Skenario Matematika).

## 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi model Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Dini dengan media game "SISOMAT" (Stimulasi Skenario Matematika) di lembaga PAUD?
- b. Bagaimana model Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Dini dengan Media Game "SISOMAT" (Stimulasi Skenario Matematika) yang layak digunakan untuk meningkatkan perkembangan AUD?
- c. Apakah model Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Dini dengan Pendekatan Game "SISOMAT" (Stimulasi Skenario Matematika) efektif untuk meningkatkan perkembangan AUD?

## 4. Manfaat Pengembangan Model

Pengembangan model ini akan sangat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi pengelola PAUD, pendidik, orang tua serta pemerintah serta menambah khasanah keilmuan di bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, khususnya pengembangan pembelajaran matematika untuk anak usia dini dan Pengembangan aspek kognitif utamanya kemampuan literasi matematika anak usia dini.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 mengatakan bahwa Anak Usia Dini adalah anak yang memiliki rentang usia 0-6 tahun. Pada masa ini anak usia dini dikatakan berada pada masa *golden age* yaitu masa emas dimana anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, dan kecerdasan anak juga akan terbentuk di masa ini. Menurut Mansur (2005:88) anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Anak usia dini memiliki perkembangan yang berbeda dari setiap individu. Perkembangan anak usia dini dipengaruhi juga pemberian stimulasi dari orang terdekat dan lingkungannya.

### 2. Matematika untuk anak usia dini

Matematika memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak permasalahan dan kegiatan dalam hidup harus diselesaikan dengan menggunakan ilmu matematika. Bahkan setiap hari matematika digunakan oleh manusia dalam kehidupannya, misal menghitung belanja, mengukur, dan lain sebagainya. Mengingat betapa pentingnya matematika dalam kehidupan manusia, maka matematika perlu dikenalkan sedini mungkin.

Pembelajaran matematika untuk anak merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, mendorong anak untuk mengembangkan berbagai potensi intelektual yang dimilikinya serta data dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan berbagai sikap dan perilaku positif dalam rangka meletakkan dasar kepribadian sedini mung-

kin seperti sikap kritis, ulet, mandiri, ilmiah, dan rasional (Sriningsih, 2008; Rachmawati, 2008; Mirawati, 2014).

Hasil penelitian Dr. Howard Gardner, seorang profesor pendidikan dari *Harvard University* bahwa pembelajaran matematika untuk anak usia dini sangat berguna bagi perkembangan kecerdasan logika matematika pada anak. Beliau mengungkapkan bahwa kecerdasan logika matematika merupakan salah satu dari delapan jenis potensi kecerdasan yang dimiliki anak. Kecerdasan logika matematika cirinya adalah kepekaan pada memahami pola-pola logis atau numeris, dan kemampuan mengolah alur pemikiran yang panjang. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan berhitung, menalar dan berfikir logis, serta memecahkan masalah.

Pemahaman terhadap matematika meliputi beberapa konsep dasar yang saling berkaitan. Bagi anak usia dini, konsep-konsep matematika harus dijelaskan dengan cara yang konkrit dan adanya keterlibatan secara langsung. Konsep-konsep dasar yang dapat diajarkan pada anak usia dini meliputi: konsep mengurutkan, konsep geometri, konsep bilangan, konsep pola, konsep mencocokkan, konsep membandingkan, dan konsep klasifikasi.

### **3. Model Pembelajaran**

Konsep model pembelajaran menurut Trianto (2010: 51), model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.

Model pembelajaran yang dimaksud dalam model ini adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran, didalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media dan alat penilaian pembelajaran.

### **4. Media Pembelajaran untuk Anak Usia Dini**

Secara umum media pembelajaran memiliki kegunaan untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal (berbentuk kata-kata tertulis atau lisan), dan mampu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera, seperti objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan gambar atau model, lalu konsep yang terlalu luas dapat divisualisasikan dalam bentuk film atau gambar.

Proses pembelajaran harus memikirkan penggunaan media dengan baik agar pesan yang dibawa oleh media pembelajaran tersampaikan kepada anak sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik.

Menurut Musfiqon (2012) terdapat tiga prinsip yang menjadi rujukan guru memilih media pembelajaran yaitu:

- a. Prinsip Efektivitas dan Efisien. Efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan sedangkan efisien merupakan pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan biaya, waktu dan sumber daya lain seminimal mungkin.
- b. Prinsip Relevansi: media harus relevansi dengan tujuan, isi, strategi dan evaluasi serta disesuaikan dengan kondisi perkembangan dimasyarakat.
- c. Prinsip Produktifitas: produktifitas dalam memilih media pembelajaran dapat dipahami pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, semakin produktif

penggunaan media pembelajaran maka semakin tepat dan cepat tujuan pembelajaran tercapai.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan media hendaknya memperhatikan tujuan digunakannya media dan hasil seperti apa yang akan dicapai, media yang dipakai atau digunakan hendaknya mempunyai mutu yang baik, media yang akan digunakan seyogyanya sudah dikuasai oleh guru agar proses kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Perancangan media pembelajaran matematika untuk anak usia dini ini menerapkan sebuah metode pembelajaran dengan pendekatan melalui game. Game membantu anak dalam meningkatkan kecerdasan otak. Melalui media pembelajaran berbasis game, anak belajar konsep matematika dengan tanpa disadarinya.

##### **5. Game "SISOMAT" untuk Pembelajaran Matematika Anak Usia Dini**

Literasi skenario matematika (SISOMAT) adalah skenario pembelajaran matematika yang dikembangkan mulai dari pijakan lingkungan main, sebelum main, saat main dan setelah main yang bertujuan untuk menstimulasi kemampuan peserta didik dalam kemampuan bernalar yang logis dan kritis, mampu menggunakan fakta dan alat matematika dalam pemecahan masalah yang dihadapi sehari-hari.

Game "SISOMAT" merupakan *boardgame* yang efektif bagi anak-anak untuk belajar melalui bermain. Menurut Praktisi tumbuh kembang anak Lely Tobing (2008) mengatakan bahwa "*boardgame* mampu mengajarkan banyak hal. *Boardgame* juga dapat melatih konsentrasi dan daya ingat anak. Untuk anak usia sekolah, *boardgame* dapat melatih anak memecahkan masalah, berstrategi, serta berpikir kreatif dan kritis". Dengan media *board game* ada tiga aspek yang tercakup di dalamnya, yaitu aspek visual (gambar), audio (berdiskusi dan tanya jawab), serta afektif (sikap).

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Pendekatan Pengembangan**

Pengembangan model pembelajaran matematika untuk anak usia dini melalui game "Sisomat" bertujuan meningkatkan pengetahuan literasi matematika anak usia dini. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan metode *Research & Development* (Borg & Gall, 1983). Borg & Gall menyatakan bahwa *Research & Development* adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan model ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah produk model pembelajaran yang berupa game "Sisomat" yang dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika. Produk pengembangan dihasilkan dengan menggunakan beberapa metode yaitu metode deskriptif, evaluatif dan eksperimen. Metode penelitian deskriptif, digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada. Hal ini memungkinkan untuk mengetahui fakta dan permasalahan yang ada di lapangan. Metode evaluatif digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan karena sebuah produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi hasil dan proses. Dari hasil uji coba akan diketahui kelayakan dan keefektifan serta kekuatan dan kelemahan model sehingga dapat diambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki model.

Pengembangan model ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dalam pengembangan model dilakukan untuk mengukur kelayakan dan

keefektifan model dengan mengukur nilai pre-test dan pos-test kemampuan anak sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan game “Sisomat” sesuai dengan tema pembelajaran. Variabel tergantung dalam model ini adalah peningkatan kemampuan literasi matematika dan variabel bebas dalam model ini adalah game “Sisomat”. Sementara itu penggunaan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk melaksanakan studi pendahuluan dan pengkajian tentang manfaat dan pentingnya pengenalan literasi matematika untuk anak usia dini.

**2. Lokasi Pengembangan Model**

Study pendahuluan dilaksanakan di Kota Semarang, Kab. Kendal dan Kota Salatiga. Penetapan tiga lokasi tersebut didasarkan pada asumsi peneliti bahwa lokasi tersebut mendekati karakteristik yang tim pengembang butuhkan.

Ujicoba model dilaksanakan dua kali, yaitu ujicoba model konseptual di dua lokasi dan ujicoba operasional di tiga lokasi. Pemilihan lokasi didasarkan pada kelayakan hasil studi pendahuluan.

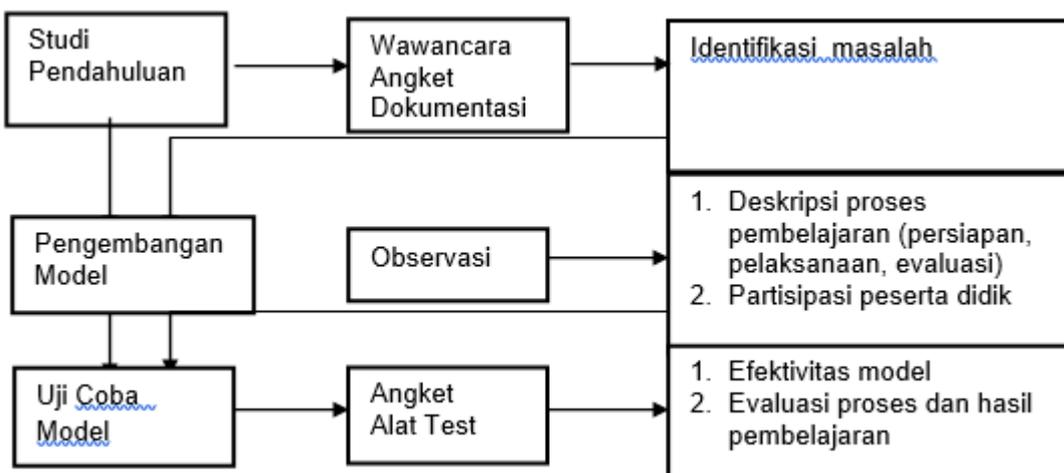
**3. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Validasi model konseptual dan perangkatnya dilakukan oleh *expert* atau praktisi dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD), instrumen yang digunakan adalah kuesioner.

Evaluasi proses dan hasil eksperimen menggunakan instrumen yang berupa angket (kuantitatif), wawancara, observasi partisipasi.

Uji keefektifan model bertujuan untuk mengetahui atau membuktikan apakah model mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Instrumen yang digunakan adalah angket (angket tes untuk mengetahui tambahan pengetahuan, dan angket non tes untuk mengetahui perubahan sikap).

Berikut bagan teknik pengumpulan data :



**Gambar 1. Bagan Teknik Pengumpulan Data Pengembangan Model**

**4. Subyek Pengembangan Model**

Subjek penelitian pengembangan dan ujicoba model ini adalah peserta didik di Satuan Pendidikan PAUD. Penetapan subyek penelitian dan pengembangan model ini didasarkan pada: a) Pendidik memahami konsep matematika anak usia dini, b) lembaga memiliki sarana dan prasarana yang mendukung model.

## 5. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang berbeda-beda tergantung jenis datanya, diantaranya:

- a. Analisis data untuk asesmen kebutuhan dengan diskriptif kuantitatif
- b. Analisis data untuk validasi draft model adalah diskriptif kualitatif
- c. Analisis data untuk uji coba model.

Untuk mengevaluasi proses dan hasil eksperimen yang dilakukan:

- a. Angket (kuantitatif), juga dilakukan triangulasi dengan wawancara dan observasi partisipan. Dianalisis dengan diskriptif kuantitatif
- b. Keefektifan model, instrumen yang digunakan adalah angket yang dibedakan dua yaitu angket tes (mengukur tambahan pengetahuan) dan angket non tes (terkait perubahan sikap). Pengukuran efektif tidaknya suatu model dilakukan dengan membandingkan rata-rata skor awal/ pre test dengan rata-rata skor akhir/ post tes, dan dihitung ada peningkatan berapa persen.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Data Hasil Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilaksanakan di PAUD Setya Bakti SPNF SKB Kota Semarang, KB/TK Real Fun Rainbow Kota Salatiga dan KB Janneta Kabupaten Kendal. Dari kegiatan studi pendahuluan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pendidik kurang memahami makna dan tujuan belajar matematika.
2. Masih menggunakan metode pembelajaran konvensional (menghafal angka, menjiplak dan menulis),
3. Kegiatan dan media yang digunakan dalam pembelajaran matematika belum bervariasi,
4. Anak diajari secara akademik, sedikit yang bersifat aplikatif sesuai dengan pengalaman di kehidupan sehari-hari
5. Belum semua guru paham tentang keberhasilan pembelajaran.
6. Orangtua menuntut bahwa anak lulus dari PAUD harus sudah pintar membaca, berhitung dan menulis.
7. Dalam pembelajaran matematika, sarana pembelajaran yang digunakan masih kurang baik jumlah maupun jenisnya.

### 2. Deskripsi Data Hasil FGD Penyusunan Draft Model

Hasil FGD Studi Pendahuluan dijadikan bahan untuk membuat draft model dengan tujuan agar tersusun model yang sesuai dengan kebutuhan lapangan dan hasil FGD. Beberapa hasil FGD draft model antara lain :

- a. Gambar dalam *boardgame* dibuat berwarna (warna primer)
- b. Gambar simbol digunakan benda konkrit
- c. Lebih baik diberikan mascot sisomat
- d. Setiap konsep, memiliki warna yang berbeda-beda
- e. Kartu : sisi belakang kartu gambarnya disamakan dengan dengan icon di *boardgame* dan sisi yang depan berisi perintah main.
- f. Ukuran kartu diperbesar lagi
- g. Setiap konsep memiliki 9 ragam main, terdiri dari 5 ragam main menggunakan kartu main dan 4 ragam main yang menampung kreatifitas guru

- h. Warna dasar masing-masing konsep : merah (Pola), kuning (geometri), biru (Perbandingan) dan hijau (seriasi)
- i. Tulisan konsep di masing-masing konsep (pola, geometri, perbandingan dan seriasi) ditulis di pinggir dan background putih
- j. Boardgame bisa dibongkar pasang menjadi 4 bagian
- k. Menggunakan bahasa matematika dilengkapi dengan benda konkritnya
- l. Dalam kartu menirukan gerak, konsep kinestetik dimasukkan

### **3. Deskripsi Data Hasil Validasi Draf Model**

Sebelum dilakukan uji coba terhadap model konseptual yang telah disusun, terlebih dahulu dilakukan validasi.

Beberapa hasil validasi Draf Model antara lain :

- a. Pada langkah main : Setelah kelompok memilih konsep main anak diminta melihat symbol yang ada dalam kartu konsep main dan Pengambilan kartu pertanyaan setelah dijawab, kartu ditempel di boardgame.
- b. Kartu bagian belakang diberikan gambar mascot dan gambar sama dengan di icon (mencocokkan)
- c. Dalam boardgame, pemilihan warna tidak membingungkan. Tulisan pola, geometri, dll berwarna netral (putih) dan background icon juga putih
- d. Teknik main sisomat untuk 4 konsep sama. Guru/pendamping dapat mengembangkan kreatifitas dalam menentukan ragam main lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi lokal yang ada (Ditambahkan di buku panduan). (Ciri sisomat)
- e. Dari perencanaan sampai evaluasi : Harus memuat 6 aspek pengembangan meskipun media game sisomat hanya fokus pada pengembangan kognitif matematika saja.

### **4. Deskripsi Data Hasil Uji coba Model Konseptual**

Kegiatan Uji coba konseptual dilaksanakan di KB/TK Rainbow Real Fun dan TK Jannatul Atfhah, diperoleh hasil sebagai berikut :

#### **a. Uji keterlaksanaan**

Dari 20 responden, yang menyatakan tentang kemudahan penggunaan atau penerapan media game sisomat, diperoleh bahwa : 10,42% pengguna menyatakan cukup, 69,17% pengguna menyatakan baik, dan 20,41% pengguna menyatakan baik sekali. Jumlah prosentase baik dan baik sekali adalah 89,58%, maka dapat disimpulkan bahwa media game sisomat mudah digunakan dan diterapkan untuk anak usia dini, khususnya usia 5-6 tahun.

#### **b. Aspek kelayakan materi/konsep**

Dari 20 responden yang menyatakan tentang kelayakan materi atau konsep dalam media game sisomat, diperoleh bahwa 6,7% menyatakan cukup, 68,30% menyatakan baik dan 25% menyatakan baik sekali.

Jumlah prosentase baik dan baik sekali adalah 93,3%, maka dapat disimpulkan bahwa media game sisomat layak untuk digunakan.

#### **c. Aspek kemenarikan model**

Dari 20 responden yang menyatakan kemenarikan media game sisomat, diperoleh bahwa 11,66% responden menyatakan cukup, 64,17% menyatakan baik dan 24,17% menyatakan baik sekali.

Jumlah prosentase baik dan baik sekali adalah 93,3%, maka dapat disimpulkan bahwa media game sisomat layak untuk digunakan.

#### d. Uji keefektifan

Uji keefektifan diketahui dengan cara mengukur perbedaan rata-rata nilai sebelum dan sesudah ujicoba dengan uji statistik uji t berpasangan (t-test dependen). Dari hasil uji statistik t-tes dengan SPSS 16, diperoleh nilai rata-rata (means) sebelum ujicoba adalah 1,9091 dan rata-rata (mean) setelah uji coba adalah 3,000. Artinya rata-rata (mean) peserta didik mengalami peningkatan sebesar 1,09091 setelah pembelajaran dengan menggunakan media game sisomat. Hasil t hitung sebesar 5,896 dengan sig 0,000. Karena sig 0,000 ( $\alpha < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata anak sebelum dan sesudah pembelajaran dengan media game sisomat. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pembelajaran dengan media game sisomat efektif untuk diterapkan.

### 5. Deskripsi Data Hasil Ujicoba Model Operasional

Uji coba operasional di tiga lokasi diperoleh hasil sebagai berikut :

#### a. Implementasi model

Hasil ujicoba operasional menunjukkan bahwa, model pembelajaran matematika untuk anak usia dini layak diimplementasikan karena memberikan banyak kemudahan dilihat dari aspek materi, kemudahan penggunaan dan kemenarikan media *game sisomat*. Hal tersebut disesuaikan dengan Standar Tingkat Perkembangan Anak (STPPA) tentang standar tumbuh kembang anak usia 5-6 tahun, pemilihan warna, bentuk, ragam main, tingkat kesulitan ragam main, dll.

#### b. Kelayakan media *game sisomat*

##### 1) Pendidik

Dari 26 responden, 62,3% responden menyatakan pemahaman guru tentang konsep matematika tergolong baik, 70,8%, 70% menyatakan penguasaan kelas guru tergolong baik, 70,8% menyatakan kesiapan mengajar guru tergolong baik, 66,9% menyatakan baik untu ketepatan penggunaan bahasa matematika dan 69,2% menyatakan baik untuk penjelasan permainan.

##### 2) Media *Game Sisomat*

Dari 26 responden, 73,8% responden menyatakan kandungan materi dalam media game sisomat tergolong baik, 71,5% menyatakan kemudahan penalaran media game sisomat tergolong baik, 78,5% menyatakan media game sisomat memiliki manfaat dalam pembelajaran dengan baik sekali, 74,6% menyatakan kemenarikan media game siomat tergolong baik, dan 73,8 menyatakan kesesuaian tahapan perkembangan anak tergolong baik.

##### 3) Peserta didik

Dari 26 responden diperoleh: antusiasme anak dalam bermain tergolong sangat baik (76,2%), kemampuan anak dalam bermain tergolong baik (67,7%), kemampuan anak mengikuti permainan tergolong baik (66,9%) dan perkembangan social emosional anak tergolong baik (70%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga aspek ukuran kelayakan model, yaitu aspek pendidik, media game sisomat dan peserta didik diperoleh hasil bahwa ketiganya

memiliki taraf kesiapan dan kelayakan yang baik untuk dimanfaatkan sebagai model pembelajaran untuk menstimulasi kecerdasan kognitif matematika anak usia dini (5-6 tahun).

#### **6. Efektifitas model Pembelajaran dengan media *game sisomat* dalam menstimulasi kecerdasan kognitif matematika anak usia dini 5 - 6 tahun.**

Uji efektifitas menggunakan analisis uji t berpasangan (*t test dependen*) dengan Uji Wilcoxon Signed Rank. Digunakan uji t berpasangan karena subjeknya sama tetapi dikenakan dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu sebelum dan sesudah pembelajaran matematika dengan media *game sisomat*. Kemudian dibandingkan nilai rata-rata subjek, apakah ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pembelajaran matematika dengan media *game sisomat*. Pengujian uji t menggunakan bantuan SPSS 16.

Kecerdasan kognitif matematika yang diukur dalam pembelajaran dengan media *game sisomat* meliputi literasi matematika, konsep pola, perbandingan, seriasi dan geometri, yang dirumuskan ke dalam kompetensi dasar (KD) enam aspek perkembangan, yaitu KD 2.13 (Nilai agama dan moral), KD 3.3 dan 4.3 (Fisik motorik), KD 2.2, 2.3, 3.5, 4.5, 3.6, 4.6 (kognitif), KD 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 3.13, 4.13 (Sosial emosional), KD 3.10, 4.10 (Bahasa) dan KD 3.15, 4.15 (seni).

Dari hasil analisis terhadap kompetensi dasar (KD) keenam aspek perkembangan tersebut, diperoleh adanya peningkatan nilai rata-rata setelah pembelajaran menggunakan media *sisomat*.

### **E. PEMBAHASAN**

Model Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Dini dengan Media *Game Sisomat* ini telah mengalami perkembangan menjadi lebih sempurna setelah pembahasan yang panjang melalui kegiatan FGD dan uji coba. Dari seluruh rangkaian pengembangan model, dapat disimpulkan bahwa media *game sisomat* sangat menarik, layak untuk diimplementasikan dan efektif untuk diterapkan untuk menstimulasi kemampuan kognitif matematika.

Media *game sisomat* merupakan media yang sangat menarik bagi anak, hal tersebut dibuktikan dengan antusias anak saat bermain, anak tidak mau berhenti bermain meskipun waktu untuk bermain sudah selesai. Media *game sisomat* sangat bermanfaat untuk menstimulasi kecerdasan kognitif matematika anak. Kecerdasan matematika yang dapat distimulasi dengan bermain *sisomat* diantaranya anak dapat mengenal berbagai konsep matematika yaitu konsep pola, perbandingan, seriasi (mengurutkan), geometri (pengenalan bangun datar dan ruang) dan sebagainya, serta anak diberikan stimulasi untuk belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah atau kegiatan anak sehari-hari.

Meskipun *game sisomat* hanya memuat empat konsep (pola, perbandingan, seriasi, dan geometri), akan tetapi beberapa konsep matematika yang lain seperti bilangan, pengelompokan dan mencocokkan juga dapat distimulasi dan ditingkatkan secara serta merta. Tujuan media *game sisomat* adalah untuk menstimulasi kecerdasan kognitif matematika, akan tetapi media *game sisomat* ini juga dapat dimanfaatkan untuk menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak (Nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni). Hal ini terlihat pada saat media ini diujicobakan, perkembangan fisik motorik anak dapat distimulasi dengan *game sisomat*, yaitu saat anak bermain dengan kartu yang tipis (motorik halus) dan saat anak bergerak pindah tempat dan mencari benda-benda di lingkungan sekitar sekolah sebagai bahan untuk bermain *game sisomat*.

Aspek sosial emosional yang dapat ditingkatkan adalah saat anak bermain bersama, menghadapi perbedaan pendapat, bergantian alat dan tempat bermain, sabar menunggu giliran, dll. Sedangkan aspek bahasa adalah saat anak selalu berkomunikasi, berdiskusi dengan teman satu kelompoknya dan pendidik, bertanya, bercerita, mengungkapkan pendapat atau gagasan, dll. Aspek kecerdasan seni yang dapat dikembangkan pada anak adalah pada saat anak menyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan tema dan konsep yang sedang dimainkan yang ada di media *game sisomat*. Bahkan aspek moral dan nilai-nilai agama juga dapat dikembangkan dengan mengenalkan dan menanamkan pada anak untuk selalu mencintai segala ciptaan Tuhan, diantaranya binatang dan tumbuhan (sebagaimana yang ada dalam media *game sisomat*).

Aspek penilaian yang kedua adalah tentang kelayakan model. Model pembelajaran matematika untuk anak usia dini dengan media *game sisomat* ini sangat layak untuk diterapkan, karena media *game sisomat* ini memiliki kemudahan-kemudahan dalam penggunaannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan ukuran boardgame *sisomat* yang cukup sesuai dengan jumlah anak dalam satu kelompok dan luas area yang dimiliki sekolah. Kualitas bahan boardgame *Sisomat* cukup kuat, tahan air dan dikemas sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana, dan aman untuk digunakan anak. Dalam *game sisomat* itu sendiri memiliki 36 ragam main yang terbagi menjadi empat konsep matematika yang jelas kandungan materi dan cara bermainnya, sehingga mampu membentuk pola pikir, bernalar, menjelaskan gagasan dan menggunakan benda-benda sekitar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari anak. Media *game sisomat* sangat bermanfaat dalam pembelajaran, karena sesuai dengan tahapan perkembangan anak sehingga anak mudah, mampu dan sangat antusias dalam bermain. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Piaget (Abidin Z., 2010) yang menyatakan bahwa permainan dengan menggunakan media dapat meningkatkan kreatifitas anak, mampu meningkatkan komunikasi sosial karena belajar dengan media membuat anak belajar dengan senang dan nyaman.

Aspek penilaian yang ketiga adalah tingkat keefektifan model. Model Pembelajaran matematika untuk anak usia dini dengan media *game sisomat* efektif untuk diterapkan, karena ada perbedaan rata-rata (mean) yang signifikan (berarti) antara sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan media *game sisomat*. Artinya ada peningkatan kecerdasan anak yang belajar dengan media *game sisomat* di enam aspek perkembangan khususnya di aspek perkembangan kognitif dan utamanya di kognitif matematika.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga aspek penilaian menyatakan, mudah dan layak diimplementasikan serta efektif meningkatkan kecerdasan kognitif matematika, maka model Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Dini dengan Media *Game Sisomat* layak diterapkan.

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Model Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Dini dengan Media *Game Sisomat* layak diimplementasikan karena memberikan banyak kemudahan baik dari aspek materi, kemudahan penggunaan dan kemenarikan media *game sisomat*.
- b. Model Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Dini dengan Media *Game Sisomat* layak diterapkan secara lebih luas.
- c. Model Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Dini dengan Media *Game Sisomat* efektif untuk diterapkan.

## 2. Saran

Untuk dapat mengimplementasikan model ini, diperlukan :

- a. Pendidik harus memiliki pemahaman konsep matematika yang baik dan benar
- b. Persiapan bahan untuk bermain anak
- c. Kreativitas guru/pendidik sangat penting agar mampu mengembangkan materi/konsep matematika yang disampaikan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan anak yang kreatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., 2010, *Teori Perkembangan Kognitif Piaget dan Implikasi dalam Pembelajaran Matematika (Online)*, [http://wordpress.com/Teori Piaget, Html](http://wordpress.com/Teori%20Piaget,Html) (01 Desember 2012)
- Borg, W.R and Gall, M.D., 1983, *Educational Research: An Introduction (4<sup>th</sup> Edition)*, New York, Longman.
- Gulo, W., 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Lely Tobing, 2008, *Cara Mudah Meningkatkan Kecerdasan Anak dan Memiliki Masa Depan Cerah*, WWW. adasatu.com
- Masni Dede, 2012, *Indahnya Bermain, Bermain Sambil Belajar, Anak Usia Emas Indonesia*, Yogyakarta, Media Pustaka.
- Musfiqon, 2012, *Pengembangan Media Belajar dan Sumber Media Pembelajaran*, Jakarta, Prestasi Pustakakarya.
- Ibid, 2009, *Mathematics Learning in Early Childhood, Paths Toward Excellence and Equity*, National Research Council.
- Sudaryanto, 1995, *Metode dan Teknik Pengumpulan Data*, Yogyakarta, Gajah Mada University press.

## MENUMBUHKAN JIWA BELA BANGSA ANAK USIA DINI BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER ERA GLOBALISASI

**Eem Kurniasih**

FKIP, Universitas Terbuka

email: ekurniasih@ecampus.ut.ac.id

### **Abstract**

*During the nation building era of globalization, the main functions include educating the nation, building awareness of defending the country and defending the state as human resources in the process of building a national personality and identity. The formulation of this research is how to grow the nation's defensive spirit in early childhood with character education in the era of globalization. The purpose of this study is to build a more advanced civilization that is able to form the soul of the nation's defending students, one of which is by character education.*

*This research method uses ex post facto. In the era of globalization, the main functions of education include educating the nation, building awareness of defending the country and defending the state as human resources in the process of national personality development and identity. Therefore, the development of national awareness and the attitude of defending the nation's soul needs to be instilled and grown since early childhood.*

*The conclusion of the study was after observing and learning characters for approximately 3 months. Early childhood has change behavior to be more loving Indonesian is an example of being able to mention products originating from Indonesia. It is the hope that early childhood in the future can compete with foreign countries in the era of that can threaten the existence and integrity of the Indonesian nation.*

**Keywords:** *Globalization Era, Nation Defending Soul, Character Education.*

### **Abstrak**

Pada masa pembangunan bangsa era globalisasi, fungsi utama pendidikan antara lain adalah mencerdaskan bangsa, pembangunan kesadaran bela negara dan sikap bela negara sebagai sumber daya manusia dalam proses pembangunan kepribadian nasional serta identitasnya. Rumusan dari penelitian ini yaitu bagaimana menumbuhkan jiwa bela bangsa pada anak usia dini dengan pendidikan karakter pada era globalisasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membangun peradaban yang lebih maju dengan disertai penanaman nilai-nilai yang mampu membentuk jiwa bela bangsa peserta didik salah satunya dengan pendidikan karakter.

Metode penelitian ini menggunakan *ex post facto*. Pada era globalisasi, fungsi utama pendidikan antara lain adalah mencerdaskan bangsa, pembangunan kesadaran bela negara dan sikap bela negara sebagai sumber daya manusia dalam proses pembangunan kepribadian nasioanal serta identitasnya. Oleh karena itu, pembangunan kesadaran nasional serta sikap jiwa bela negara perlu ditanamkan dan ditumbuhkan sejak anak usia dini.

Kesimpulan dari penelitian yaitu setelah dilakukan observasi dan pembelajaran karakter selama kurang lebih 3 bulan. Anak usia dini memiliki perubahan perilaku yaitu

lebih mencintai Indonesia sebagai contoh dapat menyebutkan produk-produk yang berasal dari Indonesia. Diharapkan anak usia dini pada masa mendatang dapat bersaing dengan negara asing dalam menghadapi era globalisasi yang dapat mengancam eksistensi dan integritas bangsa Indonesia.

**Kata kunci:** Era Globalisasi, Jiwa Bela Bangsa, Pendidikan Karakter.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pendidikan pada era globalisasi sekarang ini yaitu bertujuan untuk membangun peradaban yang lebih maju dengan disertai penanaman nilai-nilai yang mampu membentuk jiwa peserta didik salah satunya dengan pendidikan karakter sehingga peserta didik dapat berperilaku baik, memiliki sikap dan tindakan moral yang luhur, sopan, santun, serta mampu menunjukkan jati diri bangsanya untuk membela negara. Kebijakan untuk membela negara tercantum dalam Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Pada masa pembangunan bangsa era globalisasi, fungsi utama pendidikan antara lain adalah mencerdaskan bangsa, pembangunan kesadaran bela negara dan sikap bela negara sebagai sumber daya manusia dalam proses pembangunan kepribadian nasional serta identitasnya. Oleh karena itu, pembangunan kesadaran nasional dan sikap bela negara perlu ditanamkan dan ditumbuhkan sejak dini kepada seluruh warga negara Indonesia. Salah satu sarana untuk pembangunan sikap nasionalisme adalah melalui pendidikan. Dengan demikian kegiatan pendidikan nasional perlu diorganisasikan dan dikelola sedemikian rupa agar pendidikan nasional sebagai suatu organisasi merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia (H. A. R Tilaar, 2012: 107).

Menumbuhkan jiwa bela bangsa untuk anak usia dini dengan pendidikan karakter begitu penting karena kapasitas kecerdasan anak sejak usia dini memiliki keterbatasan. Hasil penelitian di bidang neurologi yang dilakukan Benjamin S. Bloom, seorang ahli pendidikan dari Universitas Chicago, Amerika Serikat (Diktentis, 2003: 1), mengemukakan bahwa pertumbuhan sel jaringan otak pada anak usia 0 – 4 tahun mencapai 50%, hingga usia 8 tahun mencapai 80%. Maka masa kanak-kanak dari usia 0 – 8 tahun disebut masa emas (golden age) yang hanya terjadi sekali dalam perkembangan kehidupan manusia sehingga sangatlah penting untuk merangsang pertumbuhan kecerdasan otak anak dengan memberikan perhatian terhadap kesehatan anak, penyediaan gizi yang cukup, dan pelayanan pendidikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menumbuhkan jiwa bela bangsa pada anak usia dini dengan pendidikan karakter pada era globalisasi sehingga anak usia dini diharapkan menjadi sadar akan bela negara dan membentuk sikap cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme sehingga pada masa datang dapat bersaing dengan negara asing dan menghadapi era globalisasi yang dapat mengancam eksistensi dan integritas bangsa Indonesia.

### 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah menumbuhkan jiwa bela bangsa pada anak usia dini dengan pendidikan karakter pada era globalisasi?
- b. Apakah tujuan menumbuhkan jiwa bela bangsa pada anak usia dini dengan pendidikan karakter pada era globalisasi?

## B. METODOLOGI

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### a) Lokasi

Lokasi penelitian di TK PGRI 73 Kalicari Semarang, tahun ajaran 2018/2019

#### b) Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober - Desember tahun ajaran 2018/2019 selama kurang lebih 3 bulan.

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas TK A di TK PGRI 73 Kalicari Semarang tahun ajaran 2018/2019.

### 3. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ex Post Facto*.

### 4. Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data, data berupa hasil observasi dalam bentuk angket kemudian dianalisis tentang perubahan sikap dan karakter anak usia dini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian berupa data kuantitatif dalam bentuk angket sebagai data pokok. Data tersebut memberi gambaran mengenai gejala perubahan mengenai jiwa bela bangsa pada anak usia dini.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Menumbuhkan Jiwa Bela Bangsa Pada Anak Usia Dini Dengan Pendidikan Karakter

#### a. Pengertian Bela Bangsa

Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha sadar dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme seolah-olah hak dan kewajiban untuk membela negara terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal, masalah membela negara dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Disamping itu, kegiatan bela negara tidak melulu berkaitan dengan fisik, perang, dan "memanggul senjata" tetapi mencakup semua kegiatan yang bersifat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Winarno (2013: 228) mengatakan bahwa pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan warga negara didasari pada kecintaan pada tanah air (wilayah nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai Dasar Negara dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar dan berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelaan negara adalah sikap dan tekad dari warga negara Indonesia yang menyeluruh dan terpadu untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kehidupan bangsa dan negara.

#### b. Anak Usia Dini

Menurut Priyanto, Aris (2014: 42) definisi anak usia dini yang dikemukakan oleh NAEYC (*National Assosiation Education for Young Chlidren*) adalah sekelompok individu yang be-

rada pada rentang usia antara 0 – 8 tahun. Anak usia dini merupakan sekelompok manusia yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada usia tersebut para ahli menyebutnya sebagai masa emas (*Golden Age*) yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu diarahkan pada fisik, kognitif, sosio emosional, bahasa, dan kreativitas yang seimbang sebagai peletak dasar yang tepat guna pembentukan pribadi yang utuh.

Adapun Hurlock dalam Priyanto, Aris (2014: 42) masa anak usia dini dimulai setelah bayi yang penuh dengan ketergantungan, yaitu kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual. Ia memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa serta akan berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya.

c. Pendidikan Karakter

Menurut Kurniawaty (2011 : 7) pendidikan karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, kepada Tuhan YME, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berakhlak. Sedangkan konsep pendidikan karakter berikutnya digagas oleh Thomas Lickona dalam Suyanto, Slamet (2012: 3), yang menyatakan bahwa karakter yang baik meliputi memahami, peduli, dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai etika dasar. Pendidikan karakter memiliki peran membantu peserta didik dan komunitas sekolah untuk memahami nilai-nilai yang baik dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan kepada peserta didik sejak usia dini agar terbawa hingga mereka dewasa.

Dari beberapa pendapat tentang pendidikan karakter dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan dasar dalam membangun sikap religius, membantu sesama manusia dan mencintai lingkungan. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam pendidikan karakter dapat ditanamkan kepada peserta didik sejak usia dini sehingga menjadi bekal pada saat dewasa.

d. Menumbuhkan Jiwa Bela Bangsa AUD dengan Pendidikan Karakter di Era Globalisasi

Memiliki jiwa bela bangsa sangat penting pada setiap warga negara khususnya pada anak usia dini karena sebagai bekal dalam menghadapi era globalisasi yang dapat mengancam eksistensi dan integritas bangsa Indonesia. Terdapat 18 nilai pendidikan karakter yang dapat ditanamkan kepada anak usia dini dalam upaya menumbuhkan jiwa bela bangsa sehingga anak usia dini memiliki tekad, sikap dan perilaku berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang rela berkorban demi kelangsungan hidup bangsa dan memiliki jiwa cinta tanah air.

Anak usia dini harus memiliki sikap jiwa bela negara agar pada masa mendatang dapat membela kepentingan nasional pada seluruh aspek kehidupan nasional, hal ini memberikan kejelasan bahwa bela negara tidak hubungan dengan kepentingan militer semata, tetapi kepentingan seluruh bangsa yang konsekuen dengan cita-citanya pada saat ingin mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Wujud dari usaha bela bangsa bagi anak usia dini adalah kesiapan dan kerelaan anak usia dini di masa yang akan datang untuk berkorban demi bangsa dan negara. Bela bangsa merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia sebagai mana tercantum dalam Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 UUD 1945.

2. Tujuan menumbuhkan Jiwa Bela Bangsa Anak Usia Dini Berbasis Pendidikan Karakter pada Era Globalisasi

Tujuan Pendidikan Bela Negara tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3 UU No. 20 tahun 2003) Diselenggarakannya Pendidikan Bela Negara ini tidak lepas dari tujuan yang hendaknya dicapai yaitu untuk menghadapi era globalisasi yang dapat mengancam eksistensi dan integritas bangsa Indonesia, yaitu dengan mendapatkan pendidikan bela negara manusia Indonesia diharapkan akan dapat menjadi manusia yang berkualitas, yakni manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan di masa depan yang dapat menjamin tetap tegaknya identitas dan integritas bangsa (Subagyo dkk, 2004: 38)

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari menumbuh kembangkan jiwa bela bangsa anak usia dini dengan pendidikan karakter pada era globalisasi yakni membentuk generasi bangsa atau anak usia dini agar sadar akan perannya sebagai tunas bangsa di masa yang akan datang, mengenal dan mencintai tanah air dan mempunyai rasa bangga dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

#### D. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Jiwa bela bangsa yang ditanamkan bagi anak usia dini berbasis pendidikan karakter yang berisi 18 nilai karakter dapat mempersiapkan anak usia dini dalam menghadapi era globalisasi dan dapat mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Memiliki jiwa bela bangsa sangat penting pada setiap warga negara khususnya pada anak usia dini karena sebagai bekal dalam menghadapi era globalisasi yang dapat mengancam eksistensi dan integritas bangsa Indonesia.
- c. Pendidikan karakter pada era globalisasi sekarang ini bertujuan untuk membangun peradaban yang lebih maju dan penanaman nilai-nilai yang mampu membentuk jiwa anak usia dini sehingga dapat berperilaku baik, memiliki sikap dan tindakan moral yang luhur, sopan, santun, serta mampu menunjukkan jati diri bangsanya untuk membela negara.

##### 2. Saran

- a. Pada era globalisasi dapat mengancam eksistensi dan integritas bangsa Indonesia sebaiknya anak usia dini diberi bekal dalam sikap bela bangsa agar kelak dapat mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.
- b. Guru dan orang tua seharusnya saling membimbing dalam menumbuh kembangkan jiwa bela bangsa pada anak usia dini sehingga dapat berperilaku baik dan mampu menunjukkan jati diri bangsanya untuk membela negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aris, P 2014, 'Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Bermain', *Jurnal Ilmiah Guru "COPE"*, vol. 1, no. 02, hh. 42-46.

- Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional 2010, *Pedoman Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Darmadi, H 2010, *Kemampuan Dasar Mengajar*, Alfabeta, Bandung.
- Direktorat Tenaga Teknis 2003, *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 0 – 6 Tahun*, Ditjen PLSP – Depdiknas, Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini 2011, *Pedoman Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta.
- Hidayatul, F 2017, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Bela Negara Di TK Garuda VI Medari Sleman Yogyakarta*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kurniawaty & Aries, S 2011, *Pengembangan Karakter Anak Usia Dini di Lembaga PAUD*, Litbang RA Istiqlal, Jakarta.
- Subagyo 2004, *Pendidikan Bela Negara*, UNY Press, Yogyakarta.
- Suyanto, S 2005, *Konsep dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta.
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, R 2012, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan sebagai Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Winarno 2013, *Dasar-Dasar Pembelajaran Pendidikan Taman Kanak-Kanak*, Kencana, Jakarta.

## EFEKTIVITAS DAN PERANAN HIMPAUDI DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL PENDIDIK PAUD

**Sutarmin**

Penilik PAUD, UPT Dikdas dan LS Kecamatan Teras  
Kabupaten Boyolali.

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan: (1) Seberapa besar efektivitas Himpaudi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD?; (2) Seberapa besar peranan Himpaudi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD?. Jenis penelitian adalah deskriptif. Subjek penelitian adalah pendidik PAUD yang menjadi anggota Himpaudi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Jumlah sampel penelitian sebanyak 35 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Organisasi Himpaudi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali cukup efektif dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional bagi pendidik PAUD di wilayahnya; (2) Organisasi Himpaudi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali telah melaksanakan peranan yang cukup baik dalam meningkatkan kompetensi profesional kepada pendidik PAUD di wilayahnya.*

**Kata kunci:** efektivitas, HIMPAUDI, profesional pendidik PAUD.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Salah satu komponen utama yang menentukan keberhasilan pendidikan adalah guru (pendidik). Peran guru sangat menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Keberhasilan guru (pendidik) dalam melaksanakan proses pembelajaran ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki guru dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Guru (pendidik) yang memiliki kompetensi sebagai pendidik akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembelajaran dibanding dengan guru yang tidak memiliki kompetensi. Keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, usaha meningkatkan kualitas pendidikan harus dimulai dari peningkatan kualitas guru (pendidik).

Guru (pendidik) yang berkualitas adalah guru (pendidik) yang profesional dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Guru (pendidik) yang profesional mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran, serta menilai hasil pembelajaran. Untuk itu seorang guru (pendidik) yang profesional harus menguasai bahan ajar, memahami karakteristik peserta didik, terampil dalam memilih metode pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran.

Dengan tidak bermaksud mengesampingkan kompetensi yang lain, makalah ini hanya akan membahas dan membahas peningkatan kompetensi profesional pendidikan yang dikaitkan dengan keberadaan Himpaudi.

Salah satu agen pembaharu dalam upaya peningkatan profesional pendidik, khususnya pendidikan PAUD adalah Himpaudi. Sebagai wadah organisasi para pendidik di lingkungan PAUD, Himpaudi memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD. Himpaudi dapat menjadi ajang komunikasi, bertukar pikiran dan pengalaman para pendidik PAUD dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya. Hal ini mengingat salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh pendidik PAUD adalah kompetensi profesional.

Peningkatan kompetensi profesional bagi pendidik sangat penting dilakukan, karena usia dini merupakan masa emas perkembangan. Pada masa itu terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan anak yang tidak terjadi pada periode berikutnya. Para ahli menyebutnya sebagai usia emas perkembangan (*golden age*). Untuk melejitkan potensi perkembangan tersebut, setiap anak membutuhkan asupan gizi seimbang, perlindungan kesehatan, asuhan penuh kasih sayang, dan rangsangan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan masing-masing anak. Pemberian rangsangan pendidikan dapat dilakukan sejak lahir, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Rangsangan pendidikan ini hendaknya dilakukan secara berharap, berulang, konsisten, dan tuntas, sehingga memiliki daya ubah (manfaat) bagi anak (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, 2010: 1).

Mengingat pentingnya PAUD sebagai dasar pendidikan selanjutnya, maka pendidik PAUD perlu terus meningkatkan kompetensi profesionalnya, sehingga kualitas anak didik PAUD dapat dibanggakan oleh semua pihak.

Untuk meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD, maka keberadaan Himpaudi di tiap tingkatan baik pusat sampai kecamatan memiliki posisi strategis, karena Himpaudi dapat merupakan motor penggerak bagi kemajuan PAUD yang ada di wilayahnya masing-masing.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Seberapa besar efektivitas Himpaudi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD?
- b. Seberapa besar peranan Himpaudi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sejak dini mendorong munculnya berbagai ragam layanan program PAUD, seperti Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman kanak-kanan (TK) dan Satuan PAUD Sejenis (SPD) (Dinas Pendidikan, 2010a: 1). Dinas Pendidikan (2010b: 1) juga menambahkan bahwa program PAUD telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Secara kuantitas, hal ini dapat dilihat dari pertambahan jumlah lembaga PAUD Non Formal yang ada di masyarakat. Sedangkan secara kualitas, sudah banyak pelatihan yang diadakan guna menunjang penyempurnaan kegiatan belajar mengajar yang ada.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan keniscayaan. Pasalnya, perkembangan otak pada usia dini tersebut (0-6 tahun) mengalami percepatan hingga 80% dari keseluruhan otak orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh potensi dan kecerdasan serta dasar-dasar perilaku seseorang telah mulai terbentuk pada usia tersebut. Sedemikian pentingnya masa itu sehingga usia dini sering disebut dengan *the golden age* (usia emas). Atas dasar ini disimpulkan bahwa untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak dini. Dan satu-satunya cara untuk memulai adalah dengan menyelenggarakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Suyadi, 2011: 3).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan ruhani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal (Hasan, 2010: 15).

Lembaga pendidikan yang melayani atau mendidik anak mulai usia 0 tahun sebelum masuk TK adalah Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Pengasuhan Anak (TPA). KB menerima anak didik mulai dari 3-4 tahun, sedangkan TPA menerima anak usia 0-3 tahun. Dengan demikian keberadaan PAUD dapat melayani kebutuhan edukasi anak sejak 0 tahun. Tentu pendidikan yang diselenggarakan kepada kedua lembaga tersebut tidak sama dengan TK, baik kurikulum maupun waktu pelayanannya. Jika TK menggunakan kurikulum baku yang disahkan resmi oleh Dikdasmen, maka KB dan TPA tidak menggunakan kurikulum baku. Muatan kurikulum yang digunakan pada lembaga non-formal (KB) dan lembaga in-formal (TPA) ini lebih banyak stimulasi melalui permainan (Suyadi, 2011: 4).

Pada jalur nonformal dan informal, dikenal PAUDNI yaitu Pendidikan Anak Usia Dini Non-formal dan Informal, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), POS PAUD ataupun Satuan PAUD Sejenis (SPS). Berbagai bentuk PAUDNI seperti ini memiliki peranan yang sangat penting bagi upaya peletakan dasar bagi pendidikan selanjutnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hasan (2010: 15-16) bahwa PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke beberapa arah: (1) Pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar); (2) Kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual); (3) Sosioemosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, yang disesuaikan dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini (Hasan, 2010:15-16).

## **2. Kompetensi Profesional Pendidik dan Kualitas PAUD**

Istilah kompetensi mempunyai banyak makna, dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut Kunandar (2007: 52) kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga dia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Pengertian kompetensi ini, jika digabungkan dengan sebuah profesi yaitu guru atau tenaga pengajar, maka kompetensi guru mengandung arti kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak atau kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya (Usman, 2005: 14). Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi, pengertian kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.

Sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru tanggal 4 Mei 2007, dijelaskan bahwa setiap guru PAUD/TK/RA harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam (Niam, 2006: 199).

Kompetensi profesional perlu dikedepankan oleh pendidik, karena kompetensi ini berkaitan langsung dengan profesi atau keahlian mendidik peserta didik. Namun demikian, bukan berarti kompetensi yang lain tidak penting. Seluruh kompetensi harus dimiliki oleh pendidik, hanya saja dalam tulisan ini penulis hanya membahas peningkatan kompetensi profesional.

Khusus yang berkaitan dengan kompetensi profesional, maka setiap guru PAUD/TK/RA harus menguasai hal-hal sebagai berikut:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, meliputi: (1) Menguasai konsep dasar matematika, sains, bahasa, pengetahuan sosial, agama, seni, pendidikan jasmani, kesehatan dan gizi sebagai sarana pengembangan untuk setiap bidang pengembangan anak TK/PAUD; (2) Menguasai penggunaan berbagai alat permainan untuk mengembangkan aspek fisik, kognitif, sosial-emosional, nilai moral, sosial budaya, dan bahasa anak TK/PAUD; (3) Menguasai berbagai permainan anak.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu, meliputi: (1) Memahami kemampuan anak TK/PAUD dalam setiap bidang pengembangan; (2) Memahami kemajuan anak dalam setiap bidang pengembangan di TK/PAUD; (3) Memahami tujuan setiap kegiatan pengembangan.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, meliputi: (1) Memilih materi bidang pengembangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; (2) Mengolah materi bidang pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, meliputi: (1) Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus; (2) Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan; (3) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan; (4) Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri, meliputi: (1) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi; (2) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

### **3. Efektivitas HIMPAUDI dan Kompetensi Profesional Pendidik PAUD**

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya pada pasal 42 ayat (1) dijelaskan bahwa pendidik harus

memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut pendidik harus memiliki kompetensi minimum.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU ini menyatakan bahwa pendidikan terdiri dari anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang keseluruhannya merupakan kesatuan yang sistemik. Artinya pendidikan harus dimulai dari usia dini, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dengan demikian, PAUD dilakukan sebelum jenjang pendidikan dasar (Suyadi, 2011: 5). Sedangkan pada Anggaran Dasar Himpaudi, pendidik anak usia dini adalah tenaga yang berperan sebagaipamong, fasilitator, pembimbing, dan menjadi panutan bagi anak usia dini. Pendidik bagi anak usia dini disebut pendidik (guru). Kemudian Tenaga Kependidikan adalah pengelola, pakar, praktisi yang menangani program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dengan adanya Himpaudi diharapkan dapat mendorong upaya peningkatan kompetensi profesional pendidik PUAD, karena sesuai Anggaran Dasar Himpaudi maksud, tujuan dan fungsi Himpaudi adalah sebagai berikut. Maksud Himpaudi adalah menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usiadini Indonesia agar bersama-sama dapat berusaha secara berdayagunaan berhasil guna (pasal 8). Tujuan Himpaudi adalah menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia (Pasal 9). Fungsi Himpaudi berfungsi sebagai wadah untuk: (1) Mempersatukan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini; (2) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini; (3) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagipendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini (Pasal 10).

Organisasi Himpaudi dapat dikatakan efektif apabila organisasi ini mampu memanfaatkan potensinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bernard mengatakan kekayaan atau potensi suatu organisasi adalah: (1) organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan yang dicapai lewat proses kesadaran, kesengajaan, dan koordinasi yang ber sasaran; (2) organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang untuk melaksanakan kegiatan yang ber sasaran tersebut; (3) organisasi memerlukan adanya komunikasi, yakni suatu hasrat dari sebagian anggotanya untuk mengambil bagian pencapaian tujuan bersama anggota lainnya. Dalam hal ini Bernard menekankan peranan seseorang dalam organisasi, diantaranya ada sebagian anggota yang harus diberi informasi atau dimotivasi, dan sebagian lainnya yang harus membuat keputusan (Thoha, 2003: 114).

Sebagai sebuah organisasi, Himpaudi akan efektif apabila ia mampu menggunakan potensi yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui: (1) melakukan serangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya yang dilandasi oleh kesadaran (kebutuhan), kesengajaan (rencana yang matang), dan koordinasi yang baik; (2) pengurus mampu mendorong seluruh anggota organisasi untuk berperan aktif melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan; (3) pengurus melakukan komunikasi intensif dan timbal balik dengan seluruh anggotanya.

#### **4. Peranan HIMPAUDI Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Pendidik PAUD**

Peranan himpaudi merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau keberadaannya sebagai sebuah organisasi. Oleh karena itu, Himpaudi dapat menjalankan peranannya apabila dirinya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2003:

243), yang meliputi: (1) peranan organisasi yang berkaitan dengan norma yang dihubungkan dengan posisi kedudukan organisasi Himpaudi pada tingkat nasional hingga kecamatan; (2) peranan yang berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan oleh organisasi Himpaudi di tengah masyarakat; (3) peranan yang berkaitan dengan perilaku organisasi yang penting bagi struktur masyarakat di mana organisasi Himpaudi tersebut berada.

Himpaudi sebagai wahana komunikasi dan forum pembelajaran, dapat dimanfaatkan sebagai upaya peningkatan kompetensi profesional bagi para anggotanya (pendidik PAUD). Oleh karena itu, aktivitas Himpaudi perlu direncanakan, diorganisir, dikoordinir, dan dievaluasi secara bertahap agar efektif untuk meningkatkan kompetensi profesional bagi pendidik PAUD.

Sebagai wadah pendidik PAUD, Himpaudi dapat mengambil peran secara dinamis, inovatif dan kooperatif dalam meningkatkan kompetensi profesional bagi pendidik PAUD melalui hal-hal berikut ini.

**a. Peningkatan Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu bagi pendidik PAUD**

Pendidik PAUD dikatakan mampu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu apabila ia: (a) Menguasai konsep dasar matematika, sains, bahasa, pengetahuan sosial, agama, seni, pendidikan jasmani, kesehatan dan gizi sebagai sarana pengembangan untuk setiap bidang pengembangan anak TK/PAUD; (b) Menguasai penggunaan berbagai alat permainan untuk mengembangkan aspek fisik, kognitif, sosial-emosional, nilai moral, sosial budaya, dan bahasa anak TK/PAUD; (c) Menguasai berbagai permainan anak.

Untuk itu, Himpaudi perlu mendorong para anggotanya untuk selalu meningkatkan pendidikan formal maupun mengikuti kursus atau pelatihan. Selain sebagai motivator, Himpaudi juga dapat menjadi fasilitator penyelenggaraan kursus atau pelatihan yang terkait, dan juga dapat menjadi mediator penyelenggaraan pendidikan formal dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang sesuai demi peningkatan kemampuan pendidik PAUD.

**b. Peningkatan Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu pendidik PAUD**

Pendidik PAUD dikatakan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu apabila ia: (a) Memahami kemampuan anak TK/PAUD dalam setiap bidang pengembangan; (b) Memahami kemajuan anak dalam setiap bidang pengembangan di TK/PAUD; (c) Memahami tujuan setiap kegiatan pengembangan.

Untuk itu, Himpaudi perlu mengupayakan adanya standarisasi pelaksanaan dan format evaluasi pembelajaran yang dapat dijadikan pegangan bagi pendidik PAUD dalam melakukan penilaian kepada peserta didik. Hal ini mengingat setiap PAUD dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran belum memiliki pedoman atau indikator yang jelas dan rinci.

**c. Pengembangan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif oleh pendidik PAUD**

Pendidik PAUD dikatakan mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, apabila ia mampu: (a) Memilih materi bidang pengembangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; (b) Mengolah materi bidang pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Untuk itu, Himpaudi perlu meningkatkan kreativitas para pendidik PAUD dalam melaksanakan pembelajaran, dengan cara memberikan pelatihan atau outbond. Selain itu, Himpaudi dapat menyelenggarakan pelatihan psikologi dengan menghadirkan nara sumber

dari ahli psikologi (psikolog), sehingga pendidik PAUD memiliki kepribadian yang kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik

**d. Pengembangan keprofesionalan pendidik PAUD secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif**

Pendidik PAUD dikatakan mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, apabila ia mampu: (a) Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus; (b) Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan; (c) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan; (d) Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.

Untuk itu, Himpaudi perlu menjadi wahana untuk meningkatkan komunikasi, interaksi dan ajang diskusi bagi para pendidik PAUD untuk dapat bertukar pikiran dan pengalaman. Selain itu, Himpaudi dapat menjembatani penyelenggaraan supervisi, yaitu dengan memanfaatkan pendidik yang telah senior dan berpengalaman, untuk memberikan supervisi dan bimbingan kepada pendidikan junior serta belum berpengalaman.

**e. Peningkatan kemampuan pendidik PAUD dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri**

Pendidik PAUD dapat dikatakan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri, apabila ia, mampu: (a) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi; (b) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Untuk itu, Himpaudi perlu menyelenggarakan pelatihan keterampilan komputer bagi pendidik PAUD dengan cara bekerjasama dengan instansi/lembaga kursus komputer atau perguruan tinggi komputer, sehingga para pendidik PAUD melek teknologi. Dengan melek teknologi, maka pendidik PAUD dapat memanfaatkan informasi atau internet sebagai bahan/materi pembelajaran, maupun menggunakan komputer sebagai media atau alat peraga pembelajaran, serta untuk meningkatkan kelancaran dalam menyusun rencana, laporan pembelajaran, dan pelaksanaan administrasi PAUD.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena ditujukan untuk mengetahui secara lebih mendalam suatu variabel tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain" (Sugiyono, 2005: 11).

#### 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Objek penelitiannya adalah Pendidik PAUD yang menjadi anggota Himpaudi Kecamatan Teras baik laki-laki maupun perempuan. Waktu penelitian adalah bulan Januari 2016.

#### 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan "keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian" (Arikunto, 2006: 65). Populasi dalam penelitian ini adalah pendidik PAUD yang menjadi anggota Himpaudi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali yang berjumlah 65 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel purposif (*purposive sampling*). Hal ini dikarenakan responden yang akan diteliti sudah ditentukan berdasarkan atas kriteria tertentu (Sugiyono, 2005 :67). Dengan demikian, sampel penelitian ini adalah pendidik PAUD yang telah menjadi anggota Himpaudi.

"Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi yang karakteristiknya hendak diseleksi dengan menggunakan cara-cara tertentu" (Arikunto, 2006 : 65). Dengan demikian, sampel adalah sebagian pendidik PAUD yang dijadikan sampel. Jumlah sampel penelitian adalah 35 orang atau sebanyak 53,8% dari jumlah populasi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah: (1) kuesioner. Arikunto (2006: 124) menjelaskan bahwa angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atas hal-hal yang diketahui. Untuk keperluan analisis, maka daftar pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan alternatif jawaban yang dikelompokkan berdasarkan skala Likert, dan masing-masing alternatif jawaban diberikan skor, yaitu sangat sesuai diberi angka 5, sesuai diberi angka 4, kurang sesuai diberi angka 3, tidak sesuai diberi angka 2, dan sangat tidak sesuai diberi angka 1; (2) Dokumentasi yaitu memanfaatkan data-data yang ada di lokasi penelitian, buku literatur dan internet.

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara lebih terinci tentang efektivitas dan peranan Himpaudi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan kompetensi profesional Pendidik PAUD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka data angket akan dianalisis dengan rumus persentase sebagai berikut ini.

$$S (\%) = \frac{SR}{SI} \times 100\%$$

Keterangan:

S (%)	=	Skor Persentase
SR	=	Skor Riil
SI	=	Skor Ideal

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Efektivitas dan Peranan Himpaudi dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Pendidik PAUD Secara Umum

Jumlah item yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan peranan Himpaudi seluruhnya berjumlah 23 item. Kemudian masing-masing item memiliki 5 alternatif jawaban yang memiliki nilai berkisar 1 sampai 5 seperti yang telah ditentukan dalam kuesioner. Dengan demikian, apabila responden menjawab setiap item pertanyaan dengan jawaban "sangat sesuai", maka yang bersangkutan akan mendapatkan skor sebanyak  $23 \times 5 = 115$ . Sedangkan apabila responden menjawab setiap item pertanyaan dengan jawaban "sangat tidak sesuai", maka yang bersangkutan akan mendapatkan skor sejumlah  $23 \times 1 = 23$ .

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa skor rata-rata responden adalah 84,63. Hal ini apabila dibandingkan dengan nilai skor ideal, maka skor rata-rata responden adalah  $= 84,63/115 \times 100\% = 73,59\%$  dari tingkat ideal yang diharapkan.

Menurut Umar Husein (2003 : 201) untuk memperjelas kategori-kategori dari skor penelitian, maka dapat digunakan rumus untuk mencari rentang skala (RS) sebagai berikut :

$$SR = (m-n) / b$$

di mana :

- m = skor tertinggi yang mungkin
- n = skor terendah yang mungkin
- b = jumlah kelas

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa skor tertinggi yang mungkin adalah 115 dan terendah 23. Dari skor ini kemudian akan dikelompokkan menjadi 3 kategori atau kelas yaitu tinggi, sedang, dan rendah dengan perhitungan sebagai berikut ini.

Nilai tertinggi – nilai terendah

$$\begin{aligned} & 3 \\ = & (115 - 23) / 3 \\ = & 30,67 \end{aligned}$$

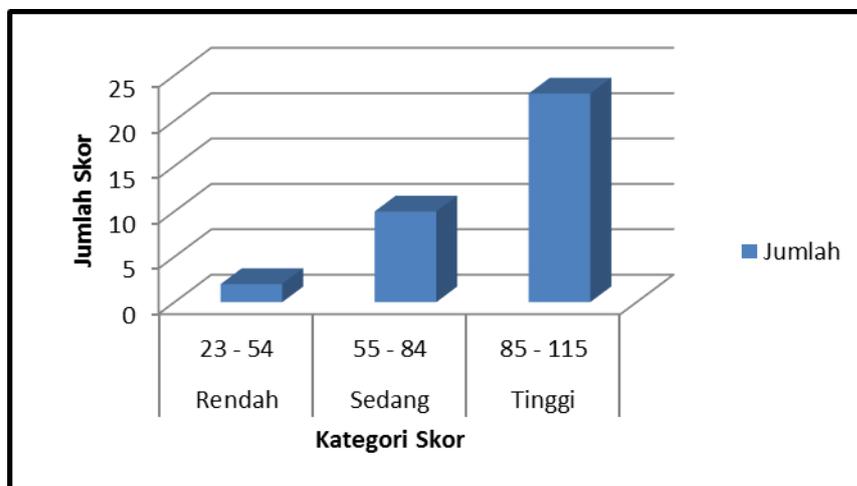
Dengan demikian, skor data penelitian dapat dikelompokkan, yaitu :

- Rendah = Skor 23 sampai dengan 23+ 30,67 = 53,67 dibulatkan 54
- Sedang = Skor 55 sampai dengan 53,67 + 30,67 = 84,33 dibulatkan 84
- Tinggi = Skor 85 sampai dengan 115

Dari patokan tersebut kemudian masing-masing skor data penelitian dapat dikategorikan seperti pada tabel dan grafik di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Distribusi Frekuensi Efektivitas dan Peranan Himpaudi Kecamatan Teras Secara Umum**

Kategori	Skor	Jml	%
Rendah	23 - 54	2	5.71
Sedang	55 - 84	10	28.57
Tinggi	85 - 115	23	65.71
Jumlah		35	100.00



**Gambar 1**

**Grafik Distribusi Frekuensi Efektivitas dan Peranan Himpaudi Kecamatan Teras Secara Umum**

Dari tabel dan grafik tersebut di atas diketahui bahwa dari 35 responden ada 2 responden (5,71%) menilai bahwa efektivitas dan peranan Himpaudi Kecamatan Teras dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD adalah rendah, 10 responden (28,57%) menilai bahwa efektivitas dan peranan Himpaudi Kecamatan Teras dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD adalah sedang, dan 23 responden (65,71%) menilai bahwa efektivitas dan peranan Himpaudi Kecamatan Teras dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD adalah tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagian besar pendidik PAUD menilai bahwa Himpaudi Kecamatan Teras menunjukkan efektivitas dan peranan yang tinggi dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD.

**2. Efektivitas Himpaudi dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Pendidik PAUD**

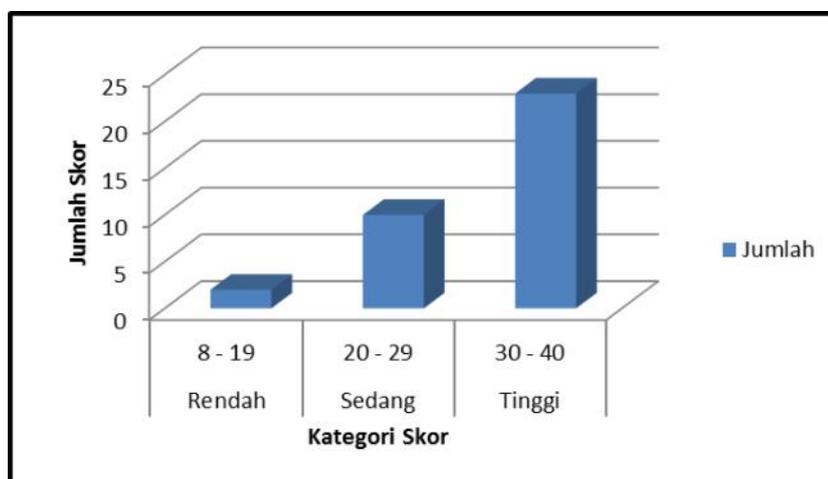
Jumlah item yang digunakan untuk mengukur efektivitas Himpaudi berjumlah 8 item. Kemudian masing-masing item memiliki 5 alternatif jawaban yang memiliki nilai berkisar 1 sampai 5 seperti yang telah ditentukan dalam kuesioner. Dengan demikian, apabila responden menjawab setiap item pertanyaan dengan jawaban “sangat sesuai”, maka yang bersangkutan akan mendapatkan skor sebanyak  $8 \times 5 = 40$ . Sedangkan apabila responden menjawab setiap item pertanyaan dengan jawaban “sangat tidak sesuai”, maka yang bersangkutan akan mendapatkan skor sejumlah  $8 \times 1 = 8$ .

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa skor rata-rata responden adalah 29,63. Hal ini apabila dibandingkan dengan nilai skor ideal, maka skor rata-rata responden adalah  $= 29,63/40 \times 100\% = 74,08\%$  dari tingkat ideal yang diharapkan.

Kemudian berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh Umar Husein seperti di atas, maka skor efektivitas Himpaudi tersebut dapat dikelompokkan seperti tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2  
Distribusi Frekuensi Efektivitas Himpaudi Kecamatan Teras

Kategori	Skor	Jml	%
Rendah	8 - 19	2	5.71
Sedang	20 - 29	10	28.57
Tinggi	30 - 40	23	65.71
Jumlah		35	100



Gambar 2  
Grafik Distribusi Frekuensi Efektivitas Himpaudi Kecamatan Teras

Pada tabel dan grafik di atas diketahui bahwa dari 35 responden, ada 2 responden (5,71%) menilai bahwa efektivitas Himpauldi Kecamatan Teras dalam meningkatkan kompetensi professional pendidik PAUD adalah rendah, ada 10 responden (28,57%) menilai bahwa efektivitas Himpauldi Kecamatan Teras dalam meningkatkan kompetensi professional pendidik PAUD adalah sedang, ada 23 responden (65,71%) menilai bahwa efektivitas Himpauldi Kecamatan Teras dalam meningkatkan kompetensi professional pendidik PAUD adalah tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagian besar pendidik PAUD menilai bahwa Himpauldi Kecamatan Teras menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka organisasi Himpauldi Kecamatan Teras cukup efektif, karena organisasi tersebut mampu memanfaatkan potensinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah organisasi, Himpauldi Kecamatan Teras telah menggunakan potensi yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui: (1) melakukan serangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya yang dilandasi oleh kesadaran (kebutuhan), kesengajaan (rencana yang matang), dan koordinasi yang baik; (2) pengurus mampu mendorong seluruh anggota organisasi untuk berperan aktif melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan; (3) pengurus melakukan komunikasi intensif dan timbal balik dengan seluruh anggotanya.

### 3. Peranan Himpauldi dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Pendidik PAUD

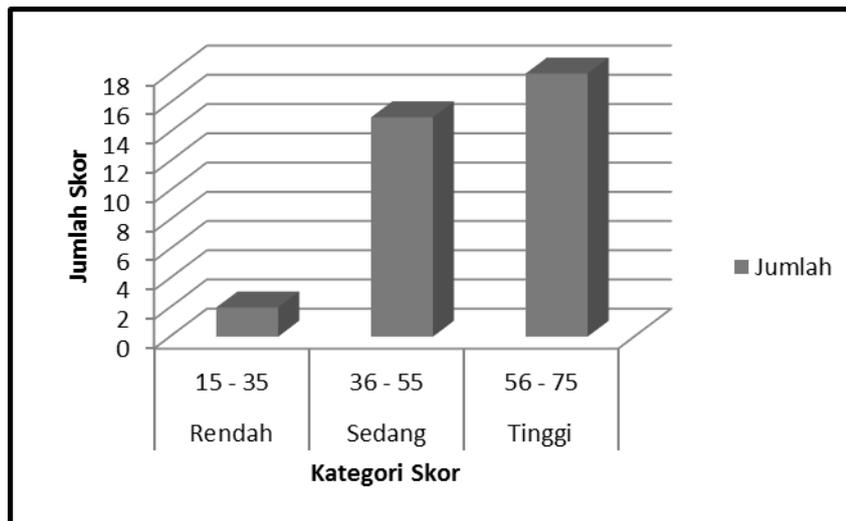
Jumlah item yang digunakan untuk mengukur peranan Himpauldi berjumlah 15 item. Kemudian masing-masing item memiliki 5 alternatif jawaban yang memiliki nilai berkisar 1 sampai 5 seperti yang telah ditentukan dalam kuesioner. Dengan demikian, apabila responden menjawab setiap item pertanyaan dengan jawaban "sangat sesuai", maka yang bersangkutan akan mendapatkan skor sebanyak  $15 \times 5 = 75$ . Sedangkan apabila responden menjawab setiap item pertanyaan dengan jawaban "sangat tidak sesuai", maka yang bersangkutan akan mendapatkan skor sejumlah  $15 \times 1 = 15$ .

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa skor rata-rata responden adalah 55. Hal ini apabila dibandingkan dengan nilai skor ideal, maka skor rata-rata responden adalah  $= 55 / 75 \times 100\% = 73,33\%$  dari tingkat ideal yang diharapkan.

Kemudian berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh Umar Husein seperti di atas, maka skor peranan Himpauldi tersebut dapat dikelompokkan seperti tabel dan grafik di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Distribusi Frekuensi Peranan Himpauldi Kecamatan Teras**

Kategori	Skor	Jml	%
Rendah	15 - 35	2	5.71
Sedang	36 - 55	15	42.86
Tinggi	56 - 75	18	51.43
Jumlah		35	100



Gambar 3

Grafik Distribusi Frekuensi Peranan Himpaudi Kecamatan Teras

Pada tabel dan grafik di atas diketahui bahwa dari 35 responden, ada 2 responden (5,71%) menilai bahwa peranan Himpaudi Kecamatan Teras dalam meningkatkan kompetensi professional pendidik PAUD adalah rendah, ada 15 responden (42,86%) menilai bahwa peranan Himpaudi Kecamatan Teras dalam meningkatkan kompetensi professional pendidik PAUD adalah sedang, ada 18 responden (51,43%) menilai bahwa peranan Himpaudi Kecamatan Teras dalam meningkatkan kompetensi professional pendidik PAUD adalah tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagian besar pendidik PAUD menilai bahwa Himpaudi Kecamatan Teras telah menjalankan peranan yang tinggi (baik) dalam meningkatkan kompetensi professional pendidik PAUD.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka Himpaudi Kecamatan Teras telah menjalankan peranannya dengan baik, karena dirinya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, yang meliputi: (1) peranan organisasi yang berkaitan dengan norma yang dihubungkan dengan posisi kedudukan organisasi Himpaudi pada tingkat kecamatan sebagai kepanjangan tangan Himpaudi pusat; (2) peranan yang berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan oleh organisasi Himpaudi di tengah masyarakat; (3) peranan yang berkaitan dengan perilaku organisasi yang penting bagi struktur masyarakat di mana organisasi Himpaudi tersebut berada.

Dengan demikian, Himpaudi Kecamatan Teras sebagai wahana komunikasi dan forum pembelajaran, dapat dimanfaatkan oleh pengurus sebagai upaya peningkatan kompetensi profesional bagi para anggotanya (pendidik PAUD). Sebagai wadah pendidik PAUD, Himpaudi Kecamatan Teras dapat mengambil peran secara dinamis, inovatif dan kooperatif dalam meningkatkan kompetensi profesional bagi pendidik PAUD di wilayah Kecamatan Teras.

## V. PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Organisasi Himpaudi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali cukup efektif dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional bagi pendidik PAUD di wilayahnya; (2) Organisasi Himpaudi Kecamatan

Teras Kabupaten Boyolali telah melaksanakan peranan yang cukup baik dalam meningkatkan kompetensi profesional kepada pendidik PAUD di wilayahnya.

## 2. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini dapat disampaikan beberapa saran, yaitu: (1) Himpaudi dari tingkat pusat hingga kecamatan perlu terus melakukan konsolidasi dan koordinasi agar sepak terjangnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan PAUD dapat efektif; (2) Efektivitas Himpaudi akan tercapai apabila organisasi tersebut dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk mencapai maksud, tujuan dan fungsi Himpaudi seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar organisasi; (3) Himpaudi memiliki peranan penting apabila keberadaan organisasi ini dapat bermanfaat bagi anggota, masyarakat dan negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas, (2002). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Buku 1 – Buku 3, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- Dinas Pendidikan, (2010a). *Pedoman Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak*. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Non Formal dan PT.
- \_\_\_\_\_ (2010b). *Pedoman Administrasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Non Formal (TPA, KB, SPS/POS PAUD/TPQ)*. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Non Formal dan PT.
- Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, (2010). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan POS PAUD*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian pendidikan Nasional.
- Hasan, Maimunah, (2010). *PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)*. Jogjakarta. DIVA Press.
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*. Cetakan ke-1. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Niam, A. (2006). *Membangun Profesionalitas Guru*. Cetakan ke-1. Jakarta : eLSAS.
- Sugiyono, (2005). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono, (2003). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyadi, (2011). *Manajemen PAUD TPA-KB-TK/RA*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah, (2003). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Moh. Uzer, (2005). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



## STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN VISA DAN PEMBELAJARAN PRAKTEK PADA PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA PROGRAM APLIKASI PERKANTORAN

**Heru Priambodo, Tatiek Dyah Wardani, Khozin Dwiono**

Pamong Belajar PP Paud dan Dikmas Jawa Tengah

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelompok yang menggunakan metode VISA dan kelompok yang menggunakan metode praktek pada program pendidikan kecakapan kerja (PKK) kursus aplikasi perkantoran 2) mendeskripsikan besarnya jumlah peserta didik yang menggunakan metode VISA dapat lolos uji kompetensi yang diselenggarakan di LSK-TIK; dan 3) mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran pada pendidikan kecakapan kerja program aplikasi perkantoran.*

*Jenis penelitian ini adalah eksperimen murni, dengan menggunakan desain penelitian matching pretest-posttest comparison. Sumber data penelitian ini terdiri dari peserta didik program aplikasi perkantoran dari satuan pendidikan LKP dan PKBM yang menerima dana bansos PKK tahun 2018. Populasi dari penelitian ini adalah semua LKP dan PKBM yang menyelenggarakan program PKK aplikasi perkantoran. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah 30 orang peserta didik program PKK pada LKP Global Inspira Klaten, PKBM Pioneer Karanganyar dan LKP MS komputer Tegal, namun diakhir penelitian ini tersisa 17.*

*Hasil dari penelitian ini adalah 1) metode pembelajaran VISA lebih mudah dipahami dan mampu meningkatkan kompetensi peserta didik dibandingkan dengan metode belajar praktek dimana  $t$  hitung sebesar 0,043 lebih kecil dari nilai sig. 0,05; 2) Tingkat kelulusan mencapai 65 % lebih tinggi dari pencapaian nasional yang hanya mencapai 5% dengan demikian pembelajaran dengan menggunakan metode belajar visa dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik pendidikan kecakapan kerja program aplikasi perkantoran; 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran program aplikasi perkantoran adalah kualitas inputan yang kurang baik, pergantian peserta, mentalitas dan tanggung jawab peserta yang rendah, tidak adanya seleksi, pembelajaran yang tidak sesuai dengan jadwal, satuan pendidikan fokus pada penyaluran pekerjaan bukan pada uji kompetensi, instruktur kurang memahami terhadap metode pembelajaran yang tepat, kurang kreatif dan belum kompeten, jeda belajar yang terlalu lama, latihan yang tidak dikerjakan secara tuntas, susunan bahan ajar yang kurang sempurna dilihat dari urutan dan contoh-contoh latihan, kurangnya variasi, aplikasi yang kurang up to date, TUK yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai standar LSK, spesifikasi alat dan perangkat lunak yang tidak sama.*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat merekomendasikan metode pembelajaran VISA dapat digunakan untuk meningkatkan penguasaan kompetensi peserta didik program aplikasi perkantoran.*

**Kata kunci :** *Studi komparasi, Metode Belajar VISA, Metode Belajar Praktek, Aplikasi Perkantoran, Pendidikan Kecakapan kerja*

### **A. Pendahuluan**

#### **Latar belakang**

Uji kompetensi merupakan penjaminan mutu terhadap lulusan satuan pendidikan, oleh lembaga yang berkekuatan hukum. Uji kompetensi dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencari pekerjaan. Jika kompetensinya diakui oleh lembaga yang sudah terlegitimasi, diharapkan akan lebih mudah diterima oleh dunia usaha dan dunia industri.

Data awal yang berhasil dihimpun oleh peneliti sejauh ini ditemukan permasalahan bahwa lulusan peserta didik yang mengikuti uji kompetensi pada LSK TIK pada satuan pendidikan

masih rendah yaitu hanya sebesar 5%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kelulusan uji kompetensi yaitu dari peserta didik, pelaksanaan uji kompetensi dan proses pembelajaran yang dilaksanakan di LKP.

Pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan di LKP pada program kursus komputer masih banyak kelemahan. Proses kegiatan belajar hanya mengacu kepada praktek ketrampilan. Perbandingannya adalah 30% teori dan 70% praktek. Namun demikian ada beberapa kelemahan 1) LKP tidak memiliki standar yang jelas dalam pelaksanaan prosedur (perencanaan) dan pelaksanaan pembelajarannya; 2) Hampir semua kegiatan pembelajaran diserahkan kepada kreativitas instruktur atau pendidiknya saja; 3) pengembangan penalaran berpikir kurang ditonjolkan karena hanya bertumpu pada praktek saja 4) dalam pembelajaran aplikasi perkantoran peserta didik kurang berlatih dalam menjalankan fungsi *tool* karena harus mengetik tugas yang akan dikerjakan untuk berlatih. Sehingga hasilnya kurang maksimal dimana tingkat kelulusan saat uji kompetensi di LSK-TIK hanya sebesar 5%.

Dari permasalahan tersebut kemudian dipilih metode pembelajaran yang tidak hanya menekankan metode praktek yang terstruktur tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir logis, peserta didik dengan memanfaatkan indera penglihatan, pendengaran dan latihan-latihan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan pada kursus aplikasi perkantoran. Metode belajar yang digunakan adalah metode belajar VISA yaitu metode belajar yang diadaptasi dari metode belajar SAVI (Somatis Auditori Visual dan Intelektual) merupakan suatu model pembelajaran yang menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indranya dalam proses pembelajaran namun mengedepankan visual baru kemudian intelektual, somatik dan auditori. (Hendratet, 2018). Metode pembelajaran VISA ini dapat diterapkan untuk pembelajaran keterampilan-keterampilan praktis dengan latihan berulang-ulang kepada peserta didik.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelompok yang menggunakan metode VISA dan kelompok yang menggunakan metode praktek pada kursus aplikasi perkantoran?
2. Seberapa besar jumlah peserta didik yang menggunakan metode VISA dapat lolos uji kompetensi yang diselenggarakan di LSK-TIK ?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran pendidikan kecakapan kerja pada program aplikasi perkantoran?

### **Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelompok yang menggunakan metode VISA dan kelompok yang menggunakan metode praktek pada program pendidikan kecakapan kerja kursus aplikasi perkantoran.
2. Mendeskripsikan besarnya jumlah peserta didik yang menggunakan metode VISA dapat lolos uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK-TIK.
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran pada pendidikan kecakapan kerja program aplikasi perkantoran.

### **Manfaat**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga kursus, pemerintah dan masyarakat.

1. Bagi Direktorat Kursus dan Pelatihan

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi direktorat kursus dan pelatihan dalam memperbaiki metode pembelajaran pendidikan kecakapan kerja aplikasi perkantoran.

2. Bagi PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kebijakan kepada direktorat kursus dan pelatihan untuk perbaikan program pendidikan kecakapan kerja di masa yang akan datang.

3. Bagi Lembaga Kursus

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pemilihan model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan.

## B. Hasil dan Pembahasan

Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain. Macam-macam penelitian komparasi

1. Penelitian Non-hipotesis

Dalam penelitian non-hipotesis peneliti mengadakan komparasi fenomena dengan standarnya. Tentu saja penentuan standar ini harus dilakukan berdasarkan landasan yang kuat misalnya hukum, peraturan, hasil lokakarya, dan sebagainya. Selanjutnya standar ini dijadikan sejauh mana fenomena mencapai standar.

2. Penelitian Berhipotesis

Penelitian yang sebelum dilaksanakan sudah mempunyai perkiraan jawaban/hipotesis.

Pada penelitian komparatif data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung (lewat). Peneliti mengambil satu atau lebih akibat (sebagai *dependent variables*) dan menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling hubungan dan maknanya.

Program kursus aplikasi perkantoran adalah program kursus komputer yang diperuntukan khusus untuk pekerjaan di kantor. Aplikasi Perkantoran terdiri dari Pengolah Kata (*wordprocessing*), Pengolah Angka ( *Spreadsheet* ), Pengolah Data (*Database*), Presentasi (*Presentation*) serta Piranti Lunak Browser dan Email. Tujuan program kursus aplikasi perkantoran adalah untuk mempersiapkan, mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mendayagunakan infrastruktur informasi dan komunikasi, agar terampil sebagai operator aplikasi komputer dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Peserta yang menyelesaikan pelatihan kemudian akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan, berupa Sertifikasi Komputer Literasi (*Computer Literate Certified Professional/ CLCP*) sebagai bentuk pengakuan keahlian secara nasional dan internasional di bidang Operator Komputer Aplikasi Perkantoran. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yg telah diverifikasi oleh LSK.

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang sesuai dengan peluang kerja. Lulusan program PKK dapat bekerja pada perusahaan, industri manufaktur, industri jasa, industri rumahan (home industry) atau industri lainnya.

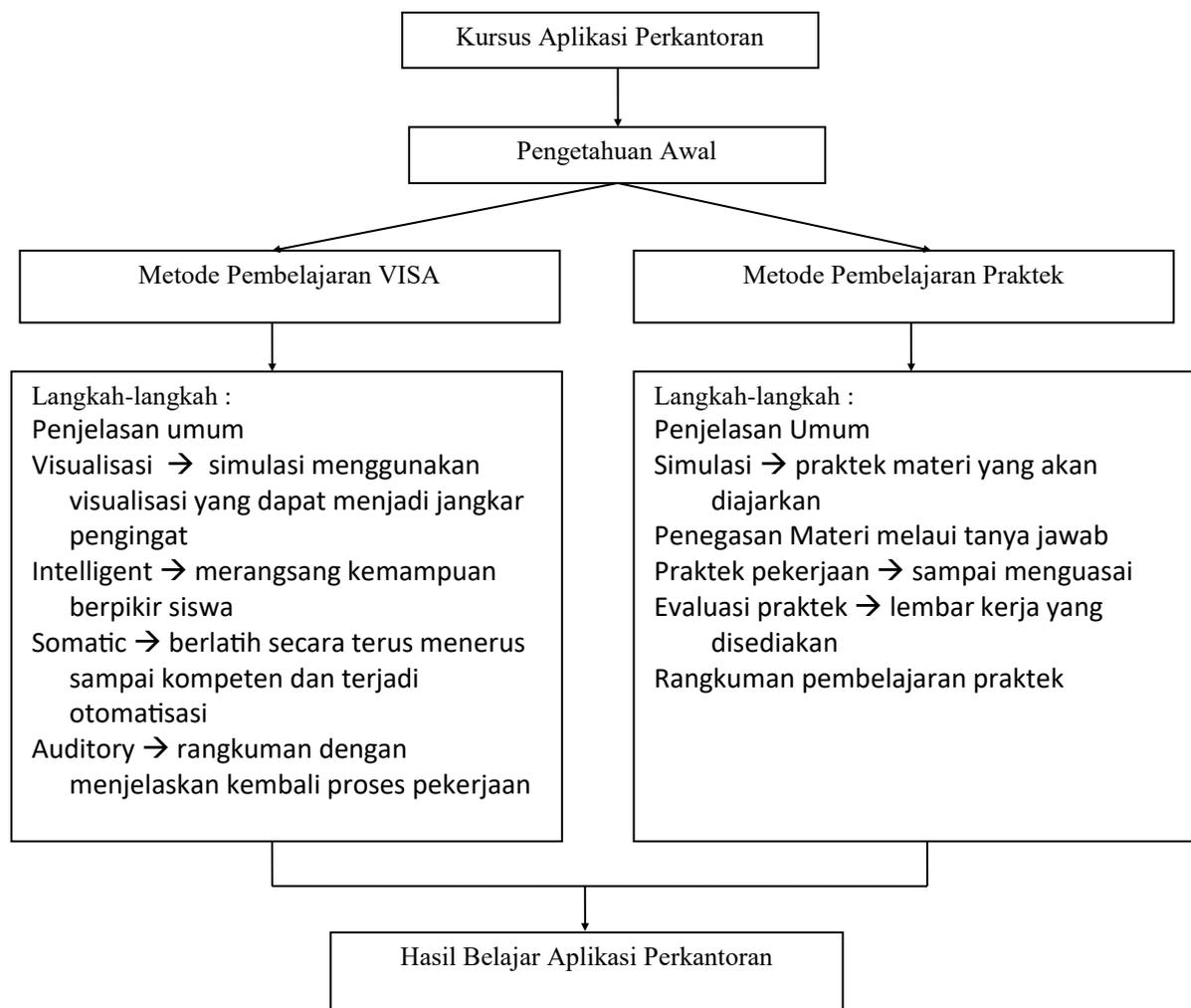
Metode belajar VISA menurut Hendratet (2018) adalah metode belajar yang diadaptasi dari metode belajar SAVI (Somatis Auditori Visual dan Intelektual) merupakan suatu model pembelajaran yang menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indranya dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran VISA (Visual, Intelektual, Somatis dan Auditori) lebih mendepankan Visual dahulu kemudian diikuti dengan Intelektual, Somatic dan Auditori. Tujuan Pembelajaran VISA menciptakan pembelajaran yang lebih mudah, lebih cepat menguasai materi dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga hasil dari pembelajaran akan lebih optimal. Metode pembelajaran VISA melibatkan semua unsur panca indera untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami, berbagai materi dengan melibatkan atau merangsang intelegensi peserta didik, bahwa pemahaman konsep bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dengan melibatkan unsur-unsur visual, ditemukan aktivitasnya di keseharian peserta didik yang mudah dipahami oleh peserta didik. Peserta didik mencari tahu bukan diberi tahu dengan cara mengamati, menalar, merumuskan, menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Kemudian peserta didik diminta untuk berlatih secara berulang-ulang sampai kompeten dengan latihan yang disediakan.

Metode Pembelajaran Praktek (MPP) adalah sebuah metode pembelajaran dimana peserta didik melaksanakan kegiatan latihan atau praktek agar memiliki ketegasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari teori yang telah dipelajari. Praktek merupakan upaya untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pengalaman langsung. Ide dasar belajar berdasarkan pengalaman mendorong peserta didik untuk merefleksi atau melihat kembali pengalaman-pengalaman yang pernah mereka alami. Selama praktek, peserta didik diharapkan mampu melihat, mengamati, memahami, membandingkan dan memecahkan suatu masalah saat kegiatan praktek dilaksanakan. Metode pembelajaran praktek merupakan upaya untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pengalaman langsung. Ide dasar belajar berdasarkan pengalaman mendorong peserta didik untuk merefleksi atau melihat kembali pengalaman-pengalaman yang pernah mereka alami. Saat ini untuk program-program kursus, metode inilah yang paling banyak digunakan.

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan. Hasil belajar mencakup tiga ranah yaitu afektif, psikomotor, dan kognitif. Ketiga ranah tersebut tidak bisa dititikberatkan hanya pada satu ranah saja, namun harus dilihat secara keseluruhan dan dinilai mulai dari proses sampai hasil pekerjaan selama dan sesudah uji kompetensi.

Terdapat perbedaaan langkah dalam penggunaan metode belajar VISA dan metode pembelajaran praktek.

Seperti terlihat dalam chart di bawah ini:



**Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian**

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini ada 2 rumusan, yaitu sebagai berikut:

- a.  $H_0$  = Tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang nyata antara kelompok yang menggunakan metode pembelajaran VISA dan metode pembelajaran Praktek pada Kursus Aplikasi Perkantoran .
- b.  $H_1$  = Terdapat perbedaan hasil belajar yang nyata antara kelompok yang menggunakan metode pembelajaran VISA dan metode pembelajaran Praktek pada Kursus Aplikasi Perkantoran .

Jenis penelitian ini adalah komparasi dengan menggunakan penelitian eksperimen murni. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dengan rancangan penelitian di mana kedua kelas sampel diberi perlakuan berbeda. Pada kelas sampel pertama (kelas eksperimen ) peserta didik belajar dengan menggunakan metode belajar VISA dan pada kelompok kontrol peserta didik belajar dengan menggunakan metode belajar praktek yang pada umumnya digunakan oleh satuan pendidikan untuk membelajarkan kursus aplikasi perkantoran.

Desain penelitian yang digunakan adalah *matching pretest-posttest comparison group design*. Menurut Sukmadinata (2010: 208) *matching pretest-posttest comparison group design* ini di dalamnya terdapat dua kelompok yang akan di beri perlakuan dan kemudian di beri posttest. Untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara dua kelompok tersebut dilakukan pretest terlebih dahulu. Desain penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Desain Penelitian

Kelas	Pre Test	Perlakuan	Post Test
Kelompok Eksperimen	O1	X1	O2
Kelompok Kontrol	O3	X2	O4

Keterangan :

- X1 = Pembelajaran dengan Metode Belajar VISA  
 X2 = Pembelajaran dengan Metode Belajar Praktek  
 O1 = Pretest untuk kelompok Eksperimen  
 O2 = posttest untuk kelompok Eksperimen  
 O3 = pretest untuk kelompok kontrol  
 O4 = posttest untuk Kelompok Kontrol

### Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 3 lokasi LKP dan PKBM di Jawa Tengah.

Kelompok Eksperimen = PKBM Pioneer kabupaten Karanganyar

LKP Global Inspira kabupaten Klaten

Kelompok Kontrol = LKP MS Komputer kabupaten Tegal

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh LKP dan PKBM yang menyelenggarakan Pendidikan Kecakapan Kerja program Aplikasi perkantoran. Sampel penelitian ini adalah peserta program PKK di LKP Global Inspira, PKBM Pioneer dan LKP MS Komputer. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *cluster random sampling*, menurut Winarni (2011: 106) teknik *cluster random sampling* digunakan jika dijumpai populasi yang heterogen dimana sub populasi merupakan suatu kelompok yang mempunyai sifat heterogen, sedangkan dalam stratifikasi sampel tiap sub populasinya homogen. Pada awal penelitian jumlah sampel sebanyak 30 orang, namun dalam perjalanannya berkurang sehingga di akhir penelitian tersisa 17 orang.

### Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

#### 1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran melalui metode pembelajaran VISA dan metode pembelajaran praktek.

Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar pembelajaran program aplikasi perkantoran. Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah nilai hasil post-test yang diselenggarakan oleh LSK-TIK.

#### 2. Defenisi Operasional

- a) Kursus aplikasi perkantoran adalah program kursus komputer yang diperuntukan khusus untuk pekerjaan di kantor. Aplikasi Perkantoran terdiri dari Pengolah Kata (*wordprocessing*), Pengolah Angka (*Spreadsheet*), Pengolah Data (*Database*), Presentasi (*Presentation*) serta Piranti Lunak Browser dan Email.
- b) Metode belajar VISA merupakan suatu model pembelajaran yang menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua inderanya dalam proses pembelajaran.

- c) Metode Pembelajaran Praktek (MPP) adalah sebuah metode pembelajaran dimana peserta didik melaksanakan kegiatan latihan atau praktek agar memiliki ketegasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari teori yang telah dipelajari.
- d) Hasil belajar yang diteliti berupa hasil belajar, afektif, psikomotor dan kognitif. Penelitian ini adalah mengukur tingkat pencapaian belajar peserta didik berupa skor atau nilai yang diperoleh berdasarkan tes hasil belajar aspek kognitif, nilai hasil pengamatan peserta didik aspek afektif (menerima, mengelola dan menghayati) dan nilai hasil pengamatan peserta didik aspek psikomotor (pengalamiahan, memanipulasi dan artikulasi).

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal-soal uji kompetensi yang dikeluarkan oleh LSK-TIK untuk mengukur tingkat kompetensi peserta didik program aplikasi perkantoran. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik (pretest) hanya digunakan soal MS Word dengan menggunakan soal latihan uji kompetensi kode soal WP 006. Sedangkan untuk posttest menggunakan soal uji kompetensi dari LSK-TIK yang hanya diketahui dan diterbitkan oleh LSK-TIK saat akan melakukan uji kompetensi (pada saat benar-benar tes ujikompetensi).

Tes uji kompetensi berupa penugasan yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk membuat produk office tertentu dengan 3 komponen yaitu wordprocessing, spreadsheet dan presentation. Seorang peserta didik dikatakan kompeten (CLCP) jika dapat mencapai passing grade 85% dengan standar penilaian yang ditentukan oleh LSK-TIK.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui tes dan non tes yaitu dokumentasi.

#### **1. Tes**

Tes dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang terdiri dari penilaian pretest dan posttest.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi yang diambil dalam penelitian selama proses pembelajaran dengan menggunakan catatan instruktur selama menggunakan metode belajar VISA untuk membelajarkan kursus aplikasi perkantoran pada kelas eksperimen dan metode pembelajaran praktek pada kelas kontrol.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji perbedaan dua rata-rata (uji t), yang bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan antara hasil belajar antara kelompok yang menggunakan metode pembelajaran VISA dan metode pembelajaran praktek.

### **Pengukuran Kemampuan Awal (pretest)**

Pengukuran kemampuan awal digunakan untuk memastikan bahwa setiap peserta memiliki kemampuan yang sama sebelum dilakukan treatment pembelajaran.

Hasil uji normalitas data terhadap 2 kelas dimana kelas A adalah kelas eksperimen yang menggunakan metode pembelajaran VISA dan kelas B adalah kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran praktek, dengan menggunakan Shapiro Wilk hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 2. Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kelas A	,328	10	,003	,782	10	,009
Kelas B	,227	10	,153	,843	10	,047

a. Lilliefors Significance Correction

Dasar pengambilan keputusan :

- Jika nilai signifikansi  $>0.05$ , maka data penelitian berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi  $<0,05$ , maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas data adalah tidak berdistribusi normal karena nilai sig. di bawah 0,05.

Untuk mengetahui bahwa kedua kelompok kelas memiliki kompetensi yang sama digunakan uji t dengan non parameterik mann-withney.

Hasil dari uji t adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Ranks**

	Kelas	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Hasil Ujian Word	kelas A	18	14,58	262,50
	Kelas B	10	14,35	143,50
	Total	28		

**Tabel 4. Test Statistics<sup>a</sup>**

	Hasil Ujian Word
Mann-Whitney U	88,500
Wilcoxon W	143,500
Z	-,075
Asymp. Sig. (2-tailed)	,940
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,944 <sup>b</sup>
Exact Sig. (2-tailed)	,954
Exact Sig. (1-tailed)	,479
Point Probability	,016

Dasar pengambilan keputusan adalah :

- Jika nilai sig. (2-tailed) $<0,05$ , maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B.
- Jika nilai sig. (2-tailed) $>0,05$ , maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B.

Nilai t yang diperoleh dari perhitungan menggunakan bantuan SPSS adalah 0,954 lebih besar dari nilai sig. 0,05 sehingga dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Artinya kemampuan awal dari 2 kelompok tersebut adalah sama.

#### **Pengukuran kemampuan akhir (posttest)**

Setelah dilakukan treatment terhadap kelompok eksperimen dengan menggunakan metode pembelajaran VISA, sedangkan untuk kelompok kontrol diperlakukan dengan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran praktek kedua kelompok diberikan test uji kompetensi untuk mengetahui kemampuan akhir (posttest).

Hasil tes uji kompetensi terhadap 2 kelompok tersebut di atas adalah sebagai berikut ini:

#### **1. Kelompok Eksperimen**

Tabel 5. Hasil Uji Kompetensi Kelompok Eksperimen

NO	NAMA	NILAI			Rata-Rata	STATUS
		WORD	EXCEL	PPT		
1	Oi Rendha Hari Kresna	90	93,5	88	90,50	Kompeten
2	Lilik Setyo Nugroho	76,75	90	85	83,92	Blm Kompeten
3	Sigit Marwanto	88	94	88	90,00	Kompeten
4	Dyah Purwaningsih	90,75	97	91	92,92	Kompeten
5	Khoirunisa Nur fadila	93	97	86	92,00	Kompeten
6	Akhih Nuryati	83	92,5	84	86,50	Blm Kompeten
7	Antoni Seiyawan	84,75	91,5	83	86,42	Blm Kompeten
8	Sri Pujiani	98	98	90	95,33	Kompeten
Rerata					89,70	Kompeten 63%

## 2. Kelompok Kontrol

Tabel 6. Hasil Uji Kompetensi Kelompok Kontrol

NO	NAMA	NILAI			Rata-Rata	STATUS
		WORD	EXCEL	PPT		
1	Dian	88	93	82	87,67	blm kompeten
2	Lisnawati	68	93	96	85,67	blm kompeten
3	Raihan	85,7	23	54	54,23	blm kompeten
4	Mohamad N	71	95	79	81,67	blm kompeten
5	Nur Rizki	63,75	72	89	74,92	blm kompeten
6	Nur Yatio	67	98	95	86,67	blm kompeten
7	Putri	85	94	96	91,67	kompeten
8	Tina	72	89,5	81	80,83	blm kompeten
9	Umar	84	91,5	93	89,50	kompeten
Rerata					81,42	Kompeten 22%

Setelah dilakukan treatment pembelajaran dengan pembelajaran VISA pada kelompok eksperimen, hasilnya adalah rerata kelompok eksperimen sebesar 89,70 sedangkan untuk kelompok kontrol yang menggunakan metode praktek adalah sebesar 81,42 sehingga ada perbedaan rerata sebesar 8,27. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata tersebut nyata atau tidak, pengujian menguji perbedaan tersebut dengan menggunakan uji non parametrik Mann-withney.

Hasil dari uji t adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Ranks

	kelas	N	Mean Rank	Sum of Ranks
hasil belajar office	kelas A	8	11,63	93,00
	kelas B	9	6,67	60,00
	Total	17		

Tabel 8. Test Statistics<sup>a</sup>

	hasil belajar office
Mann-Whitney U	15,000
Wilcoxon W	60,000
Z	-2,021
Asymp. Sig. (2-tailed)	,043
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,046 <sup>b</sup>

a. Grouping Variable: kelas

b. Not corrected for ties.

Nilai t yang diperoleh dari perhitungan menggunakan bantuan SPSS adalah 0,043 lebih kecil dari nilai sig. 0,05 sehingga dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dimana kelompok eksperimen yang menggunakan metode pembelajaran VISA lebih efektif digunakan dalam pembelajaran aplikasi perkantoran daripada metode pembelajaran praktek.

Sedangkan kalau dilihat dari prosentasi tingkat kelulusan uji kompetensi kelompok eksperimen adalah sebesar 63% berbanding kelompok eksperimen 22%. Kelompok eksperimen dengan metode belajar VISA lebih tinggi 41%. Artinya metode belajar metode belajar VISA memiliki efektifitas yang lebih tinggi daripada metode pembelajaran praktek.

### **Hambatan dalam Pembelajaran**

Hambatan selama proses pembelajaran pada program pendidikan kecakapan aplikasi perkantoran adalah sebagai berikut ini :

#### **1. Peserta didik**

- Kemampuan awal peserta sangat rendah, rata-rata lulusan SMA dan SMK yang merupakan sisa dari lulusan SMK yang berprestasi dan sudah terserap oleh DUDI.
- Ada beberapa peserta didik yang tidak lanjut di tengah jalan, sehingga harus berganti peserta dan satuan pendidikan harus mengulangi.
- Tanggung jawab peserta yang rendah untuk menyelesaikan program dengan baik karena merasa dari program pemerintah yang gratis.
- Waktu belajar yang sangat lama yang kadang membuat peserta jenuh dan kurang semangat untuk belajar.

#### **2. Satuan pendidikan**

- Satuan pendidikan kurang tegas dalam mengikat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga banyak yang putus di tengah jalan.
- Satuan pendidikan yang memberikan keterampilan tambahan selain keterampilan utama yang diberikan (diberikan materi desain grafis).
- Satuan pendidikan tidak melakukan seleksi terhadap peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan kecakapan kerja sehingga kualitas inputnya menjadi rendah terutama dari unsur motivasi dan intelegensi.
- Satuan pendidikan hanya fokus pada penyaluran kerja dan bukan menjadi kewajiban peserta untuk lulus uji kompetensi LSK sehingga walaupun bekerja hanya pekerjaan dengan penghasilan yang rendah.

#### **3. Instruktur**

- Instruktur kurang memahami penggunaan metode belajar VISA karena orientasi pembelajaran yang sangat singkat.
- Instruktur kurang kreatif dalam menciptakan materi yang baru dalam visual dan intelligensi karena dalam bahan ajar dan latihan yang diberikan sebagian contoh-contoh tidak keseluruhan materi.
- Instruktur kurang memahami kisi-kisi pedoman penilaian uji kompetensi
- Ada sebagian instruktur belum lulus CLCP dan belum kompeten.

#### 4. Program Belajar

- Ada beberapa satuan pendidikan yang memberikan pembelajaran ketika waktu selang dari peserta pembelajaran reguler kadang menimbulkan jeda belajar yang terlalu panjang.
- Jadwal pembelajaran tidak sesuai dengan rencana awal yang telah disusun
- Latihan tidak dikerjakan semua tergantung dari mood peserta didik dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam metode belajar VISA minimal 10 kali latihan

#### 5. Peralatan Belajar dan Media

- Saat penyusunan bahan ajar VISA menggunakan versi yang lama sehingga saat latihan ada beberapa komponen dan *tool* yang tidak sama
- Dalam penyusunan media belajar VISA kurang mengedepankan urutan dari materi yang mudah ke yang lebih sulit
- Soal-soal sesuai dengan kisi-kisi uji kompetensi namun kurang variatif dan tipenya sama

#### 6. Uji Kompetensi

- Dalam ketentuan ujian bisa dilaksanakan secara parsial namun dalam prakteknya tidak bisa
- Alat yang digunakan saat uji kompetensi tidak sesuai dengan spesifikasi alat latihan di satuan pendidikan.
- Spesifikasi perangkat lunak sesuai dengan ketentuan bisa memilih sesuai dengan yang dikehendaki peserta didik namun prakteknya tidak bisa.

### C. Kesimpulan dan Saran

#### Kesimpulan

1. Hasil implementasi metode belajar VISA pada aplikasi perkantoran, menyatakan bahwa metode pembelajaran VISA lebih mudah dipahami dan mampu meningkatkan kompetensi peserta didik. Metode pembelajaran VISA terbukti lebih efektif digunakan dalam pembelajaran aplikasi perkantoran daripada metode praktek yang umumnya digunakan oleh satuan pendidikan saat ini.
2. Tingkat kelulusan mencapai 65 % lebih tinggi dari pencapaian nasional yang hanya mencapai 5% dengan demikian pembelajaran dengan menggunakan metode belajar VISA dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik pendidikan kecakapan kerja program aplikasi perkantoran.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran program aplikasi perkantoran pada pendidikan kecakapan kerja adalah dari segi peserta didik, satuan pendidikan, instruktur, program belajar dan peralatan atau media, serta dari segi kesiapan TUK dalam menyelenggarakan uji kompetensi. Namun yang paling berpengaruh adalah metode pembelajaran yang dipakai.

#### Saran

1. Bagi Direktorat Kursus dan pelatihan  
Metode pembelajaran VISA dapat digunakan untuk meningkatkan penguasaan kompetensi peserta didik pendidikan kecakapan kerja aplikasi perkantoran.
2. Bagi PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah

Metode pembelajaran VISA dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan pada jenis ketrampilan yang lain.

3. Bagi Lembaga Kursus

Lembaga kursus dan pelatihan dapat menggunakan metode belajar VISA untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- DePorter, Bobbi dan Hernacki, Mike, 2006, *Quantum Learning, Membiasakan Belajar Nyaman & Menyenangkan*, Bandung: PT. Mizah Pustaka.
- Dirbinsuslat, 2011, *Standar Kompetensi Lulusan Komputer*, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Hanafiah, Nanang dan Cucu, Suhana, 2009, *Konsep Strategi Pembelajaran*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hendratet, Janis, 2018, *Model VISA pada Aplikasi Perkantoran*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Huda, Miftahul, 2013, *Model-model Pengajaran dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meier, Dave, 2003, *The Accelerated Learning*, Bandung : Kaifa.
- Ngalimun, 2012, *Strategi dan Model Pembelajaran*, Banjarmasin: Aswaja Pressindo.
- Rusman, 2012, *Model-Model Pembelajaran*, Depok : Rajagrafindo Persada.
- PP No 90 tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Surakhmad, Winarno, 1986, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*, Bandung: Tasito.
- Trianto, 2010, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*, Jakarta : Kencana.
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

